

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**ANALISIS PENGARUH IMBAL JASA LINGKUNGAN  
TERHADAP PERILAKU SADAR LINGKUNGAN  
MASYARAKAT DAERAH ALIRAN SUNGAI  
MENDALAM DESA NANGA SAMBUS  
KABUPATEN KAPUAS HULU**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Manajemen**

**Disusun Oleh :**

**MUHAMAD UGAN SUGANDA**

**NIM. 018521856**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2014**

**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul “ **Analisis Pengaruh Imbal Jasa Lingkungan Terhadap Perilaku Sadar Lingkungan Masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalan Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu** ” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan  
Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia  
Menerima sanksi akademik

Pontianak, 03 Pebruari 2014

Yang Menyatakan



Muhamad Ugan Suganda

NIM 018521856

## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Pengaruh Imbal Jasa Lingkungan Terhadap Perilaku Sadar Lingkungan Masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu

Penyusun TAPM : Muhamad Ugan Suganda

NIM : 018521856


Program Study : Magister Manajemen

Hari/Tanggal :

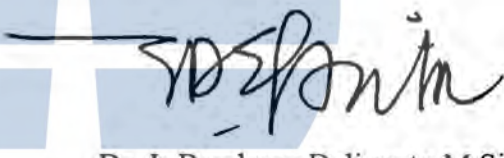
Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,




Dr. Mustaruddin, SE, M.Si  
NIP. 19620602 198903 1 002



Dr. Ir. Bambang Deliyanto, M.Si  
NIP. 19560127 198602 1 001

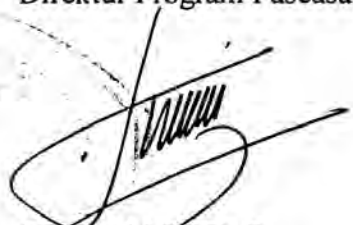
Mengetahui :

Ketua bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen  
Program Magister Manajemen



Maya Maria, SE, M.M  
NIP. 19720501 199903 2 003

Direktur Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc, Ph.D  
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN**

**PENGESAHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Muhamad Ugan Suganda, S.Hut  
NIM : 018521856  
PROGRAM STUDI : MAGISTER MANAJEMEN  
JUDUL TAPM : **Analisis Pengaruh Imbal Jasa Lingkungan Terhadap Perilaku Sadar Lingkungan Masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu / 12 April 2014  
Waktu : 13.30 - 15.30

Dan telah dinyatakan LULUS

**Panitia Penguji TAPM**

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Liestyodono B.I., M.Si

Penguji Ahli

Nama : Dr. Aryana Satrya

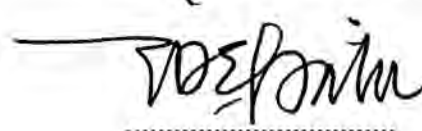
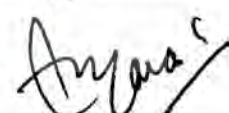
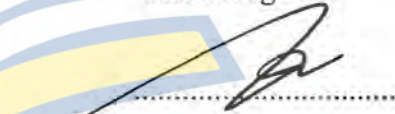
Pembimbing I

Nama: Dr. Mustaruddin, M.Si

Pembimbing II

Nama : Dr. Ir. Bambang Deliyanto, M.Si

Tandatangan





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur saya panjatkan kehadian Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan Karunia-Nya saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dengan judul “ Analisis Pengaruh Imbal Jasa Lingkungan Terhadap Perilaku Sadar Lingkungan Masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu”. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- (1) Rektor Universitas Terbuka.
- (2) Kepala Unit Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Terbuka Pontianak selaku penyelenggara Program Pascasarjana.
- (3) Pembimbing I dan pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini.
- (4) Seluruh Keluarga terutama istri dan anak-anak tersayang yang dengan setia mendampingi dan mendukung dengan moril dan sepiritnya kepada saya dalam menempuh Program Pasca Sarjana sampai selesai.
- (5) Rekan-rekan satu angkatan yang telah banyak membantu memberi dorongan dan motivasi dari awal sampai selesainya penulisan tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis sangat harapkan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu sampai selesainya tesis ini.

Pontianak, 3 Pebruari 2013

Penulis



Muhamad Ugan Suganda

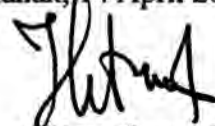
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418  
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

**BIODATA**

Nama : Muhamad Ugan Suganda, S.Hut  
N I M : 018521856  
Tempat dan Tanggal Lahir : Majalengka, 3 Pebruari 1966  
Registrasi Pertama : Tahun 2012.1  
Riwayat Pendidikan : SDN 07 Majalengka Tamat Tahun 1980  
SMPN 01 Majalengka Tamat Tahun 1983  
SMAN 01 Majalengka Tamat Tahun 1986  
D3 Kehutanan Akademi Kehutanan Bandung Tamat  
Tahun 1993  
SI Kehutanan Institut Pertanian Malang Tamat Tahun  
1995  
Riwayat Pekerjaan : 1. Karyawan HPH 1995 - 1999  
2. Honorer Dinas Kehutanan 1999 - 2006  
3. Staf Dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten  
Kapuas Hulu 2006 - 2009  
4. Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas  
Hulu 2009 - 2013  
5. Kepala Seksi Pengelolaan Kualitas Lingkungan  
Tahun 2013 sampai sekarang.  
Alamat Tetap : Jl. Ahmad Dogom No. 46 Putussibau  
Telp/HP : 0567-22444 / 081522811405

Pontianak, 14 April 2014



Muhamad Ugan Suganda, S.Hut  
NIM. 018521856

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	19
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	20
1. Lingkungan Hidup.....	20
2. Jasa Lingkungan.....	22
3. Prilaku Sadar Lingkungan.....	36
B. Landasan Empiris.....	38
C. Kerangka Pemikiran.....	39
D. Hipotesis Penelitian.....	40



	Halaman
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	41
B. Populasi dan Sampel .....	41
C. Variabel Penelitian.....	42
D. Lokasi Penelitian.....	43
E. Jenis dan Sumber Data.....	44
F. Metode Pengumpulan Data.....	45
G. Pengujian Validitas dan Reabilitas Data.....	46
H. Analisis Data.....	49
I. Pengujian Hipotesis.....	55
<b>BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Karakteristik Responden.....	57
B. Pengujian dan Analisis Data .....	61
C. Pembahasan hasil Uji dan Analisis Data.....	75
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>

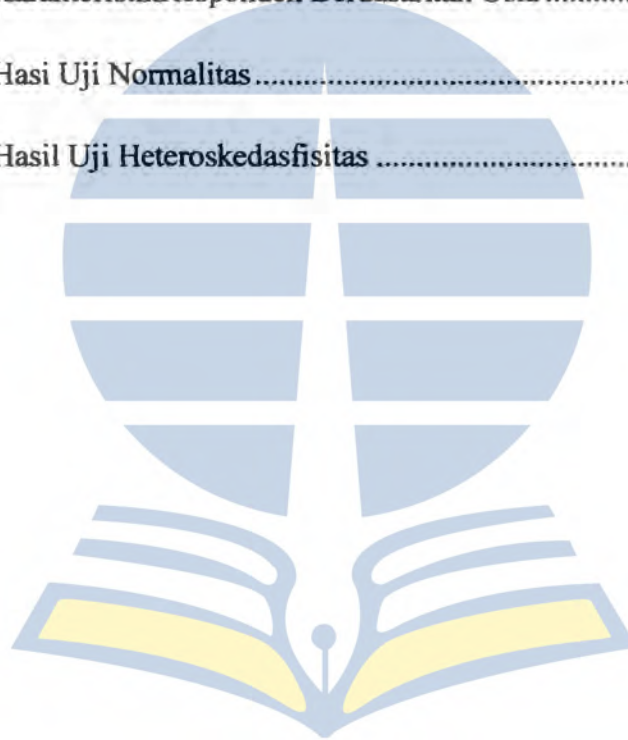


## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen .....	43
Tabel 3.2. Skor Skala Likert .....	46
Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir...	57
Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	59
Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	60
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Instrumen .....	63
Tabel 4.5. Hasil Uji Realibilitas Instrumen .....	65
Tabel 4.6. Hasil Uji Glejser .....	67
Tabel 4.7. Hasil Perhitungan Regresi.....	69
Tabel 4.8. Hasil Uji Simultan (Uji F).....	70
Tabel 4.9. Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	72
Tabel 4.10. Hasil Uji Determinasi .....	73

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran Teoritis.....	40
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian .....	44
Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	58
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	60
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas .....	66
Gambar 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	68



## ABSTRAK

Pengaruh Imbal Jasa Lingkungan Terhadap Perilaku Sadar Lingkungan Masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu

Oleh:

Muhamad Ugan Suganda

Kata Kunci : Pembinaan, Pembangunan Infrastruktur, Legalitas tanah Garapan

Pengaruh Imbal Jasa Lingkungan terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu telah memberikan masukan yang berarti terutama dalam hal mengelola sumber daya perairannya dan diharapkan memberi dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk meneliti tentang pengaruh pembinaan, pembangunan infrastruktur, legalitas tanah garapan terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat di wilayah Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang jelas tentang Pengaruh imbal jasa lingkungan terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat di wilayah Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif deskriptif*. Teknik analisis data selain menggunakan analisis *kualitatif* juga menggunakan teknik analisa data *kuantitatif* melalui kuesioner yang dijawab responden. Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu, hal ini dilakukan karena penulis memandang bahwa ada hal yang menarik mengenai kajian tentang pembinaan, pembangunan infrastruktur dan legalitas tanah garapan terhadap perilaku sadar lingkungan yang ada pada masyarakat di Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu, terutama dalam hal pengelolaan perairan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembinaan, pembangunan infrastruktur, legalitas tanah garapan berpengaruh terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu secara signifikan. Artinya Pembinaan, Pembangunan infrastruktur, dan legalitas tanah garapan yang dilakukan berdampak positif terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat. Hasil uji nilai Fhitung sebesar 38,117 dengan signifikan 0,000. Sedangkan Ftabel pada tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% atau  $\alpha = 0,05$  Hal menunjukan uji F atau uji simultan antar variabel perhatikan nilai sig. Karena  $\text{sig} = 0,000 < 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima. Artinya secara simultan pembinaan, pembangunan infrastruktur dan legalitas tanah garapan berpengaruh terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat. Koefisien determinasi, dengan Adjust R Square sebesar 0,488. Artinya pola pembinaan, pembangunan infrastruktur dan legalitas tanah garapan berpengaruh terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat sebesar 48,8% sedangkan 51,2% dipengaruhi oleh faktor lain ( $100\% - 48,8\% = 51,2\%$ ).



## ABSTRACT

*Effect of Environmental Services Return to environmentally conscious behavior depth Watershed communities Nanga village Sambus Kapuas Hulu*

By :

*Muhamad Ugan Suganda*

*Keywords : Development , Infrastructure Development , Legality of arable land.*

*Effect of Environmental Services Return to environmentally conscious behavior depth Watershed communities Nanga Sambus Village Kapuas Hulu has provided meaningful input, especially in terms of managing its water resources and are expected to have a positive impact to the surrounding community. The purpose of this study is to examine the general influence of coaching, development of infrastructure, the legality of the behavior of the cultivated land in the area of environmentally conscious society Watershed depth Nanga Sambus Village Kapuas Hulu. This study is intended to obtain clear information about the Influence of reward to behavior environmentally conscious communities in the Deep River Basin affluent Nanga Sambus Village Kapuas Hulu.*

*This research uses descriptive qualitative research method. Data analysis techniques besides using qualitative analysis also uses quantitative data analysis techniques through a questionnaire respondents answered. This research was conducted in-depth Watershed Nanga Sambus Village Kapuas Hulu, this is done because the author sees that there is something interesting about the study of development , infrastructure development and the legality of a claim against the environmentally conscious behavior of the community in the Nanga Sambus Village District Kapuas Hulu, particularly in terms of water management. The results showed that simultaneous development, infrastructure development, the legality of arable land affected the behavior of environmentally conscious society Watershed depth Nanga Sambus Village Kapuas Hulu significantly. That is coaching, development of infrastructure, and the legality of arable land made a positive impact on the behavior of environmentally conscious society. The test results of F value of 38.117 with a 0.000 significant. While F Table confidence level (confidence interval) 95% or  $\alpha = 0.05$ . This shows the F test or tests between variables simultaneously consider the sig. Because sig = 0.000 < 0.05 means that  $H_0$  is rejected,  $H_a$  accepted. This means simultaneously coaching, infrastructure development and arable land affect the legality of the behavior of environmentally conscious society. coefficient of determination, with the Adjust R Square of 0.488 . That is the pattern of development , infrastructure development and arable land affect the legality of the behavior of environmentally conscious society for 48.8 % , while 51.2% is influenced by other factors (100 % - 48.8 % = 51.2 %)*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Kapuas Hulu berada di ujung Timur Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah  $\pm 29.842 \text{ Km}^2$  (2.984.200 Ha). Memiliki luas wilayah perairan umum  $\pm 450.257 \text{ Ha}$  yang terdiri dari 202 buah sungai. Desa Nanga Sambus Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah perhuluan wilayah Daerah Aliran Sungai Mendalam, dimana batas wilayah sebelah utara Desa Pala Pulau, Desa Sibau Hilir, Desa Sibau Hulu. Sebelah selatan Sungai Kapuas, sebelah timur Ariung Mendalam, Desa Tanjung Karang, sebelah barat, Desa Pala Pulau. Selain itu dapat dilihat luas wilayah pemukiman  $24.00 \text{ ha/m}^2$ , luas persawahan seluas  $81.00 \text{ ha/m}^2$ , luas perkebunan  $338.00 \text{ ha/m}^2$ . Penduduk yang berada di Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penduduk dalam taraf yang sedang berkembang, hal ini dapat dilihat dari perkembangan penduduknya.

Manusia hidup di permukaan bumi bersama-sama dengan komponen lingkungan lainnya, berupa komponen biotik, yaitu hewan, tumbuhan, dan jasad renik, serta komponen abiotik (tidak hidup). Secara langsung maupun tidak langsung, secara disadari ataupun tidak disadari semua unsur-unsur lingkungan yang ada di sekitar senantiasa memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia.



Menurut Nommy H.T Siahaan (2004:5) pada hakekatnya lingkungan hidup adalah *antrophocentris* artinya lingkungan hidup itu dipelihara dibangun dan dikelola dengan sebaik-baiknya tidak lain demi kepentingan kelangsungan hidup dari generasi-generasi manusia. Menurut Daryanto (2013: 31) lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang No 32 tentang lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Menurut Daryanto (2013: 31) Pada lingkungan hidup dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Lawan dari lingkungan hidup adalah lingkungan buatan, yang mencakup wilayah dan komponen-komponennya yang banyak dipengaruhi oleh manusia.

Ekosistem, yaitu tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi dan membentuk keseimbangan, stabilitas produktivitas lingkungan hidup (UU No. 32 Lingkungan Hidup Tahun 2009). Unsur-unsur lingkungan hidup baik unsur biotik maupun abiotik, baik makhluk hidup maupun benda mati, semuanya tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang masing-masing tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hidup sendiri, melainkan saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling berinteraksi, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Sedangkan menurut Daryanto (2013 :63) Ekosistem adalah suatu sistem



ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Menurut Daryanto (2013: 83) Ekosistem yang dikatakan seimbang adalah apabila semua komponen baik biotik maupun abiotik berada pada porsi yang seharusnya baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Dalam suatu ekosistem yang masih alami dan belum terganggu akan didapati adanya keseimbangan antara komponen-komponen penyusunan ekosistem tersebut. Keadaan ini disebut homeostatis yaitu kemampuan ekosistem untuk dapat menahan berbagai perubahan dalam sistem secara menyeluruh.

Perubahan yang terjadi pada suatu komponen dampaknya akan dirasakan oleh komponen lain. Sebagai contoh, manusia melakukan tindakan berupa penggundulan hutan untuk dimanfaatkan sumber daya kayunya. Namun dalam praktiknya, kegiatan tersebut tidak memperhatikan faktor-faktor kelestarian dan daya dukung lainnya. Maka sebagai reaksinya terjadilah banjir bandang pada saat musim hujan dengan intensitas tinggi.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam yang berupa: tanah, air dan udara dan sumber daya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Namun demikian, harus disadari bahwa sumber daya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelangsungan kehidupan manusia sangat bergantung dari unsur-unsur lingkungan lainnya. Manusia hanyalah salah satu dari komponen lingkungan tersebut. Jika manusia

menginginkan kelangsungan kehidupannya, manusia hendaknya sadar benar bahwa kelestarian komponen-komponen lingkungan hidupnya harus senantiasa terjaga dari kehancuran bahkan kepunahan.

Menurut Santoso Budi (1999 :8) Mutu lingkungan hidup dapat dianggap sebagai derajat baik dan buruknya lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat sumber daya alam yang layak dimanfaatkan manusia. Namun secara sederhana mutu lingkungan hidup diartikan sebagai derajat kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang hidup di suatu wilayah secara optimal. Mutu lingkungan hidup dibedakan berdasarkan lingkungan biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya.

1. Lingkungan biofisik terdiri dari komponen-komponen lingkungan hidup alamiah, yaitu biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi satu sama lain.
2. Lingkungan sosial ekonomi adalah lingkungan manusia dan hubungan antar sesamanya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Lingkungan budaya adalah segala kondisi, baik berupa materi (benda) maupun non materi yang dihasilkan karena budi daya oleh manusia

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Hubungan antara makhluk hidup, terutama manusia dan lingkungannya, sebenarnya telah berlangsung sejak manusia lahir. Begitu seseorang lahir ke dunia, secara langsung ataupun tidak dia sudah melakukan interelasi dengan



lingkungan hidupnya, seperti memanfaatkan oksigen di udara untuk bernafas. Setelah lebih besar, tingkat ketergantungan terhadap lingkungan tentunya semakin tinggi, sejalan perkembangan kebutuhannya. Semua kebutuhan itu tentunya didapat melalui interaksi dengan lingkungan baik lingkungan alam, sosial, dan budaya.

Peranan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal ini menjadi bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam upaya mengelola lingkungan. Pengelolaan lingkungan secara terpadu dirasakan memberikan peluang pengelolaan yang cukup efektif dalam rangka menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi. Salah satu bentuk pengelolaan yang cukup berpeluang memberikan jaminan efektifitas dalam pengimplementasiannya adalah pengelolaan berbasis masyarakat (*community based management*).

Perkembangan lingkungan yang semakin tercemar memungkinkan terjadinya suatu krisis terhadap lingkungan sosial. Krisis terhadap lingkungan hidup merupakan suatu tantangan yang sangat besar. Tantangan ini terutama di negara-negara yang sedang membangun karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan.

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Di dalam tata kehidupan manusia air banyak memegang peranan penting, antara lain untuk minum, memasak, mencuci dan mandi. Di samping itu air juga banyak diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi.



Tindakan manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari, secara tidak sengaja telah menambah jumlah bahan anorganik pada perairan dan mencemari air. Misalnya, pembuangan detergen ke perairan dapat berakibat buruk terhadap organisme yang ada di perairan. Pemupukan tanah persawahan atau ladang dengan pupuk buatan, kemudian masuk ke perairan akan menyebabkan pertumbuhan tumbuhan air yang tidak terkendali yang disebut eutrofikasi atau blooming. Beberapa jenis tumbuhan seperti alga, paku air, dan eceng gondok akan tumbuh subur dan menutupi permukaan perairan sehingga cahaya matahari tidak menembus sampai dasar perairan. Akibatnya, tumbuhan yang ada di bawah permukaan tidak dapat berfotosintesis sehingga kadar oksigen yang terlarut di dalam air menjadi berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran terdiri dari langkah pencegahan terhadap permasalahan pencemaran terhadap permasalahan pencemaran terdiri dari langkah pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahan adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Adapun penanggulangan atau pengendaliannya adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasan lingkungan dan penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Secara umum, berikut ini merupakan upaya pencegahan atas pencemaran lingkungan.

1. Mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan.
2. Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk.

3. Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan.
4. Melakukan penghijauan.
5. Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan.
6. Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya.

Untuk menanggulangi masalah yang sedang dihadapi, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu syarat utama bagi keberhasilan usaha pengendalian dan pelestarian lingkungan. Pembangunan tidak mungkin dilakukan tanpa peran serta semua pihak, terutama di negara yang sedang membangun seperti Indonesia.

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya mengatur lingkungannya, tetapi di dalamnya termasuk mengatur dan mengendalikan berbagai kegiatan manusia agar berlangsung dan berdampak dalam batas kemampuan dan keterbatasan lingkungan untuk mendukungnya. Manusia perlu secara rutin mengelola lingkungan hidup agar dapat memanfaatkannya secara optimal.

Pengelolaan lingkungan perlu dilakukan sejak dini agar pembangunan yang makin pesat pelaksanaannya dapat memanfaatkan lingkungan hidup melalui penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan. Pembangunan tidak saja mendatangkan manfaat, tetapi juga



menimbulkan resiko terjadinya kerusakan lingkungan. Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk menimbulkan keragaman dan diversifikasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut UU Nomor 32 tahun 2009 bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia;
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. mengantisipasi isu lingkungan global.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Demikian pengertian lingkungan hidup sebagaimana dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia melalui keputusan bersama Departemen Kehutanan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sejak tahun 2001 telah mengeluarkan larangan ekspor kayu bulat (log) dan bahan baku setengah jadi. Selain itu pemerintah juga telah berkomitmen untuk melakukan pemberantasan ilegal logging dan juga melakukan rehabilitasi hutan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHHL) dan juga penanaman gerakan menanam sejuta pohon.

Berangkat dari kompleksnya faktor penyebab kerusakan hutan di Indonesia dibutuhkan solusi yang cepat dan tepat, untuk menyatukan visi dan misi seluruh *stakeholders* dalam menjaga eksistensi hutan di negara ini. Jeda penebangan hutan atau *Moratorium Logging* adalah suatu metode pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktifitas penebangan kayu skala besar (skala industri) untuk sementara waktu tertentu sampai sebuah kondisi yang diinginkan tercapai. Lama atau masa diberlakukannya moratorium biasanya ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut.

Upaya pelestarian lingkungan telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan dana APBN maupun APBD bersama masyarakat. Namun permasalahan lingkungan yang semakin tinggi, maka diperlukan upaya yang lebih intensif dan terpadu dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang ada. Salah satu upaya yang dapat dikembangkan di antaranya adalah melalui penerapan Imbal Jasa Lingkungan (IJL). Konsep Imbal Jasa Lingkungan

didasarkan pada pemahaman bahwa lingkungan beserta segenap komponen di dalamnya memiliki peran dalam mendukung kehidupan yang selama ini belum dipertimbangkan dalam sistem ekonomi. Sebagai contoh, nilai suatu kawasan hutan hanya dihitung berdasarkan jumlah produksi kayu saja, tanpa memperhitungkan peran (jasa) hutan dalam pengaturan tata air, pencegahan bencana alam, sumber keanekaragaman hayati, penyerapan polutan atau karbon, penyediaan pemandangan yang indah, dan lain-lain. Dalam sistem ekonomi pihak pengguna harus membayar kepada penyedia untuk dapat memanfaatkan jasa tersebut. Jenis jasa lingkungan yang berkembang saat ini meliputi perlindungan air baku, pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi keanekaragaman hayati, perdagangan karbon dan keindahan alam. Penerapan di Indonesia telah dirintis dan dimediasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat peduli lingkungan seperti di Propinsi NTB, Lampung, Banten, dan Jawa Barat. Potensi sumber daya yang ada tersebut telah merangsang bertambahnya jumlah pengguna komersial yang memanfaatkan air baik sebagai bahan baku utama maupun sebagai pendukung dalam proses produksi usahanya.

Jasa lingkungan ialah manfaat yang diperoleh masyarakat dari hubungan timbal-balik yang dinamis yang terjadi di dalam lingkungan hidup, antara tumbuhan, binatang, jasad renik dan lingkungan non-hayati. Walaupun kekayaan materi dapat membentengi perubahan lingkungan, manusia sangat tergantung pada aliran jasa lingkungan tersebut.

Pengelolaan DAS merupakan suatu bentuk pembangunan wilayah yang menempatkan DAS sebagai unit pengelolaan. Pada dasarnya pengelolaan DAS merupakan upaya manusia untuk mengendalikan hubungan timbal balik antara



sumber daya alam dengan manusia dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan (Departemen Kehutanan, 2000). Sebenarnya Indonesia telah memiliki peraturan perundangan tentang IJL yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 14 yang banyak terkait dengan pemanfaatan air, dan PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan siklus hidrologi dan menjamin ketersediaan air sepanjang tahun. Untuk itu maka diperlukan adanya rumusan masalah tentang pembayaran atau kompensasi langsung oleh para pengguna jasa air di wilayah hilir kepada para penyedia di wilayah hulu. Keadaan demikian dapat didekati dengan cara pendekatan ekonomi lingkungan untuk mengetahui kesediaan masyarakat hulu menerima pembayaran atas jasa lingkungan, untuk melihat hal tersebut melalui sumber daya alam merupakan faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi (Fauzi 2006: 4). Pengelolaan pemulihan atas kerusakan atau upaya untuk memelihara lingkungan perlu dikembangkan pendekatan kesediaan masyarakat untuk menerima pembayaran atas jasa lingkungan guna mengurangi resiko lingkungan atau *Willingness to Accept* (WTA) di kawasan hulu. Komponen dalam pengelolaan jasa lingkungan menjelaskan bahwa antara aktor, ruang dan waktu yang satu dengan lainnya saling terkait (*interconnected*), terjadi saling ketergantungan (*interdependent*) dan membentuk suatu sistim ekologis. Terjadinya gangguan atau kerusakan salah satu komponen ekosistem tersebut



menyebabkan gangguan pada keseluruhan sistem yang ada. Komponen-komponen menyeimbangkan ekosistem dan dapat berlangsung dan berfungsi dengan baik dan berkelanjutan, sehingga diperlukan adanya aliran *feedback* atas penggunaan bahan dan energi, misalnya berupa pembebanan biaya kompensasi atas penggunaan jasa lingkungan berupa pembayaran dengan uang dari pengguna (*users pay principle*) kepada penghasil jasa lingkungan. Kebijakan ekonomi lingkungan berbasis pasar mendasari konsep pembayaran jasa lingkungan (PJJ) (Landell-Mills and Porras, 2002: 23) Pendekatan ini berprinsip bahwa siapa yang menyediakan jasa lingkungan harus diberi insentif atau imbalan terhadap usaha mereka tersebut dan siapa yang memanfaatkan jasa lingkungan harus berkontribusi terhadap pemberian insentif tersebut. Berdasarkan prinsip tersebut, maka terjadilah yang dinamakan transaksi sukarela jasa lingkungan, dimana penyedia jasa lingkungan melalui praktek penggunaan lahan ramah lingkungan mendapatkan insentif dari pemanfaat jasa lingkungan, jika penyedia jasa lingkungan dapat menjamin stok dan aliran jasa lingkungan secara terus menerus (merupakan persyaratan atau kondisionalitas - *conditionality*) (Pagiola and Platais, 2002: 429). Skema Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai instrumen berbasis pasar pada mulanya didesain sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi konservasi. Skema IJL dengan efisiensi tinggi mengharuskan tingkat kondisionalitas yang ketat mengenai stok dan suplai jasa lingkungan dengan mengutamakan kepentingan konservasi. Hal ini mengesampingkan isu pengentasan kemiskinan karena diasumsikan dapat menurunkan efisiensi dari skema IJL (Pascual 2010: 69) Pelaksanaan skema ini di Asia, tentunya memerlukan beberapa adaptasi dan inovasi mengingat

keunikan ekosistem dan kondisi sosioekonomi masyarakat di benua ini (Van Noordwijk 2005: 53). Selain itu, pengabaian terhadap isu pengentasan kemiskinan pada titik waktu tertentu akan menurunkan efisiensi dari skema IJL karena eratnya hubungan antara kemiskinan dan konservasi di negara-negara berkembang (Pascual 2010: 70) dalam. *World Agroforestry Centre* melalui proyek RUPES (*Rewarding Upland Poor for Environmental Services They Provide*) melakukan riset aksi untuk menganalisis skema IJL yang menjembatani tujuan konservasi dan pengentasan kemiskinan (Van Noordwijk 2005 :54) Oleh karena itu, RUPES memakai istilah Imbal Jasa Lingkungan (*Rewards for Environmental Services*). Hal ini bertujuan secara eksplisit menyatakan bahwa skema tersebut tidak berfokus pada efisiensi transaksi atau Pembayaran Jasa Lingkungan (*Payment for Environmental Services*) semata.

Perilaku terhadap kebersihan lingkungan merupakan bagian dalam usaha pelestarian, pemanfaatan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Perilaku ini adalah kemampuan untuk bertindak, bekerja, beraktifitas dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan unsur-unsur lingkungan hidup sebaik-baiknya sehingga masyarakat luas dapat merasakan manfaat dari kebersihan lingkungan.

Hal ini sejalan dengan pengertian PKLH menurut Warnadi (1982: 3) yang mengatakan bahwa pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup adalah suatu pendidikan yang membina siswa agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional serta bertanggungjawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungannya dalam berbagai aspek kehidupan manusia.



Masyarakat yang hidup menyatu dengan lingkungan mampu mengelola sumber daya alam dan memperhatikan aspek konservasi yang keberlanjutan, perilaku masyarakat tersebut dapat terlihat dari kemampuan manusia hidup menyatu di alam dengan segala upayanya. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi dan genetika.

Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar. Perilaku tidak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial, yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat lebih tinggi, karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol sosial. Dalam kedokteran perilaku seseorang dan keluarganya dipelajari untuk mengidentifikasi faktor penyebab, pencetus atau yang memperberat timbulnya masalah kesehatan. Intervensi terhadap perilaku seringkali dilakukan dalam rangka penatalaksanaan yang holistik dan komprehensif. Perilaku manusia dipelajari dalam ilmu psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi dan kedokteran. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Karakteristik perilaku yaitu:

1. Perilaku adalah perkataan dan perbuatan individu. Jadi apa yang dikatakan dan dilakukan oleh seseorang merupakan karakteristik dari perilakunya.



2. Perilaku mempunyai satu atau lebih dimensi yang dapat diukur, yaitu: frekuensi, durasi, dan intensitas.
3. Perilaku dapat diobservasi, dijelaskan dan direkam oleh orang lain atau orang yang terlibat dalam perilaku tersebut.
4. Perilaku mempengaruhi lingkungan, lingkungan fisik atau sosial.
5. Perilaku dipengaruhi oleh lingkungan.
6. Perilaku bisa tampak atau tidak tampak. Perilaku yang tampak bisa diobservasi oleh orang lain, sedangkan perilaku yang tidak tampak merupakan kejadian atau hal pribadi yang hanya bisa dirasakan oleh individu itu sendiri atau individu lain yang terlibat dalam perilaku tersebut.

Perilaku atau aktivitas pada individu atau organisme tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Perilaku individu dapat mempengaruhi individu itu sendiri, di samping itu perilaku juga berpengaruh pada lingkungan. Demikian pula lingkungan dapat mempengaruhi individu, demikian sebaliknya. Oleh sebab itu, dalam perspektif psikologi, perilaku manusia (*human behavior*) dipandang sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks (Azwar, 2003: 23).

J. Paul Peter and Jerry C. Oslon (2014: 8) menyatakan tentang pembentukan perilaku penting mencakup pengaturan kondisi yang mengubah probabilitas beberapa perilaku tertentu bukan sebagai itu sendiri melainkan untuk meningkatkan probabilitas perilaku lain. Biasanya, pembentukan perilaku mencakup penguatan positif dugaan berturut-turut mengenai perilaku atau perilaku-perilaku dikehendaki yang harus diperagakan.

Keyakinan-keyakinan berpengaruh pada sikap terhadap perilaku tertentu, pada norma-norma subjektif dan pada kontrol perilaku yang dihayati. Keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif dan motivasi untuk

bertindak sesuai dengan harapan normatif tersebut membentuk norma subjektif dalam diri individu. Kontrol perilaku ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang bersangkutan. Secara garis besar, perilaku manusia diakibatkan oleh:

1. Genetika
2. Sikap adalah suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu.
3. Norma sosial adalah pengaruh tekanan sosial.
4. Kontrol perilaku pribadi adalah kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu perilaku.

Kesadaran akan lingkungan hidup di sekitar kehidupan pribadi beserta keluarga akan makin menggugah hati untuk lebih biasa memanfaatkan arti dari kehidupan yang berkelanjutan sampai generasi berikutnya. Pada akhirnya memang harus diakui, menjaga lingkungan itu banyak manfaatnya dan bahkan harus dilakukan. Seperti pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan diantaranya melalui pendidikan dalam arti memberi arahan pada sistem nilai dan sikap hidup untuk mampu memelihara keseimbangan antara pemenuhan kepentingan pribadi, kepentingan lingkungan sosial, dan kepentingan alam. Kedua, memiliki solidaritas sosial dan solidaritas alam yang besar mengingat tindakan pribadi berpengaruh kepada lingkungan sosial dan lingkungan alam. Kegiatan karya



wisata ke alam bebas, hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih mendekatkan diri mereka terhadap alam, dan agar mereka mengetahui bahwa lingkungan harus dijaga dengan baik bukan untuk dirusak atau dihancurkan. Pemerintah juga harus membuat masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi, dengan menjalankan peraturan yang telah dibuat ataupun dengan mengadakan event-event yang dapat membangkitkan kepedulian terhadap lingkungan.

Kerusakan lingkungan saat ini marak terjadi akibat kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti sumber daya alam. Memperhatikan konsep dan tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup maka membangun kesadaran merupakan tahapan penting dari sebuah proses partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Lebih dari sekedar diseminasi pengetahuan dan keterampilan, Pendidikan Lingkungan Hidup juga berfungsi sebagai media penting untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma baru dalam hal interaksi antara manusia dan lingkungan. Oleh karenanya proses pendidikan yang menekankan metode dialogis akan lebih mampu mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan berkelanjutan serta menghindarkan konflik yang bersifat destruktif.

Menurut Daryanto (2013: 16) Keberhasilan pendidikan lingkungan hidup ini secara obyektif dapat dinilai berdasarkan indikator besarnya tingkat perubahan perilaku sasaran terkait di ketiga ranah, yaitu: kesadaran (kognitif), sikap (afektif) dan tindakan (psikomotorik/aksi). Perubahan yang dimaksud sepatutnya dapat berkontribusi pada tingkat keterlibatan individu/kelompok/komunitas sasaran yang bersangkutan dalam proses



kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki ataupun memelihara kualitas lingkungan hidup. Perubahan yang dimaksud supaya dapat berkontribusi pada tingkat keterlibatan individu, kelompok atau komunitas sasaran dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki ataupun memelihara kualitas lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu subjek dan tidak bisa berdiri sendiri, namun berkaitan dengan persoalan-persoalan lain seperti kemiskinan, *Good Corporate Governance*, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun kelompok atau komunitas masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Imbal Jasa Lingkungan dalam bentuk pembinaan yang dialokasikan di Desa Nanga Sambus bisa meningkatkan perilaku sadar lingkungan di lingkungan hidup daerah tersebut.
2. Apakah Imbal Jasa Lingkungan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang dialokasikan di Desa Nanga Sambus bisa meningkatkan perilaku sadar lingkungan di lingkungan hidup daerah tersebut.
3. Apakah Imbal Jasa Lingkungan dalam legalitas tanah garapan yang dialokasikan di Desa Nanga Sambus bisa meningkatkan perilaku sadar lingkungan di lingkungan hidup daerah tersebut.

### C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Imbal Jasa Lingkungan dalam bentuk pembinaan yang dialokasikan di Desa Nanga Sambus terhadap sikap perilaku sadar lingkungan di lingkungan masyarakat Daerah Aliran Sungai Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Imbal Jasa Lingkungan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang dialokasikan di Desa Nanga Sambus terhadap sikap perilaku sadar lingkungan di lingkungan masyarakat Daerah Aliran Sungai Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Imbal Jasa Lingkungan dalam bentuk legalitas tanah garapan yang dialokasikan di Desa Nanga Sambus terhadap sikap perilaku sadar lingkungan di lingkungan masyarakat Daerah Aliran Sungai Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu.

### D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi penelitian lanjutan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemegang kebijakan lainnya dalam hal ini *stakeholder* yang menangani masalah lingkungan hidup di Kabupaten Kapuas Hulu dan instansi terkait lainnya dalam merumuskan strategi dan model pemberdayaan masyarakat khususnya pada masyarakat penyedia jasa lingkungan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan hidup manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan terbagi atas dua yaitu, lingkungan abiotik dan biotik. Adapun berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup yang termasuk di dalamnya manusia dan perilaku manusia yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Keberadaan tentang sumber-sumber air permukaan maupun air tanah telah didefinisikan pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dimana sumber air didefinisikan sebagai wadah air yang terdapat di atas permukaan seperti sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara, serta yang di bawah permukaan termasuk dalam pengertian ini akuifer dan mata air. Keseimbangan ekosistem antara wilayah hulu dan wilayah hilir sebagai suatu neraca lingkungan hidup yang diimplementasikan dalam aktivitas



ekonomi dan pelestarian lingkungan harus memperoleh perhatian yang sejajar dan selaras baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta, Perguruan Tinggi (PT) dan masyarakat secara keseluruhan, dan stakeholder terkait lainnya. Kegiatan produksi dan ekonomi di wilayah hulu harus memperhatikan aspek kelestarian dan keselamatan di wilayah hilir, hal ini sejalan dengan Undang-undang RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, Pasal 4 yang menyatakan bahwa sumberdaya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Sumberdaya air mempunyai fungsi sosial berarti bahwa sumberdaya air untuk kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu, mempunyai fungsi lingkungan hidup berarti bahwa sumberdaya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna, sedangkan sumberdaya air mempunyai fungsi ekonomi berarti bahwa sumberdaya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha.

Pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan merupakan pengelolaan air yang bersifat multi dimensional Flint 2003 (dalam Fauzi 2011: 20) yang menyangkut hubungan antara sumberdaya alam, sosial dan sistem ekonomi yang simultan dalam penggunaan dan pengelolaan air. Menurut Kodoatie 2008 (dalam Fauzi 2011: 21) bahwa sumber daya air dari sisi siklus hidrologi dan sisi wilayah air selalu mengalir dari daerah hulu ke daerah hilir melalui berbagai situasi dan kondisi antara lain topografi dan kontur tanah, kemiringan, tutupan tanah, dan tata guna lahan; namun pada

hakekatnya air tidak dibatasi oleh batas administrasi baik kabupaten atau kota atau provinsi namun oleh batas Daerah Aliran Sungai-nya (DAS). Air yang mengalir tersebut, umumnya dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan keperluan masyarakat dan industri, pertanian dan lainnya. Ketersediaan dan keberadaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan tata guna lahan. Sebagai contoh ketika suatu kawasan hutan berubah menjadi daerah permukiman maka kebutuhan air meningkat karena dipakai untuk penduduk di permukiman tersebut namun secara bersamaan ketersediaan air berkurang karena daerah resapan air telah berkurang pula.

## 2. Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan diartikan sebagai keseluruhan konsep sistem alami yang menyediakan aliran barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan yang dihasilkan oleh proses ekosistem alami. Misalnya hutan sebagai ekosistem alami selain menyediakan berbagai macam produk kayu juga menyediakan produk non kayu sekaligus juga menjadi reservoir besar yang dapat menampung air hujan, menyaring air yang kemudian melepaskannya secara gradual, sehingga air tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun dengan adanya penebangan pohon yang tidak terkendali pada sistem hutan alami dapat menimbulkan gangguan, terutama dalam siklus air dimana dengan adanya pembabatan hutan dapat menyebabkan banjir pada saat musim hujan dan menurunnya kualitas air, demikian pula saat musim kemarau terjadi kekurangan (defisit) air yang otomatis berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas air yang dapat menimbulkan kerentanan masyarakat hilir dalam kebutuhan dan ketersediaan air bersih



atau air minum yang berakibat kualitas hidup terancam dan kesejahteraan masyarakat menjadi menurun. Jasa hidrologis hutan tersebut akan terancam seiring dengan meningkatnya laju degradasi, untuk itu diperlukan adanya hubungan hulu-hilir dalam bentuk penyediaan biaya atau dana kompensasi dari pengguna jasa lingkungan di wilayah hilir.

Menurut Suryaatmojo 2008 (dalam Etty 2012: 11) mengemukakan bahwa hutan sebagai penyedia jasa lingkungan yang diharapkan mampu memberi nilai ekonomi lebih tinggi dengan mengetahui berbagai kemampuan dalam penyediaan sumber daya air, penyerap karbon, penghasil oksigen, jasa wisata alam, satwa, biodiversitas dan dan sebagainya.

Konsep Imbal Jasa Lingkungan (IJL) atau *Payment for Environmental Services* (PES) dapat diadopsi dan dikembangkan di Indonesia, namun perlu merumuskan mekanisme IJL yang dapat diterima semua pihak dan diatur dalam aturan perundang-undangan sehingga mempunyai kepastian hukum untuk melaksanakannya. Pada penelitian ini yang dimaksudkan sebagai Imbal Jasa Lingkungan (IJL) didefinisikan sebagai suatu transaksi sukarela atau mengikat secara hukum dimana sebuah jasa lingkungan yang jelas dan dapat teridentifikasi dimanfaatkan (dibeli) oleh para pemanfaat (pembeli) yang diperoleh dari para penyedia jasa lingkungan yang merupakan sebuah pembayaran atas jasa lingkungan.

Pengembangan kebijakan IJL dimulai dari kasus-kasus bersifat lokal dengan cara melakukan kajian; terutama bila kajian tersebut berdasarkan pada konsep instrumen ekonomi lingkungan sehingga formulasi instrumen kebijakannya menjadi sesuatu yang signifikan untuk diaplikasikan dalam

masyarakat. Hubungan antara jasa lingkungan dan IJL berarti terjadinya pemanfaatan atas sumberdaya dimaksud, dalam hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dimana disebutkan bahwa: pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. Dalam peraturan pemerintah tersebut dikatakan pula bahwa jasa lingkungan adalah jasa ekosistem alamiah dan sistem budidaya yang manfaatnya dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka membantu memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan manusia.

Menurut (Panayotou 1994: 32) kasus IJL di beberapa negara, instrumen ekonomi telah banyak diaplikasikan di lapangan dan efektif dalam mengendalikan dampak lingkungan atas penggunaan sumberdaya alam bagi pembangunan. (Panayotou 1994: 32) menyebutkan paling tidak ada empat hal utama menyangkut fungsi instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan, yaitu:

- a. menginternalisasikan eksternalitas dengan cara mengoreksi kegagalan pasar melalui mekanisme *full cost pricing* (dalam manajemen SPAM disebut sebagai *full cost recovery plus*) dimana plusnya mencakup biaya subsidi, biaya lingkungan dan biaya eksternalitas yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan atau dengan kata lain bahwa *full cost pricing* (P) terdiri dari *marginal (or incremental) production cost* (MPC),



*marginal user (or depletion) cost (MUC)*, dan *marginal environmental (or damage) cost (MEC)*.

- b. mampu mengurangi konflik pembangunan versus lingkungan, bahkan jika dilakukan secara tepat dapat menjadikan pembangunan ekonomi sebagai wahana untuk perlindungan lingkungan dan sebaliknya.
- c. instrumen ekonomi berfungsi untuk mendorong efisiensi dalam penggunaan barang dan jasa dari sumberdaya alam, sehingga tidak menimbulkan *overconsumption* atau *over-use* (atau *over-exploitation*, misalnya dalam terminologi *over-fishing* dan *over-cutting*) karena pasar, tetapi melalui instrumen ekonomi akan memberikan sinyal yang tepat terhadap penggunaan yang tidak efisien.
- d. instrumen ekonomi dapat digunakan sebagai sumber penerimaan (*revenue generating*) yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Rosa 2005 (dalam Fauzi 2011:33) pakar tentang pembayaran jasa lingkungan dari Amerika Tengah mendefinisikannya sebagai kompensasi jasa ekosistem. Menurutnya, ada 4 klasifikasi jasa ekosistem dalam rangka Millenium Ecosystem Assessment (MEA), yaitu:

- a. Jasa Penyediaan (*provisioning services*): sumber bahan makanan, obat-obatan alamiah, sumberdaya genetik, kayu bakar, serat, air, dan mineral.
- b. Jasa Pengaturan (*regulating services*): fungsi menjaga kualitas udara, pengaturan iklim, pengaturan air, kontrol erosi, penjernihan air, pengelolaan sampah, kontrol penyakit manusia, kontrol biologi, dan pengurangan resiko.

- c. Jasa Kultural (*cultural services*): identitas dan keragaman budaya, nilai-nilai religius dan spiritual, pengetahuan (tradisional dan formal), inspirasi, nilai estetika, hubungan sosial, nilai peninggalan pusaka dan cagar budaya (*heritage*), dan rekreasi.
- d. Jasa Pendukung (*supporting services*): produksi utama, formasi tanah, produksi oksigen, ketahanan tanah, penyerbukan, ketersediaan habitat, siklus gizi dan lain-lain.

Dengan demikian masyarakat hendaknya dapat memaknai suatu keadaan yang disediakan oleh ekosistem dan keberadaannya tergantung pada kemampuan ekosistem tersebut dalam menyediakan jasa lingkungan yang diinginkannya.

Imbal jasa lingkungan sudah dapat diimplementasikan pada berbagai sumberdaya alam namun perspektifnya beragam. Keberagaman terkait dengan elemen yang terlibat dalam skema pembayaran jasa lingkungan yang perlakuannya beragam pula antara sumberdaya yang satu dengan sumberdaya yang lainnya, antara lain penerapannya pada; (1) jasa air di Daerah Aliran Sungai (DAS), (2) jasa keanekaragaman hayati, (3) jasa *landscape beauty* atau keindahan lansekap, dan (4) jasa karbon sequestration. Keberagaman pembayaran jasa lingkungan tersebut juga berlaku dalam hal level atau tingkatan implementasi dan bahkan pengertian mengenai konsepnya itu sendiri. Negosiasi antar *stakeholders* adalah *entry point* yang penting dalam pelaksanaan pembayaran jasa lingkungan dimana sumber daya tersebut berada. Acuan dari sisi teknis lingkungan dan instrumen ekonomi sangat diperlukan untuk membentuk opini dan sebagai



bahan masukan untuk negosiasi, secara filosofis terdapat pada kaidah *Coase Theorem*.

*Coase Theorem* adalah suatu teori yang dikembangkan oleh Ronald Coase (1995) (dalam Fauzi 2011: 34) yang menyatakan bahwa "mekanisme pasar dengan sendirinya dapat mendorong terjadinya kondisi sosial optimum tanpa mengerahkan berbagai regulasi"; hal ini dapat terjadi berdasarkan pada konsep *property right* karena pada dasarnya lingkungan merupakan bagian dari sumberdaya yang bersifat *common property* yang berarti kepemilikan, pengambilan dan pemanfaatannya merupakan milik bersama, sehingga antara penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat sumberdaya (*user*) sama-sama memiliki hak untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut. Menurut Fauzi (2006: 14) dalam melakukan penetapan nilai besaran kompensasi yang diberikan pengguna kepada penyedia jasa lingkungan dalam ekonomi lingkungan menunjukkan bahwa nilai keuntungan yang diperolehnya tidak mempunyai nilai pasar (*non marketable*) langsung.

Dalam enam tahun terakhir, inisiatif pengembangan mekanisme pembayaran jasa lingkungan di Indonesia secara sistematis telah dikembangkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional dan internasional, seperti: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), WWF (*the World Wildlife Fund*), RUPES (*Rewarding Upland Poor for Environmental Service They Provide*) - ICRAF (*the World Agroforestry Center*).

Pada saat ini pembayaran dan imbal jasa lingkungan di Indonesia masih bersifat lokal dengan kasus-kasus yang spesifik lokasi dengan tingkat pelaksanaan yang berbeda, sehingga diperlukan adanya advokasi kebijakan yang diangkat dari pengalaman-pengalaman tingkat lokal tersebut, sehingga peran Pemerintah sangatlah penting dalam proses selanjutnya sebagai suatu kebijakan nasional dengan tidak mematikan inisiatif lokal, karena ada beberapa diantaranya telah terdapat regulasi yang dapat dijadikan dasar hukum sebagai referensi. Namun sebelum membuat regulasi, pemerintah perlu mempertimbangkan, misalnya perlu adanya pemahaman yang memadai atas pembayaran dan skema imbal jasa lingkungan baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat, mencermati peraturan-peraturan perundangan yang terkait dengan regulasi dimaksud karena kemungkinan tumpang tindih peraturan harus dihindarkan, dan regulasi yang fleksibel di tingkat nasional, regional, daerah dan spesifik di tingkat lokal menjadi kesepakatan bersama.

Berdasarkan pada review atas pelaksanaan program jasa lingkungan di Indonesia pada bulan Mei 2005 (Fauzi 2011: 52), kontribusi sektor swasta terhadap kegiatan pelestarian sumberdaya air belum maksimal karena disebabkan besarnya beban perusahaan untuk mengeluarkan biaya sosial baik resmi maupun tidak. Selain itu karena belum adanya peraturan perundangan yang dapat menekan atau memberi insentif kepada perusahaan untuk lebih aktif dalam menggunakan pembayaran jasa lingkungan sebagai bagian dari kebijakan atau strategi keberlanjutan usahanya. Banyak perusahaan yang menggunakan sumberdaya air sebagai bahan baku



beranggapan bahwa pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintah. Termasuk memandang kemiskinan masyarakat di wilayah hulu bukan merupakan kewajiban perusahaan untuk memikirkan dan membantu penyelesaiannya.

Mengenai pembayaran jasa lingkungan diketahui bahwa diperlukan ruang bagi semua pihak untuk menggali dan berbagi pengalaman serta saling mempelajari. Hal ini berkenaan dengan upaya mengidentifikasi apa saja bentuk kebijakan yang bersifat insentif dan dis-insentif dalam rangka peningkatan pelibatan sektor swasta untuk menerapkan transaksi Imbal Jasa Lingkungan (IJL) dalam kerangka pelestarian kawasan DAS. Dalam sambutannya ketika secara resmi membuka lokakarya “Strategi Pengembangan Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan di Indonesia,” (Fauzi 2005: 5) menyatakan bahwa isu mengenai pembayaran jasa lingkungan di Indonesia sudah cukup lama dikenal, walaupun dalam bahasa yang berbeda misalnya pada zaman Kementerian Lingkungan Hidup di bawah kepemimpinan Emil Salim pada tahun 1980-an, dengan istilah perlunya pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan ekosistem (*ecosystem approach*). Dikemukakannya bahwa saat ini sudah banyak terjadi peralihan pemanfaatan lahan kawasan hutan dan bahkan lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan industri. Ini terkait dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang tidak terkendali. Dengan demikian, sebagai bagian upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan maka pengembangan fungsi penyediaan produksi dan jasa

lingkungannya diharapkan untuk searah dengan perwujudan *Millennium Development Goals* (MDGs).

Dalam sektor kehutanan, agar manfaat hutan dapat tetap dimanfaatkan dan terjaga bagi kepentingan generasi selanjutnya, maka diperlukan pergeseran paradigma dalam pembangunan kehutanan. Saat ini seringkali hutan hanya dipandang dari sisi fungsi produksi kayu saja, yang menurut penelitian hanya sebesar 7% dari seluruh hasil hutan. Padahal hasil produksi hutan non-kayu mempunyai potensi sangat besar tetapi sampai saat ini belum optimal pemanfaatannya. Disebutkan oleh Riyadi (2005) (dalam Fauzi 2005: 4) bahwa apa yang dilakukan terkait dengan pembayaran dan imbal jasa lingkungan di negara ini masih bersifat parsial. Diperlukan advokasi yang mengarah pada pengembangan kebijakan yang dapat dijadikan acuan bersama. Lebih lanjut diutarakannya, berdasarkan kriteria dan indikator pengelolaan hutan yang berkelanjutan (*sustainable forest management*), ada beberapa aspek yang dapat dikembangkan terkait dengan pengembangan mekanisme pembayaran jasa lingkungan, berupa: aspek pemanfaatan keanekaragaman hayati, hasil hutan non kayu, ekoturisme, dan sumberdaya air. Berbagai inovasi teknis mekanisme pembayaran jasa lingkungan terkait dengan keempat aspek tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kelembagaan dan hukum kebijakan pembayaran jasa lingkungan di Indonesia. Hingga saat ini kerangka kebijakan dan regulasi yang ada di Indonesia belum dapat mengakomodasikan bentuk pendanaan yang bersumber dari imbal jasa lingkungan. Mengingat keterbatasan sumber dana konvensional, maka mekanisme pembiayaan pembangunan dan



investasi yang bersifat hijau ini dapat menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan nasional. Namun pemikiran ini masih sangat awal dan memerlukan pembahasan lebih detail, tetapi Bappenas sudah mulai mengajukan pemikiran untuk memanfaatkan sumber-sumber pendanaan alternatif (walaupun jumlahnya masih tidak signifikan).

Imbal jasa lingkungan juga perlu dipikirkan terkait dengan isu desentralisasi. Suatu kebijakan yang dibuat untuk keperluan kita secara nasional perlu memperhatikan kondisi-kondisi lokal. Kerjasama antar sektor dan antar pusat dan daerah harus terus dikembangkan dan menjadi modal kita bersama. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Bab 32 tentang Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam (program perlindungan dan konservasi sumber daya alam) dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup terdapat kegiatan perumusan mekanisme pendanaan kegiatan perlindungan terhadap konservasi sumberdaya alam dan penyediaan prasarana bagi sumberdaya air serta mekanisme kompensasi dan imbal jasa lingkungan dalam bentuk pengembangan imbal jasa lingkungan dapat dijadikan payung hukum bagi pelaksanaan imbal jasa lingkungan di Indonesia.

Jasa lingkungan pada hakikatnya merupakan manfaat yang paling banyak yang diberikan kawasan konservasi bagi lingkungan sekitarnya, termasuk manusia. Jasa lingkungan yang dimaksud adalah fungsi ekologis dari kawasan konservasi, yakni fungsi hidrologi, penyerap CO<sub>2</sub>, pengatur iklim dan pencegah erosi. Fungsi ekologis ini secara tidak langsung akan

berpengaruh kepada sektor ekonomi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan lain-lain. Menurut Milller (1999: 35) kawasan lindung dapat menjadi sumber bahan baku kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, sarana wisata, menjadi identitas budaya dan spiritual, serta memberikan jasa ekologi bagi lingkungan di sekitarnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa jasa lingkungan merupakan *intangible benefit* yang diterima dari suatu kawasan konservasi. Jasa lingkungan ini merupakan subsidi dari kawasan konservasi yang sering diabaikan dan sering tidak dihitung nilainya dalam bentuk uang, selain dikarenakan dianggap sebagai sumberdaya tak terbatas Oksigen misalnya. Jasa lingkungan juga merupakan sumberdaya abstrak yang tidak dapat dirasakan dalam wujud yang nyata atau dalam bentuk barang. Padahal jasa lingkungan pada hakikatnya memiliki nilai yang tinggi (mahal), terutama fungsi-fungsi ekologisnya yang tak tergantikan di alam. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya fungsi hidroorologis dan penyerap karbon dan produsen oksigen (stabilitas iklim).

Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki fungsi untuk menyimpan air dan mengalirkannya dari daerah hulu ke hilir. DAS yang sehat akan mengalirkan air dengan kuantitas dan kualitas yang optimal bagi penggunaannya. Pandangan umum menyatakan bahwa alihguna lahan hutan menjadi lahan pertanian di wilayah hulu DAS akan menurunkan fungsi DAS sehingga memicu terjadinya bencana hidrologi seperti banjir dan tanah longsor. Pengelolaan DAS bertujuan untuk mengembalikan fungsi DAS seringkali hanya dihubungkan dengan upaya pemulihan tingkat penutupan lahan melalui kegiatan penanaman pohon. Namun demikian, masih terdapat



ketidak jelasan pada hubungan sebab akibat apakah permasalahan DAS akan dapat diatasi hanya dengan penanaman pohon semata (Van Noordwijk 2004 dalam Rachman Pasha 2010: 1). Di samping itu kegiatan pengelolaan DAS masih belum banyak melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan, seringkali mengakibatkan kegiatan ini hanya bersifat sementara (Bruijnzeel, 2004 dalam Rachman Pasha 2010: 1). Pendekatan baru dalam kegiatan pengelolaan DAS harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan DAS. Salah satu pendekatan inovatif dalam pengelolaan DAS adalah melalui skema pembayaran jasa lingkungan (*payment for environmental services*) dan imbal jasa lingkungan (*rewards for environmental services*) (Van Noordwijk, 2005; Van Noordwijk and Leimona, 2010 dalam Rachman Pasha 2010: 1).

Dalam skema imbal jasa lingkungan, petani terutama yang tinggal di hulu suatu DAS, dipandang sebagai pengambil keputusan penggunaan lahan dan berkontribusi sebagai penyedia jasa lingkungan (*environmental service providers*). Melalui keputusan merekalah, DAS dapat berfungsi secara baik dan menghasilkan jasa lingkungan hidrologis DAS, seperti kualitas dan kuantitas air yang baik dan sehat atau sebaliknya. Di lain pihak, masyarakat luas yang menggunakan air dipandang sebagai pemanfaat jasa lingkungan (*environmental service beneficiaries*). Kebijakan ekonomi lingkungan berbasis pasar mendasari konsep imbal jasa lingkungan (IJL) Landell-Mills and Porras, 2002 dalam Rachman Pasha 2010: 2). Pendekatan ini berprinsip bahwa siapa yang menyediakan jasa lingkungan harus diberi insentif atau imbalan terhadap usaha mereka tersebut dan siapa yang memanfaatkan jasa

lingkungan harus berkontribusi terhadap pemberian insentif tersebut. Berdasarkan prinsip tersebut, maka terjadilah yang dinamakan transaksi sukarela jasa lingkungan, dimana penyedia jasa lingkungan melalui praktek penggunaan lahan ramah lingkungan mendapatkan insentif dari peminfaat jasa lingkungan, jika dan hanya jika penyedia jasa lingkungan dapat menjamin stok dan aliran jasa lingkungan secara terus menerus (merupakan persyaratan atau *kondisionalitas - conditionality*) (Pagiola and Platais, 2002: 2). Skema Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai instrumen berbasis pasar pada mulanya didisain sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi konservasi. Skema IJL dengan efisiensi tinggi mengharuskan tingkat kondisionalitas yang ketat mengenai stok dan suplai jasa lingkungan dengan mengutamakan kepentingan konservasi. Hal ini mengesampingkan isu pengentasan kemiskinan karena diasumsikan dapat menurunkan efisiensi dari skema IJL (Rachman Pasha 2010: 2). Pelaksanaan skema ini di Asia, tentunya memerlukan beberapa adaptasi dan inovasi mengingat keunikan ekosistem dan kondisi sosioekonomi masyarakat di benua ini (Tomich et.al., 2004; Neef and Thomas, 2009; Van Noordwijk and Leimona, 2010 dalam Rachman Pasha 2010: 2). Sebagai contoh, skema IJL sebagai instrumen berbasis pasar mensyaratkan kejelasan kepemilikan dan hak atas lahan sebagai entitas privat. Namun, kondisi tersebut tidak dimungkinkan di Asia, terutama di Indonesia, dimana terdapat ketidakjelasan status lahan dan kepemilikan secara kolektif (Contreras-Hermosilla and Fay, 2005 dalam Rachman Pasha 2010: 2). Selain itu, pengabaian terhadap isu pengentasan kemiskinan pada titik waktu tertentu akan menurunkan efisiensi dari skema



IJL karena eratnya hubungan antara kemiskinan dan konservasi di negara-negara berkembang (Leimona et.al., 2009; Muradian et.al., 2010 dalam Rachman Pasha 2010: 2). *World Agroforestry Centre* melalui proyek RUPES (*Rewarding Upland Poor for Environmental Services They Provide*) melakukan riset aksi untuk menganalisis skema PJI yang menjembatani tujuan konservasi dan pengentasan kemiskinan (Van Noordwijk., 2004 dalam Rachman Pasha 2010: 2). Oleh karena itu, RUPES memakai istilah Imbal Jasa Lingkungan (*Rewards for Environmental Services*). Hal ini bertujuan secara eksplisit menyatakan bahwa skema tersebut tidak berfokus pada efisiensi transaksi atau Pembayaran Jasa Lingkungan (*Payment for Environmental Services*) semata.

Pengelolaan jasa lingkungan dapat dipandang sebagai suatu ekosistem yang di dalamnya terdapat interaksi antara komponen penyusunnya yaitu komponen penyedia jasa (produsen atau *supplier*), lembaga ekonomi dan sumberdaya manusia sebagai pengelola (*management*) dan pengguna atau pemanfaat atas barang dan jasa lingkungan sebagai konsumen (*demand*). Untuk itu maka diperlukan adanya rumusan masalah tentang pembayaran atau kompensasi langsung oleh para pengguna jasa-jasa air di wilayah hilir kepada para penyedia di wilayah hulu. Keadaan demikian dapat didekati dengan cara pendekatan ekonomi lingkungan untuk mengetahui kesediaan masyarakat hulu menerima pembayaran atas jasa lingkungan, dengan kesediaan untuk menerima atau *Willingness to Accept* atau WTA (Fauzi 2011: 18).

### 3. Perilaku Sadar Lingkungan

*Green living* sering diartikan sebagai hidup sadar lingkungan. Namun kadang atau seringkali meloncat terlalu jauh, Green sekarang yang dipahami orang melewati proses itu Seperti prematur, padahal esensinya seringkali terlewati. Hidup ramah lingkungan hadir saat kita memahami peran kita di rumah, dan di lingkungan. Penghematan energi pun tak memerlukan teknologi tinggi untuk melakukannya, yang penting kepedulian akan diri, keluarga, lingkungan dan masyarakat secara umum. Sadar lingkungan adalah keadaan dimana individu masyarakat menyadari bahwa pentingnya sebuah ruang lingkup (lingkungan) yang di dalamnya, terdapat makhluk-makhluk hidup yang harus dijaga kelestariannya.

Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau genetika. Krech dan Crutchfield (1954) (dalam Chrispina 2011: 1) yang mengatakan: *As we have already indicated, attitudes lie behind many of the significant and dramatic instances of man behavior. It is for reason that many psychologists regard the study of attitudes as the central problems of social psychology.*

Bimo Walgito (2003) (dalam Chrispina 2011: 1) berpendapat bahwa sikap yang ada pada seseorang akan memberikan warna atau corak pada perilaku atau perbuatan orang yang bersangkutan. Sementara sikap pada umumnya mengandung tiga komponen yang membentuk struktur sikap, yaitu: komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif.



Mery dan Tryst (Soesilo, 1989) (dalam Farizh 2013: 1) melihat bahwa hubungan antar manusia dengan lingkungannya merupakan suatu jalinan *transactional interdependency* atau terjadinya ketergantungan satu sama lain. Hal ini hampir sama dengan pendapat Guilford, yaitu bahwa manusia mempengaruhi lingkungannya. Untuk selanjutnya lingkungan akan mempengaruhi manusia, demikian pula terjadi sebaliknya. Manusia dan lingkungan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, keduanya sama-sama memberikan sumbangsih. Manusia membutuhkan lingkungan untuk hidup dan berperilaku, sedangkan tanpa manusia lingkungan tidak akan pernah ada. Lingkungan adalah pemberi stimulus terbesar dalam kehidupan manusia. Lingkunganlah yang mengajarkan individu untuk merespon dan melakukan sesuatu.

Menurut Soekidjo (2006: 133) yang dimaksud perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh perilaku luar. Para ahli mengatakan bahwa perilaku sama dengan tindakan atau aktivitas yang dilakukan individu sebagai akibat adanya stimulus atau rangsang. Hal ini sesuai dengan pendapat Skinner yang dikutip oleh Soekidjo (2006: 133) yang menyatakan bahwa perilaku merupakan reaksi seseorang terhadap stimulus dari luar.

## B. Landasan Empiris

Marwa (2010: 1) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi jasa lingkungan yang ada di Suaka Marga Satwa Muara Angke dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk, faktor penyebab menurunnya jasa lingkungan di dua tempat penelitian tersebut dan memberikan ide-ide solutif sebagai alternatif penyelesaian masalah jasa lingkungan yang ada di dua tempat tersebut.

Jasa lingkungan merupakan manfaat dari kawasan konservasi yang tergolong dalam *intangibile benefits*. Suaka Marga Satwa Muara Angke dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk merupakan kawasan konservasi yang ada di DKI Jakarta yang juga memberikan jasa lingkungan kepada masyarakat di DKI Jakarta dan sekitarnya. Jasa lingkungan tersebut berupa pengatur hidroorologis, penyumbang O<sub>2</sub> dan penyerap CO<sub>2</sub> (stabilitas iklim), jasa penyedia keanekaragaman hayati, dan jasa keindahan bentang alam untuk ekowisata. Namun jasa lingkungan tersebut terus mengalami penurunan, penyebab penurunan ini di antaranya sampah, limbah industri dan domestik, konversi lahan mangrove, dan polusi udara. Untuk memecahkan permasalahan ini, rekomendasi yang diberikan berupa *action approach* dan program *and policy approach*.

Jasa lingkungan atau jasa ekologi Suaka Marga Satwa Muara Angke dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk tidak berbeda jauh dengan jasa lingkungan kawasan konservasi dan kawasan lindung pada umumnya, terutaman kawasan konservasi yang berhutan, yakni sebagai pengatur hidroorologis, penyumbang O<sub>2</sub> dan penyerap CO<sub>2</sub> (stabilitas iklim), jasa penyedia keanekaragaman hayati, dan jasa keindahan bentang alam untuk ekowisata. Namun, secara khusus tulisan ini membahas masalah Suaka Marga Satwa Muara Angke dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk sebagai pengatur hidrorologis dan stabilitas iklim.



Stanley (2005: 1) melakukan penelitian yang bertujuan untuk meneliti Sikap-sikap dan Kesadaran Orang Bajo Terhadap Lingkungan Hidup dan Konservasi. Kasus Study: Kampung Sampela, Taman Nasional Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Sikap-sikap orang Bajo terhadap lingkungan rupanya didukung secara kuat dalam masyarakat Bajo. Sekali lagi pendekatan langsung dipakai dulu dan orang ditanya seketika itu pendapatnya tentang konsep keberlanjutan, atau 'melestarikan untuk anak cucu'. Setiap responden menjawab bahwa mereka setuju konsep keberlanjutan penting sekali. Semua orang mengakui kepentingan ide itu untuk masa depan dan untuk kebutuhan makanan dan pencaharian generasi-generasi baru dan anak cucunya.

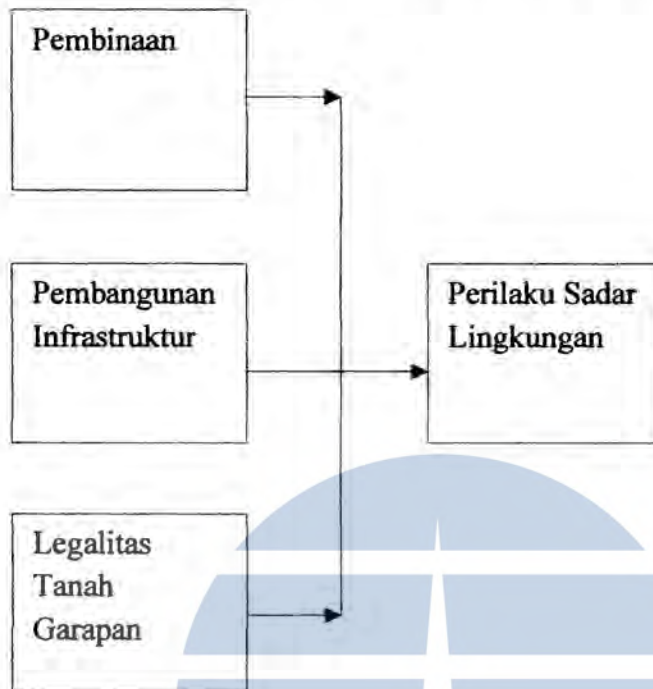
Mawardi (2010: 2) melakukan penelitian yang bertujuan untuk Menganalisis Kesiediaan Masyarakat Menerima Imbalan Jasa Lingkungan Dalam Pengelolaan Air Minum di DAS cisadane Hulu.

1. Menganalisis nilai kesiediaan masyarakat menerima pembayaran (WTA) atas jasa lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Melakukan sintesa kebijakan sebagai implikasi penelitian dalam kesiediaan masyarakat menerima pembayaran jasa lingkungan dalam pengelolaan air minum di DAS Cisadane Hulu.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Berikut ini dapat digambarkan kerangka pemikiran yang dijadikan dasar pemikiran dalam penelitian ini. Kerangka tersebut merupakan dasar pemikiran dalam melakukan analisis pada penelitian ini.

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran Teoritis**



#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada landasan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H1 : Diduga Imbal Jasa Lingkungan dalam bentuk pembinaan memberi pengaruh terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat tersebut.
2. H2 : Diduga Imbal Jasa Lingkungan dalam bentuk pembangunan infrastruktur memberi pengaruh terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat tersebut.
3. H3 : Diduga Imbal Lingkungan dalam bentuk legalitas tanah garapan memberi pengaruh terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat tersebut.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian survey ini menggunakan tipe penelitian penjelasan (*explanatory research*) yang akan membuktikan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa.

#### B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok atau kumpulan individu-individu yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 1999: 72). Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat yang tinggal di Daerah Aliran Sungai Mendalam yang berstatus sebagai warga Desa Sambus Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Populasi adalah kelompok atau kumpulan individu-individu atau obyek penelitian yang memiliki standar-standar tertentu dari ciri-ciri yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana jumlah populasi yang ada pada Desa Sambus Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 768 orang. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi (Singarimbun 1995: 53). Dengan sebagian dari populasi, kita mengharapkan bahwa hasil yang diperoleh akan dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. Menurut Sugiono

(1999: 73) Pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dari jumlah populasi yang ada sebanyak 768 orang jika ditarik sampel minimal 5% pada penelitian ini, maka sampel yang diambil sebanyak 40 orang sudah terwakili untuk populasi daerah penelitian tersebut, dengan karakteristik responden yang sudah bekerja atau dewasa dengan jumlah Kepala Keluarga 220, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel yang disengaja. Dimana *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2004: 68). Sedangkan menurut Marzuki (2002: 52), *purposive sampling* adalah pengambilan sampel dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel tersebut representatif atau mewakili.

Dimana posisi responden yang diambil merupakan penerima imbal jasa lingkungan.

### C. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah yang menjadi obyek pengamatan penelitian atau merupakan faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti,

#### 1. Klasifikasi Variabel

Berdasarkan teori-teori yang membahas masalah tersebut maka dalam penelitian ini penulis menetapkan variabel independen adalah imbal jasa lingkungan di kawasan Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu (X), sedangkan variabel dependen adalah perilaku sadar lingkungan (Y),



## 2. Definisi Konseptual

- a. Imbal Jasa Lingkungan yaitu suatu bentuk imbalan atas jasa lingkungan dari kawasan tersebut bisa berbentuk pembinaan, pembangunan infrastruktur baik perkebunan, pertanian serta hak-hak atas tanah yang dikelolanya.
- b. Perilaku sadar lingkungan adalah keadaan dimana individu masyarakat dalam perilaku atau perbuatan kesehariannya menyadari bahwa pentingnya sebuah ruang lingkup (lingkungan) yang di dalamnya, terdapat makhluk-makhluk hidup yang harus dijaga kelestariannya.

**Tabel 3.1**  
**Kisi-kisi Instrumen**

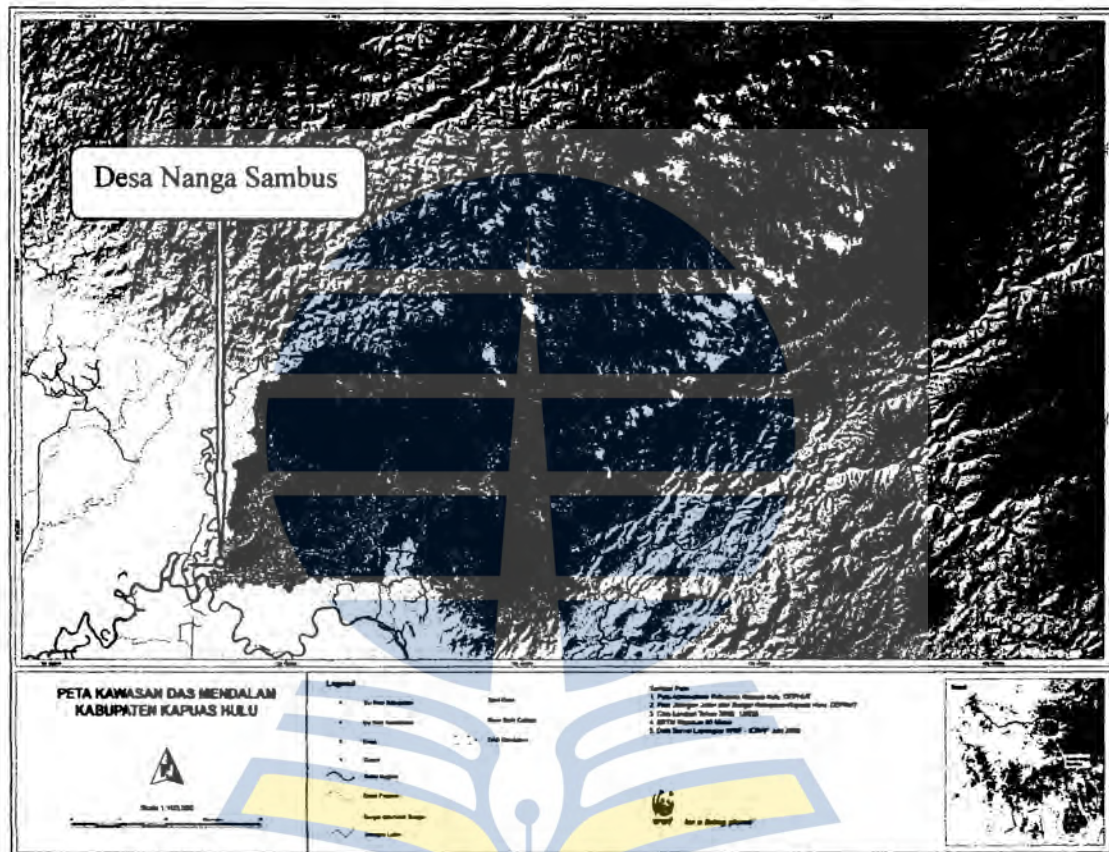
No	Variabel	Indikator
1.	Perilaku sadar lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memelihara dan menjaga alam dari kerusakan.</li> <li>- Memelihara saluran pembuangan air</li> <li>- Tidak melakukan penebangan hutan</li> </ul>
2.	Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan</li> <li>- Pendidikan</li> </ul>
3.	Pembangunan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan</li> </ul>
4.	Legalitas Tanah garapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan bedengan bibit karet</li> <li>- Penanaman bibit unggul</li> <li>- Bangunan jalan desa</li> <li>- Pengakuan tanah peninggalan leluhur</li> <li>- Hak pakai tanah Negara</li> <li>- Proses <i>enclave</i> tanah masyarakat</li> </ul>

## D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten

Kapuas Hulu berada di ujung Timur Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah  $\pm 29.842 \text{ Km}^2$  (2.984.200 Ha). Secara geografis Kabupaten Kapuas Hulu terletak antara 0,5 Lintang Utara -1.4 Lintang Selatan dan di antara 111.40 Bujur Barat - 114.10 Bujur Timur.

**Gambar 3.1**



**Lokasi Penelitian**

### **E. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari responden, di mana responden akan memberikan respon lisan atau respon tertulis sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diberikan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui pengisian kuesioner yang diberikan kepada responden berkaitan dengan imbal jasa lingkungan yang mereka terima dari pihak pemberi imbal jasa lingkungan.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Dalam penelitian ini, data sekunder hanya mendukung pengumpulan data awal penelitian.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

### 1. Kuesioner

Metode ini dilakukan secara langsung dengan responden, dimana kuesioner ini merupakan seperangkat pertanyaan yang disusun untuk diajukan dengan maksud untuk memperoleh informasi tertulis dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan tidak terstruktur atau bebas.

### 2. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang berhubungan dengan gambaran umum obyek yang diteliti untuk mempelajari atau mengutip arsip-arsip dan catatan-catatan yang ada pada obyek yang diteliti jawaban atas daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden dibuat dengan menggunakan skala likert. Teknik membuat skala, menurut (Nazir, 1999: 71) adalah cara mengubah fakta-fakta kualitatif yang melekat pada objek atau subjek penelitian (*attribute*) menjadi urutan kuantitatif. Pembuatan skala pengukuran ini dibuat dengan mendasarkan pada dua

asumsi: 1. Ilmu pengetahuan pada akhir-akhir ini lebih cenderung menggunakan prinsip-prinsip matematika; 2. Ilmu pengetahuan semakin menuntut presisi yang lebih baik utamanya dalam hal mengukur gradasi, misalnya sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju; atau dalam urutan angka seperti contohnya, 1, 2, 3, 4.

Dalam membuat skala, peneliti perlu mengasumsikan bahwa dalam fakta mengandung suatu kontinum yang nyata yang berasal dari sifat-sifat subjek atau objek yang diteliti.

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert yang digunakan dengan interval penilaian untuk setiap jawaban responden adalah 1 sampai 4, dalam hal ini penulis tidak menggunakan pilihan untuk kategori netral atau ragu-ragu dengan maksud supaya responden dapat menentukan pilihannya secara pasti.

**Tabel 3.2**  
**Skor Skala Likert**

1	2	3	4
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju

### **G. Pengujian Validitas dan Reabilitas Data**

Untuk mendapatkan sebuah instrumen penelitian yang baik atau memenuhi standar, minimal ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

#### **1. Validitas (Sahib)**

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang sah atau valid, berarti memiliki validitas tinggi, demikian pula sebaliknya. Sebuah instrumen dikatakan sah, apabila



mampu mengukur apa yang diinginkan atau mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Validitas sebuah instrumen dapat diketahui dengan melakukan pengujian secara eksternal (validitas eksternal), ataupun pengujian secara internal (validitas internal).

a. Validitas Eksternal (Empiris)

Validitas eksternal instrumen dicapai apabila data yang dihasilkan dari instrumen tersebut sesuai dengan data atau informasi lain, yang mengenai variabel penelitian yang dimaksud. Validitas eksternal ini, dikembangkan atau disusun dari fakta empiris yang telah terbukti.

b. Validitas Internal (Rasional)

Validitas internal instrumen dicapai, apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Dengan kata lain, sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas internal apabila setiap bagian instrumen mendukung misi instrumen secara keseluruhan, yaitu mengungkap data dari variabel yang dimaksud.

Pengukuran validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode validitas faktor. Sebuah instrumen memiliki validitas tinggi, apabila faktor-faktor yang merupakan bagian dari instrumen tersebut tidak menyimpang dari fungsi instrumen. Validitas faktor dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor faktor dengan skor total, sesudah terlebih dahulu mengetahui kekhususan tiap faktor. Kekhususan faktor ditentukan dengan mengkorelasikan faktor 1 dengan faktor 2, faktor 1 dan faktor 3 dan seterusnya.

Prosedur kerjanya adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan jumlah tiap skor faktor dan jumlah skor total dimana jumlah skor faktor dipandang sebagai X dan jumlah skor total dipandang sebagai Y.
- b. Menentukan indeks validitas setiap faktor dengan mengkorelasikan skor setiap faktor (X) dengan skor total (Y). Rumus korelasi yang digunakan adalah rumus koefisien Korelasi Pearson.
- c. Syarat minimum untuk dianggap suatu faktor instrumen valid adalah nilai indeks validitasnya positif dan  $\geq 0,3$ .

Adapun Rumus Koefisien Korelasi Pearson's adalah sebagai berikut:

$$C = x^2 / (x^2 + N)$$

Keterangan:

C = Koefisien Kontingensi

$x^2$  = Kai Kuadrat

N = Jumlah Data

## 2. Reliabilitas (Keandalan, Dapat Dipercaya)

Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan sebuah instrumen. Jadi, reliabilitas menunjukkan apakah instrumen tersebut secara konsisten memberikan hasil ukuran yang sama tentang sesuatu yang diukur pada waktu yang berlainan.

Reliabilitasnya suatu instrumen diketahui dengan melakukan pengujian secara eksternal ataupun secara internal.

### a. Reliabilitas Eksternal

Reliabilitas Eksternal adalah reliabilitas dimana ukuran kriterianya berada diluar instrumen. Reliabilitas Eksternal dimaksudkan bahwa instrumen dicobakan beberapa kali pada sejumlah sampel yang sama



pada waktu yang berlainan dan kemudian membandingkan hasilnya sehingga dapat diketahui hasilnya itu apakah tetap konsisten atau tidak.

#### b. Reliabilitas Internal

Reliabilitas internal adalah reliabilitas dimana ukuran atau kriterianya berada dalam instrumen tersebut. Reliabilitas internal dimaksudkan bahwa pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir instrumen yang ada.

Pengukuran reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode tes ulang (*test-retest* atau *single test double trial*) yaitu teknik pengukuran reliabilitas instrumen dengan mencobakan instrumen tersebut beberapa kali pada responden. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan berikutnya. Bila koefisien korelasinya positif dan signifikan, maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel.

### H. Analisis Data

#### 1. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian ini dengan menggunakan analisis inferensial (*kuantitatif*). Dimana dalam analisis tersebut dengan menggunakan program SPSS. Analisis data dengan menggunakan Metode Regresi Linear Berganda, tetapi sebelum melakukan analisis regresi linear berganda digunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heterokesdesitas dan uji glesjer.

##### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, dependen variabel dan independent variabel keduanya

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali 2006: 91). Mendeteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal P-Plot. Adapun pengambilan keputusan berdasarkan kepada:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Kolmogorov Smirnov

Menurut Ghozali (2006: 98) Uji Kolmogorov Smirnov adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika



signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal.

#### c. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2006: 92) salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatter plot* antara lain prediksi variabel terikat (ZPREID) dengan residualnya (SRESID). Jika ada titik pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### d. Uji Glesjer

Menurut Ghozali (2006: 93) heteroskedastisitas dengan Uji Glesjer bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 2. Analisis Deskriptif

Menurut Nazir (2005: 54), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Taylor (2004: 32) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang ke dua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesis menjadi: Analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.

## 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Dari uraian tersebut di atas dapatlah kita menarik garis bawah analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan, biografi, artikel dan



sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sudah meninggalkan lapangan. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan penerahan tenaga, pikiran peneliti. Selain menganalisis data. Peneliti juga perlu dan masih perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi teori atau untuk menjastifikasikan adanya teori baru yang barangkali ditemukan. Beberapa teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. *Editing*

*Editing* meneliti kembali data yang telah diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat diproses lebih lanjut atau tidak. Jika masih terdapat kekeliruan atau kekurangan data, maka dapat segera dilakukan pembetulan pada bagian yang diperlukan untuk memperoleh penjelasan.

b. *Coding*

*Coding* yaitu teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data secara sistematis dengan cara memberi kode atau simbol tertentu pada masing-masing jawaban yang diperoleh.

### c. *Tabulating*

Tabulating yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memindahkan data dari daftar pertanyaan ke dalam tabel. Setelah data ditabulasi, maka tahap berikutnya adalah menganalisa data itu sendiri.

Analisis regresi berganda adalah analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas, jadi analisis regresi linear berganda ini akan digunakan untuk mengetahui pengaruh imbal jasa lingkungan yang terdiri dari, pembinaan, pembangunan infrastruktur, legalitas tanah garapan, terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu.

Penganalisaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model persamaan regresi berganda:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + e$$

Keterangan:

$\alpha$  = Konstan

$X_1$  = Pembinaan

$X_2$  = Pembangunan Infrastruktur

$X_3$  = Legalitas Tanah Garapan

$\alpha_1$  = Koefisien regresi

$e$  = Kesalahan dalam persamaan atau gangguan

Untuk mempermudah perhitungan dan analisis, maka digunakan paket pengolahan data statistik berupa Program SPSS 20.0 for Windows.



## 1. Pengujian Hipotesis

Penggunaan hipotesis adalah sebagai pedoman untuk mengukur dan menentukan nilai atau jawaban yang diperoleh dari responden melalui daftar pertanyaan yang dibagikan, yang nantinya digunakan untuk data dalam pengukuran hipotesis. Pengujian hipotesis pada dasarnya untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya dan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel serta besarnya pengaruh antar variabel tersebut.

Hipotesis adalah pernyataan tentatif (sementara) tentang solusi dari suatu masalah (Singh, 2006: 63). Hipotesis adalah “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” (Sugiyono, 2009: 64). Hipotesis adalah “jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik” (Sugiyono, 2009: 64). Hipotesis statistik adalah “pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian (statistik).” (Sugiyono, 2009: 160).

### 1. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Untuk menguji signifikansi hubungan variabel independen dengan variabel dependen secara simultan, maka digunakan uji F. Apabila  $H_0$  diterima, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai hubungan signifikan dengan variabel dependen dan sebaliknya apabila  $H_0$  ditolak, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai hubungan signifikan dengan variabel dependen. Dalam memudahkan dan

mempercepat proses pengolahan data, penulis menggunakan komputerisasi dengan program *software* statistik (SPSS) 20.0.

## 2. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Pengujian t Test dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara individu ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hubungan variabel independen secara parsial dengan variabel dependen, akan diuji dengan Uji t (menguji signifikansi korelasi *product moment*) dengan membandingkan t Tabel dengan t Hitung.

## 3. Pengujian Determinasi

Uji  $R^2$  atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila koefisien determinasi sama dengan 1 artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila koefisien determinasi sama dengan 1, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh koefisien determinasi yang mempunyai nilai antara nol dan satu.



## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui distribusi sebaran karakteristik yang melekat pada responden. Di dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner untuk mengetahui tanggapan responden lingkungan masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu. Penyebaran kuesioner dilakukan terhadap 40 orang responden yang menjadi sampel penelitian.

Untuk mendapat gambaran tentang responden, berikut adalah karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin dan usia:

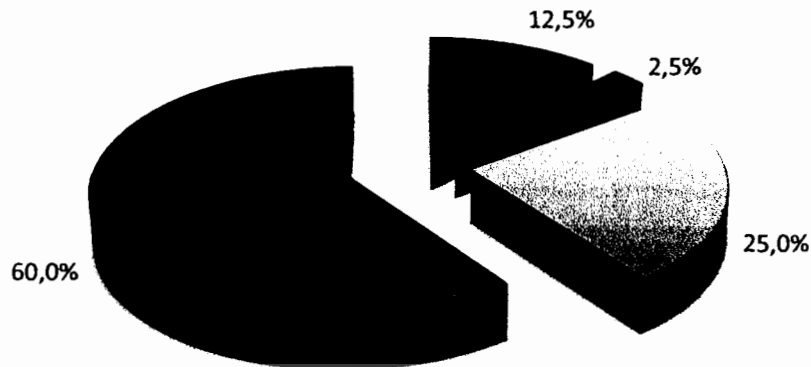
##### 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase</b>
SD	24	60%
SMP	10	25%
SMA	5	12,50%
D3	1	2,50%

*Sumber: Data Olahan, 2013*

**Gambar 4.1**

### **Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat dari 40 orang responden diperoleh frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu SD atau sederajat sebanyak 24 orang dengan presentase 60%, frekuensi responden yang tingkat pendidikannya SMP sebanyak 10 orang dengan presentase 25%, frekuensi responden yang tingkat pendidikannya SMA sebanyak 5 orang dengan presentase 12,50%, frekuensi responden yang tingkat pendidikannya D3 sebanyak 1 orang dengan presentase 2,50%.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di lingkungan masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu memiliki latar belakang pendidikan dengan mayoritas SD tetapi untuk jenjang pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi juga sudah mulai nampak.

### **2. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin**

Dilihat dari jenis kelamin, jumlah responden laki-laki dan perempuan yang berjumlah 40 orang terbagi menjadi 62,5% responden (25 orang)



berjenis kelamin laki-laki dan 37,5% responden (15 orang) berjenis kelamin perempuan. Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1.	Laki-laki	25	62,5%
2.	Perempuan	15	37,5%
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100,0%</b>

*Sumber: Data Olahan, 2013*

**Gambar 4.2**



### **Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Dari hasil responden berdasarkan jenis kelamin, yang paling banyak di lingkungan masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu adalah berjenis kelamin laki-laki. Ini dikarenakan laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap keluarga pada kehidupan di lingkungannya.

### **3. Karakteristik Berdasarkan Usia Responden**

Sebagian responden berusia kurang dari 25 tahun sebanyak 32.5% responden atau 13 responden, sebanyak responden 23 atau 57.5% responden yang berusia antara 25 sampai 35 tahun. Selanjutnya sebanyak 4 atau 10%

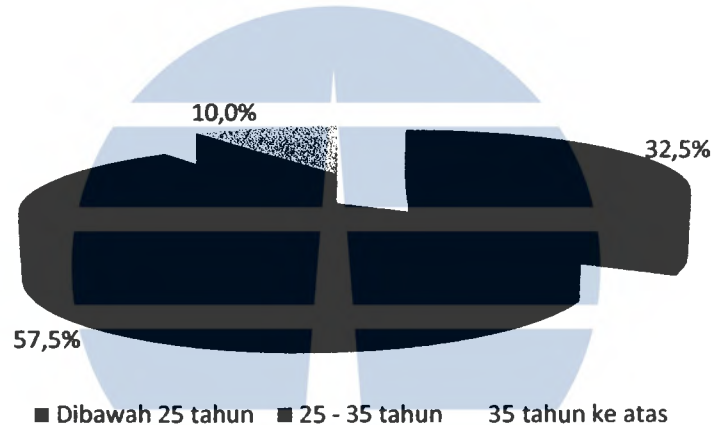
responden berusia di atas 35 tahun. Komposisi responden berdasarkan usia, dapat dilihat dalam tabel karakteristik usia responden berikut:

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah Responden	Persentase
1	Di bawah 25 tahun	13	32,50%
2	25 - 35 tahun	23	57,50%
3	35 tahun ke atas	4	10,00%
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Data Olahan, 2013

**Gambar 4.3**



**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Dari hasil responden berdasarkan usia, yang paling banyak responden adalah yang berusia antara 25 sampai 35 tahun. Karena pada rentang usia tersebut merupakan usia produktif seseorang perlu untuk bekerja dan berkarya sekaligus untuk mendapatkan pendapatan guna kelangsungan hidup yang layak dan peduli terhadap lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri



maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun - 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Jadi batas usia antara 25 tahun sampai dengan 35 tahun merupakan usia produktif tenaga kerja.

## **B. Pengujian dan Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup menganalisis pengaruh imbal jasa lingkungan terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu, variabel independen atau bebas pada adalah pembinaan ( $X_1$ ), sedangkan untuk notasi ( $X_2$ ) adalah pembangunan infrastruktur, kemudian legalitas tanah garapan dengan notasi ( $X_3$ ) serta variabel endogen atau terikat adalah perilaku sadar lingkungan yang dinotasikan dengan ( $Y$ ). Analisis yang dilakukan dengan mengaplikasikan teknik statistik untuk mengolah data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebar. Model statistik yang dipakai untuk menyatakan hubungan kausal antar variabel dengan regresi linear berganda. Bagian akhir pembahasan ini adalah statistik yang dimaksudkan untuk menentukan persamaan regresi berganda, model pengujian yang dilanjutkan dengan uji F, dan uji T, serta uji asumsi klasik serta penentuan koefisien determinasi.

## 1. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas dengan menggunakan Software SPSS Versi 20.0 penulis lakukan untuk meneliti tingkat kevalidasian dari kusioner yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan cara mengkorelasi setiap skor variabel jawaban responden dengan total masing masing skor jawaban responden dan total masing masing skor dari variabel. Menurut Sugiono (2004:137) “Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan, instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.” Dengan demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur maka tampak hasil *output* pada uji validitas Variabel Y, sedangkan hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada uji reliabilitas. Pada penelitian ini responden yang diambil untuk uji validitas dan reliabilitas sebanyak 20 orang responden. Hasil perhitungan validitas dapat dilihat pada tabel berikut:





**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Validitas Instrumen**

No	Kuesioner	Corrected Item-Total Correlation	Ket.
<b>I Perilaku Sadar Lingkungan Masyarakat (Y)</b>			
1.	Pentingnya memelihara dan menjaga alam dari kerusakan adalah salah satu perbuatan dalam menciptakan kehidupan yang terus berlanjut sampai ke anak cucu.	0,461	Valid
2.	Memelihara saluran pembuangan air sangatlah penting agar air bisa lancar waktu hujan turun.	0,806	Valid
3.	Kebiasaan orang tua terdahulu untuk memperluas tanah garapan untuk berladang dengan menebang hutan, sementara tanah bekas ladang dibiarkan karena dianggap kurang subur, tapi menurut kami pendapat itu kurang tepat, maka kami tidak melakukan itu lagi.	0,649	Valid
<b>II Pembinaan (X1)</b>			
4.	Penyuluhan dan pelatihan tentang pertanian menetap sangat kami perlukan supaya kami bisa melaksanakan di kehidupan lingkungan kami.	0,750	Valid
5.	Pelatihan membuat stek tanaman karet unggul sangat membantu kami untuk pemenuhan kebutuhan karet jenis unggul yang kami perlukan.	0,611	Valid
6.	Pendidikan tentang lingkungan hidup yang diadakan di sekolah desa kami mengajar anak-anak kami tentang pentingnya memelihara lingkungan hidup.	0,876	Valid
7.	Penyuluhan tentang pertanian perkebunan membantu kami dalam mengambil sikap untuk bekerja yang lebih terarah.	0,905	Valid
8.	Pelatihan pemeliharaan ikan dalam keramba sangat berguna bagi kami dalam pembudidayaan ikan, yang mana ikan makin hari makin berkurang.	0,905	Valid
9.	Menggunakan lahan untuk berkebun dan menanam padi sangatlah mudah kalau tinggal tanam tidak perlu menebang hutan lagi.	0,560	Valid
<b>III. Pembangunan Infrastruktur (X2)</b>			
10.	Adanya pembangunan infrastruktur pertanian menetap berupa pencetakan sawah memudahkan kami dalam bertani, dimana kami tak perlu lagi membuka lahan baru tiap tahunnya.	0,900	Valid
11.	Menetapkan model pemeliharaan tanah dari pengikisan oleh air dengan cara membuat sengkedan akan membuat tanah tidak mudah terbawa hanyut air hujan.	0,914	Valid
12.	Pembuatan saluran irigasi sangat membantu kami dalam pengairan lahan pertanian dan kebutuhan air lainnya.	0,860	Valid
13.	Dengan dibuatnya bedengan bibit karet, kami tidak sulit lagi mencari bibit-bibit karet yang kami perlukan untuk ditanam di lahan kami.	0,914	Valid
14.	Berkebun dengan menanam bibit unggul akan menghasilkan pendapatan yang memuaskan keluarga.	0,914	Valid
15.	Jalan desa yang dibangun adalah transportasi darat yang sangat menguntungkan kami dari transportasi terdahulu yang berupa transportasi air yang cukup memakan waktu tempuh.	0,736	Valid
<b>IV Legalitas Tanah Garapan (X3)</b>			
16.	Supaya kami leluasa mengelola lahan kami tanpa rasa takut diambil alih pemerintah maka kami mengharapkan pengurus desa untuk bisa mengabdikan pensertifikatan tanah garapan kami.	0,949	Valid
17.	Kami perlu adanya pengakuan tentang tanah peninggalan leluhur kami agar kami bisa menggarap tanah tersebut tanpa rasa takut diusir oleh pemerintah.	0,947	Valid
18.	Tanah garapan kami berdekatan dengan tanah hutan negara, untuk keamanan hak tanah kami maka perlu adanya tanda-tanda batas yang jelas.	0,953	Valid

19.	Pengelolaan bersama tanah negara antar pemerintah dan masyarakat desa yang mempunyai hak pakai sangat menguntungkan bagi pelestarian dan ekonomi masyarakat.	0,947	Valid
20.	Selain tanah garapan kami, tanah adat desa kami pun perlu pensertifikatan oleh Badan Pertanahan Nasional.	0,947	Valid
21.	Apabila dalam tata batas hutan yang dilakukan pemerintah ada tanah kami yang masuk ke tanah hutan pemerintah maka kami minta untuk di <i>enclave</i> -kan saja.	0,966	Valid

Sumber: Data Olahan, 2013

Menurut Sugiyono (2000: 106) Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau  $r = 0,3$ ." Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Jadi jika nilai validitas setiap pertanyaan lebih dari 0,30 maka butir pertanyaan dianggap sudah valid. Hasil pengujian validitas yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 20.0 yang dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation terhadap variabel Perilaku Sadar Lingkungan Masyarakat (Y), Pembinaan ( $X_1$ ), Pembangunan Infrastruktur ( $X_2$ ), Legalitas Tanah Garapan ( $X_3$ ) ternyata seluruhnya di atas 0,30. Dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

## 2. Uji Reliabilitas Instrumen

Setelah melakukan uji validitas langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk menguji reliabilitas perhatikan tabel *reliability statistic* pada data yang telah valid. Suatu data dikatakan *reliable* bila nilai **Cronbach's Alpha > 0,60**.



**Tabel 4.5**  
**Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen**

Variabel	Reliability Coeficients Alpha	Keterangan
Perilaku Sadar Lingkungan (Y)	0,915	Reliabel
Pembinaan (X <sub>1</sub> )	0,960	Reliabel
Pembangunan Infrastruktur (X <sub>2</sub> )	0,780	Reliabel
Legalitas Tanah garapan (X <sub>3</sub> )	0,857	Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2013

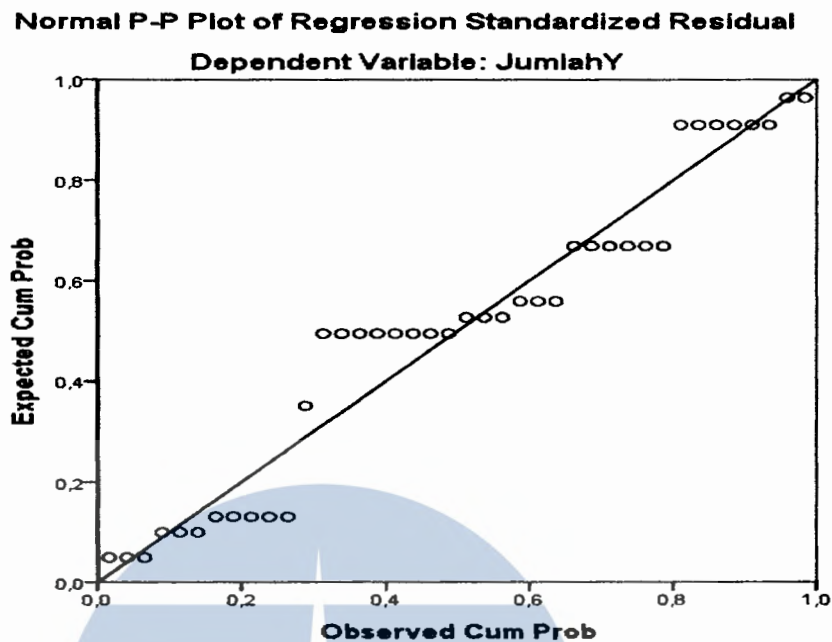
Pedoman dari Sugiyono (2000:109), pemberian interpretasi terhadap reliabilitas ( $r_1$ ) pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut: 1) Reliabilitas ( $r_1$ ) uji coba sama dengan atau lebih dari 0,60 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas tinggi; 2) Reliabilitas ( $r_1$ ) uji coba kurang dari 0,60 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas kurang (*un-reliable*). Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa terhadap variabel Perilaku Sadar Lingkungan Masyarakat (Y), Pembinaan (X<sub>1</sub>), Pembangunan Infrastruktur (X<sub>2</sub>), Legalitas Tanah Garapan (X<sub>3</sub>) ternyata seluruhnya di atas 0,60. Dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabilitas.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Untuk melihat hasil uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan Analisis Grafik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS. Data yang normal ditandai dengan adanya sebaran titik-titik data diseperti garis diagonal. Pada gambar ini terdapat dua grafik yaitu, grafik histogram dan grafik normal P-Plot. Kedua grafik ini menunjukkan uji normalitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data telah berdistribusi secara normal atau tidak. Hasil pengujian normalitas data pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.4.

**Gambar 4.4.**  
**Hasil Uji Normalitas**



Sumber: Data Olahan, 2013

Pada grafik yang diperlihatkan di atas dapat disimpulkan bahwa data yang dipergunakan menunjukkan indikasi normal. Hal ini tampak bahwa titik-titik berada pada sekitar garis diagonal dan mengikuti garis tersebut artinya data telah terdistribusi secara normal.

Menurut Singih Santoso (2002: 322) metode yang digunakan adalah pengujian secara visual dengan metode gambar normal *Probability Plots* dalam program SPSS yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Sebagaimana ditunjukkan gambar diatas, maka model regresi pada penelitian ini layak untuk memprediksikan pengaruh variabel Pembinaan, Pembangunan Infrastruktur, dan Legalitas Tanah Garapan di Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu.



b. Uji Kolmogorov Smirnov

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Kolmogorov Smirnov**  
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		JumlahX1	JumlahX2	JumlahX3	JumlahY
N		40	40	40	40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	21,5750	21,0092	21,3500	11,1500
	Std. Deviation	2,19425	2,22232	2,13751	1,09895
	Absolute	,167	,295	,206	,330
Most Extreme Differences	Positive	,148	,196	,163	,220
	Negative	,167	,255	,719	,330
Kolmogorov-Smirnov Z		1,056	1,592	1,302	2,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		,215	,224	,253	,121

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

*Sumber: Data Olahan, 2013*

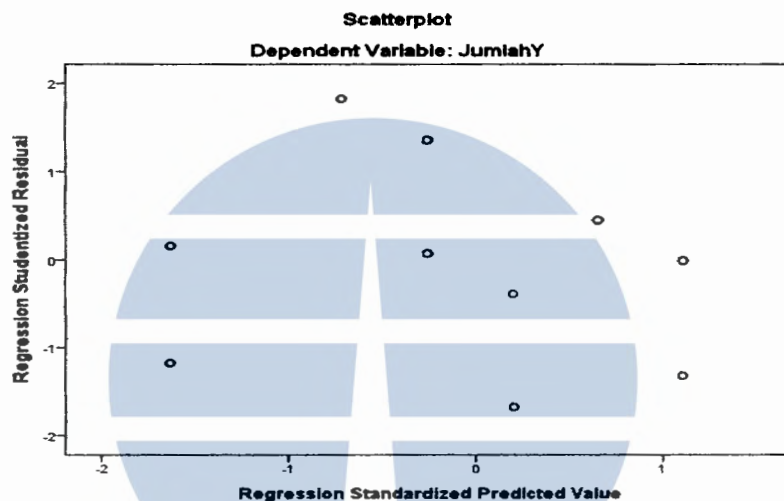
Dapat dilihat hasil pengujian normalitas dengan metode Kolmogoronov-Smirnov, intepretasinya adalah bahwa nilainya Asymp. Sig. (2-tailed) di atas 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Dan pada uji di atas dapat dilihat bahwa nilainya dari  $X_1$  sebesar 0,215,  $X_2$  sebesar 0,224,  $X_3$  sebesar 0,253 dan Y sebesar 0,121 dengan demikian nilai Asymp-nya di atas 0,05 sehingga diinterpretasikan bahwa telah memenuhi asumsi normalitas.

c. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi

adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Metode ini secara visual mempresentasikan sebaran *dependent variable* dalam grafik Scatter Plot dengan mem-plot variabel *Regression Standardized Predicted Value* pada sumbu X dan *Regression Studentized Residual* pada sumbu Y.

**Gambar 4.5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data Olahan, 2013

Sebagaimana pola yang diperlihatkan pada gambar di atas, jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar ke atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada grafik terlihat titik titik tersebar secara tidak beraturan, artinya data telah bebas gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian model regresi pada penelitian ini dianggap layak untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan masukan dari variabel bebas.



#### d. Uji Glesjer

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Glesjer**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,719	,819		2,100	,043
1 JumlahX1	,101	,109	,452	1,754	,376
JumlahX2	,289	,387	,062	,747	,456
JumlahX3	,062	,040	,302	1,549	,130

Dependent Variable: Perilaku sadar Lingkungan ( Y )

Sumber: Data Olahan, 2013

Kesimpulannya: Apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

Dari output di atas, maka tampak bahwa ketiga variabel yaitu: variabel Pembinaan ( $X_1$ ), variabel pembangunan infrastruktur ( $X_2$ ) dan variabel legalitas tanah garapan ( $X_3$ ) tidak ada gejala heteroskedastisitas karena Sig. > 0,05. Tidak terjadinya heteroskedastisitas artinya antara variabel pembinaan pembangunan infrastruktur dan variabel legalitas tanah berpengaruh terhadap perilaku sadar lingkungan.

#### 4. Pengujian Hipotesis

##### a. Analisis Regresi

Semua data telah valid dan reliabel, langkah selanjutnya adalah menentukan mean dan deviasinya, untuk kemudian data diproses dari data ordinal ke bentuk data interval (penulis telah mentransfer data

kebentuk interval), sebagai salah satu syarat untuk pengolahan dengan analisis regresi.

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa variabel-variabel independen seperti Pembinaan ( $X_1$ ), Pembangunan Infrastruktur ( $X_2$ ), Legalitas Tanah Garapan ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap variabel dependen ( $Y$ ) yaitu perilaku sadar lingkungan masyarakat. Model yang digunakan adalah untuk menduga pengaruh tersebut adalah  $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$

**Tabel 4.8**  
**Hasil Perhitungan Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	3.679	2.449	
X1	.232	.129	.164
X2	.421	.060	.784
X3	.532	.088	.632

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan, 2013

Berdasarkan nilai angka-angka yang diperlihatkan Tabel 4.8 diatas maka dapat dijelaskan persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = 3,679 + 0,232X_1 + 0,421X_2 + 0,532X_3$$

Nilai koefisien regresi konstanta sebesar 3,679 yang berarti bahwa Perilaku Sadar Lingkungan Masyarakat di Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu dipengaruhi oleh Pembinaan, Pembangunan Infratruktur dan Legalitas Tanah



Garapan. Sedangkan koefisien regresi semua variabel bebas bertanda positif yang berarti bahwa Perilaku Sadar Lingkungan Masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai hubungan positif dengan Pembinaan, Pembangunan Infrastruktur, Legalitas Tanah Garapan berdampak positif bagi peningkatan Perilaku Sadar terhadap Lingkungan.

b. Uji Simultan (Uji F)

Untuk menguji apakah pengaruh variabel independen Pembinaan ( $X_1$ ) Pembangunan Infrastruktur ( $X_2$ ), Legalitas Tanah Garapan ( $X_3$ ) secara simultan terhadap Perilaku Sadar Lingkungan Masyarakat ( $Y$ ) di wilayah Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu maka digunakan uji Statistik F (uji F). Pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS 20.0. Hasil pengujian selanjutnya dilakukan perbandingan antara nilai F Hitung dengan F Tabel. Jika hasil perbandingan diperoleh nilai F Hitung  $>$  F Tabel. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sebaliknya jika hasil perhitungan menunjukkan nilai F Hitung  $<$  nilai F Tabel, maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak. Hasil uji simultan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Simultan**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23,586	1	23,586	38,117	,000 <sup>b</sup>
	Residual	23,514	38	,619		
	Total	47,100	39			

a. Dependent Variable: JumlahY

b. Predictors: (Constant), JumlahX<sub>1</sub>,X<sub>2</sub>,X<sub>3</sub>

Sumber: Data Olahan, 2013

Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 4.9 di atas bahwa nilai F hitung sebesar 38,117 dengan signifikan 0,000. Sedangkan F Tabel pada tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% atau  $\alpha = 0,05$ .

H<sub>0</sub> : Tidak ada pengaruh antara pembinaan, pembangunan infrastruktur dan legalitas tanah garapan terhadap Perilaku sadar lingkungan masyarakat.

H<sub>a</sub> : Ada pengaruh antara pembinaan, pembangunan infrastruktur dan legalitas tanah garapan terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat.

Hal ini menunjukkan uji F atau uji simultan antar variabel perhatikan nilai sig. Karena sig = 0,000 < 0,05 berarti H<sub>0</sub> ditolak, H<sub>a</sub> diterima. Artinya secara simultan pembinaan, pemberian infrastruktur dan legalitas tanah garapan terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat.

c. Uji Parsial (Uji t)

Uji Statistik t atau Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel pembinaan, pembangunan infrastruktur, legalitas

tanah garapan secara parsial terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengetahui hasil Uji t, maka dilakukan perbandingan antara nilai t Hitung dan nilai t Tabel. Jika diketahui di dalam perbandingan nilai t Hitung > t Tabel, maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, sebaliknya jika t Hitung < t Tabel, maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak.

Hasil pengujian secara parsial (uji t) pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,504	1,245		2,815	,008
1					
JumlahX <sub>1</sub>	,354	,057	,708	6,174	,000
Jumlah X <sub>2</sub>	,444	,112	,118	,683	,005
Jumlah X <sub>3</sub>	,618	,031	,028	,187	,003

a. Dependent Variable: JumlahY

Sumber: Data Olahan, 2013

Berdasarkan nilai t yang diperlihatkan Tabel 4.10 di atas, diketahui nilai t Hitung dari setiap variabel independen dalam penelitian ini. Nilai t Hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai t Tabel dengan menggunakan Tingkat Kepercayaan (*Confidence Interval*) 95% atau  $\alpha=0,05$ . Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat:



$H_0$  : Tidak ada pengaruh antara pembinaan terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat.

$H_1$  : Ada pengaruh antara pembinaan terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa menunjukkan Uji t atau Uji Parsial. Perhatikan nilai sig pada jumlah  $X_1$  sebesar 0,000 karena sig < 0,05 berarti  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima artinya secara parsial pola pembinaan berpengaruh terhadap perilaku sadar lingkungan.

Perhatikan nilai sig pada jumlah  $X_2$  sebesar 0,005 karena sig < 0,05  $H_0$  ditolak, tidak ada pengaruh antara infrastruktur terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat.  $H_2$  diterima: ada pengaruh antara infrastruktur terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat.

Perhatikan nilai sig pada jumlah  $X_3$  sebesar 0,003 karena sig < 0,05  $H_0$  ditolak, tidak ada pengaruh antara legalitas tanah garapan terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat.  $H_3$  diterima artinya ada pengaruh legalitas tanah garapan terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat.

#### d. Uji Determinasi

Uji Determinasi dimaksudkan untuk menentukan kelayakan suatu model regresi. Untuk menentukan nilai determinasi dilakukan dengan bantuan program SPSS 20.0 yang dilihat dari nilai besarnya koefisien determinasi atau  $R^2$ . Besaran nilai koefisien determinasi diperoleh dari hasil pengolahan data model regresi pada penelitian ini. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,708 <sup>a</sup>	,501	,488	,78663

a. Predictors: (Constant), JumlahX1,X2,X3

b. Dependent Variable: JumlahY

Sumber : *Data Olahan 2013*

Hasil uji merupakan koefisien determinasi, dengan Adjust R Square sebesar 0,488. Artinya pola pembinaan, pembangunan infrastruktur dan legalitas tanah garapan berpengaruh terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat sebesar 48,8% sedangkan 51,2% dipengaruhi oleh faktor lain ( $100\% - 48,8\% = 51,2\%$ ).

### **C. Pembahasan hasil Uji dan Analisis Data**

Pada bagian ini akan dibahas hasil penelitian yang memperlihatkan pengaruh imbal jasa lingkungan terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu dengan berbagai teknik analisis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diperoleh dan dilakukan observasi selama penelitian. Data ini diolah menggunakan dua cara yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Data yang dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari lembar observasi atau pengamatan masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan data kuantitatif adalah variabel-variabel yang terkait dengan perilaku sadar lingkungan. Variabel-variabel tersebut antara lain pola pembinaan, pembangunan infrastruktur serta legalitas tanah garapan. Variabel-variabel tersebut dianalisis dengan menggunakan statistik

deskriptif yaitu pengolahan data dengan menunjukkan karakteristik data dalam ukuran nilai angka yang dapat menggambarkan karakteristik data secara jelas. Analisis data yang digunakan adalah pertama menentukan apakah data yang telah diteliti telah validitas maupun reliabilitas, pada penelitian ini data yang telah diteliti telah valid jika nilai validitas setiap pertanyaan lebih dari 0,30 maka butir pertanyaan dianggap sudah valid. Hasil pengujian terhadap variabel Perilaku Sadar Lingkungan Masyarakat (Y), Pembinaan (X1), Pembangunan Infrastruktur (X2), Legalitas Tanah Garapan (X3) ternyata seluruhnya diatas 0,30. Dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Sedangkan untuk reliabilitas dapat dilihat pada penelitian ini bahwa terhadap variabel Perilaku Sadar Lingkungan Masyarakat (Y), Pembinaan (X1), Pembangunan Infrastruktur (X2), Legalitas Tanah Garapan (X3) ternyata seluruhnya diatas 0,60. Dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabilitas. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik melalui Uji Normalitas, Uji Heteroskedasitas dan Uji Glejser dimana semua uji tersebut menyatakan bahwa pembinaan, pembangunan infrastruktur dan legalitas tanah garapan berpengaruh terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat.

Selanjutnya dilakukan analisis regresi linear yang dilakukan melalui beberapa tahap, pertama dilakukan Uji Simultan dimana menunjukkan Uji F atau Uji Simultan antar variabel perhatikan nilai sig. Karena  $\text{sig} = 0,000 < 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima. Artinya secara simultan pembinaan, pembangunan infra struktur dan legalitas tanah garapan terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat. Kemudian selanjutnya Uji t menunjukkan ada



pengaruh pembinaan, pembangunan infrastruktur dan legalitas tanah garapan terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat.

Sedangkan hasil uji yang terakhir adalah uji koefisien determinasi, dengan Adjust R Square sebesar 0,488. Artinya pola pembinaan, pembangunan infrastruktur dan legalitas tanah garapan berpengaruh terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat sebesar 48,8%.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa hipotesis yang diangkat atas dasar teori-teori yang digunakan disebutkan bahwa faktor imbal jasa lingkungan yang meliputi variabel pembinaan, pembangunan infrastruktur dan legalitas tanah garapan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan (nyata) terhadap faktor perilaku sadar lingkungan masyarakat, dalam penelitian ini yaitu perilaku sadar lingkungan masyarakat di Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu.

Jadi jika pembinaan dilakukan dengan baik, dan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara yang benar serta ada kejelasan terhadap legalitas tanah garapan maka masyarakat akan tertarik dan lebih peduli terhadap pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan yang ada, serta dapat merubah pola pikir masyarakat terhadap perilaku sadar terhadap lingkungan. Namun sebaliknya jika tidak dilakukan pembinaan, tidak dibangun infrastruktur yang memadai serta tidak ada kejelasan terhadap legalitas tanah garapan akan cenderung tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Hal itu terjadi karena pembinaan, pembangunan infrastruktur dan legalitas tanah garapan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku sadar lingkungan masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa

Nanga Sibus Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan adanya imbal jasa lingkungan juga dapat dijadikan sebagai dorongan masyarakat untuk melakukan tindakan perilaku sadar terhadap lingkungan.

Dalam penelitian Gouyon (2004:5) membagi imbalan berkaitan dengan jasa lingkungan dalam tiga kategori yaitu:

1. Imbalan berupa pembiayaan langsung seperti pemberian subsidi atas pertukaran suatu tata guna lahan,
2. Imbalan non finansial, misalnya penyediaan infrastruktur, pembinaan dan pelatihan, manfaat atau jasa-jasa lainnya bagi pihak yang menyediakan jasa lingkungan,
3. Akses ke sumber daya atau pasar, seperti pemilikan dan legalitas tanah atau lahan, atau akses pasar yang lebih baik dengan sertifikasi jasa lingkungan atau dengan skema alokasi kontrak publik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa imbal jasa lingkungan dimana variabel pembinaan, variabel pembangunan infrastruktur dan variabel legalitas tanah garapan mempunyai pengaruh terhadap variabel perilaku sadar lingkungan. Hal ini bisa diketahui dari uji yang dilakukan baik secara simultan maupun secara parsial dari tiap variabel yang mempengaruhi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kesesuaian atau kecocokan dengan teori bahwa perilaku sadar lingkungan dapat dipengaruhi oleh faktor pembinaan, pembangunan infrastruktur, dan legalitas tanah garapan.

Secara parsial variabel pembinaan mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) sebesar 0.000 sehingga bila terjadi perubahan pada variabel ini akan

mempengaruhi variabel perilaku sadar lingkungan. Untuk dapat meningkatkan perilaku sadar lingkungan melalui variabel pembinaan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan dan melakukan pembinaan pada masyarakat, memberikan pemahaman, pengarahan dan sosialisasi secara kontiniu atau terus menerus kepada masyarakat yang akhirnya dapat memuaskan masyarakat, sehingga masyarakat lebih paham dan peduli kepada lingkungan Hal-hal diatas merupakan beberapa alternatif yang bisa ditempuh.

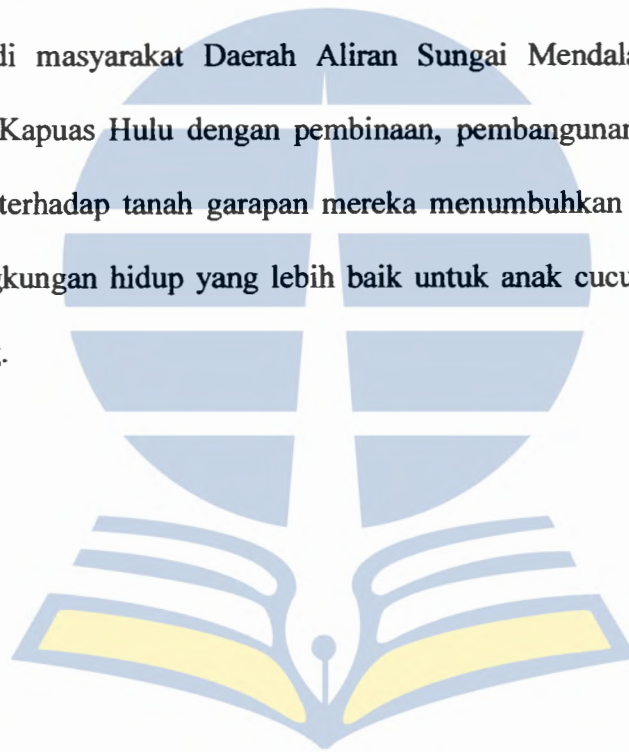
Variabel pembangunan infrastruktur secara parsial juga mempunyai pengaruh yang sinifikan (nyata) sebesar 0.005 sehingga bila terjadi perubahan pada variabel ini akan mempengaruhi variabel perilaku sadar lingkungan. Untuk dapat meningkatkan perilaku sadar lingkungan melalui variabel pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan cara lebih memperhatikan infrastruktur yang diharapkan dapat menunjang untuk peningkatan perilaku sadar lingkungan, saat ini dilakukan maupun dengan melaksanakan terobosan-terobosan baru kaitannya dengan maksud agar masyarakat lebih mengenal cara imbal jasa lingkungan melalui pembangunan infrastruktur dan akhirnya mereka menjadi pelopor terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat.

Variabel legalitas tanah garapan secara parsial juga mempunyai pengaruh yang sinifikan (nyata) sebesar 0.003 sehingga bila terjadi perubahan pada variabel ini akan mempengaruhi variabel perilaku sadar lingkungan. Untuk dapat meningkatkan perilaku sadar lingkungan melalui variabel legalitas tanah garapan dapat dilakukan dengan cara memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang kepemilikan atau legalitas tanah garapannya, karena dengan adanya kejelasan tentang kepemilikan tanah garapan paling tidak



kepedulian masyarakat akan lebih tumbuh terhadap perilaku sadar terhadap lingkungan minimal ditanah garapan mereka dan sekitarnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan kajian sebelumnya dalam penelitian yang bertujuan untuk meneliti sikap-sikap dan kesadaran orang Bajo terhadap lingkungan hidup dan konservasi di Kampung Sampela, Taman Nasional Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Setiap responden berpendapat tentang konsep kehidupan yang keberlanjutan atau melestarikan untuk anak cucu sangat penting sekali. Kajian tersebut sangat mendukung kajian yang dilakukan di masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Sambus Kabupaten Kapuas Hulu dengan pembinaan, pembangunan infrastruktur dan pengakuan terhadap tanah garapan mereka menumbuhkan kesadaran mereka tentang lingkungan hidup yang lebih baik untuk anak cucunya di masa yang akan datang.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Karakteristik Responden

Dari hasil penelitian terhadap 40 responden masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu, ternyata jenis kelamin responden sebagian besar adalah laki-laki dan berusia antara 25 tahun hingga 45 tahun. Dari segi pendidikan sebagian besar (60%) responden adalah pendidikan SD. Adapun usia responden rata-rata sudah berusia dewasa dan pada masa produktif maka kepedulian terhadap perilaku sadar lingkungan dianggap sudah baik.

##### 2. Analisis Pengaruh Imbal Jasa Lingkungan Terhadap Perilaku Sadar

Lingkungan masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara pembinaan, pemberian infrastruktur dan legalitas tanah garapan terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan pola pembinaan, pembangunan infrastruktur dan legalitas tanah garapan mempengaruhi terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat sebesar 4,88% sedangkan 51,2% dipengaruhi oleh faktor lain ( $100\% - 4,88\% = 95,12\%$ ).

3. Dari hasil Uji T atau Uji Parsial dapat dilihat nilai sig pada jumlah  $X_1$  sebesar 0,008 karena  $\text{sig} < 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima artinya secara parsial pola pembinaan berpengaruh terhadap perilaku sadar lingkungan. Nilai sig pada jumlah  $X_2$  sebesar 0,005 karena  $\text{sig} < 0,05$   $H_0$  ditolak, tidak ada pengaruh antara infrastruktur terhadap Perilaku sadar lingkungan masyarakat.  $H_2$  diterima: ada pengaruh antara infrastruktur terhadap Perilaku sadar lingkungan masyarakat. Nilai sig pada jumlah  $X_3$  sebesar 0,003 karena  $\text{sig} < 0,05$   $H_0$  ditolak. Tidak ada pengaruh antara legalitas tanah garapan terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat.  $H_3$  diterima artinya ada pengaruh legalitas tanah garapan terhadap perilaku sadar lingkungan masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya perilaku sadar lingkungan masyarakat di Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu harus lebih diperhatikan pada proses pembinaan dengan cara memberikan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya peduli terhadap lingkungan.
2. Sebaiknya untuk membentuk perilaku sadar lingkungan pembangunan infrastruktur sangat diharapkan untuk menunjang pengaruh jasa lingkungan terhadap sadar lingkungan masyarakat Daerah Aliran Sungai Mendalam Desa Nanga Sambus Kabupaten Kapuas Hulu, seperti penanaman jenis pohon.



3. Sebaiknya legalitas tanah garapan lebih dioptimalkan seperti status tanah yang dikelola untuk lebih diperhatikan dalam hal keabsahan kepemilikan tanah tersebut dari pihak yang terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional untuk membentuk masyarakat yang sadar terhadap lingkungan masyarakat yang dimulai dari tanah garapan masing- masing.



## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, 2003. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Yayasan Mutiara, Jakarta.
- Aunul Fauzi, B Leimona, Muhtadi. 2005. Strategi Pengembangan Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan di Indonesia. Jakarta
- Aunul Fauzi. 2006. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Teori dan Aplikasi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Chrispina 2011 Kajian Hermeneutika Paul Ricoeur Chrispina Blogspot.com.
- Daryanto. Agung Suprihatin 2013. Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup. Gava Media. Yogyakarta.
- Etty Septia Sari. 2012. Menghargai Jasa Lingkungan. Envi News edisi 82. Media informasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Prop. Kalbar.
- Farizh 2013. [http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/peng\\_psikologi\\_lingkungan/bab1-pendahuluan.pdf](http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/peng_psikologi_lingkungan/bab1-pendahuluan.pdf).
- Fauzi Sutopo dan M. Ikhwanuddin Mawardi, 2010. Analisis Kesiediaan Masyarakat Menerima Pembayaran Jasa Lingkungan Dalam pengelolaan Air Minum di DAS Cisadane Hulu. Hidrosfir Indonesia, Jakarta.
- Fauzi Sutopo, 2011. Pengembangan Kebijakan Pembayaran Jasa Lingkungan Dalam Pengelolaan Air Minum, IPB Bogor.
- Gouyon. A, 2004, Imbalan Bagi Masyarakat Miskin Dataran Tinggi Terhadap Jasa Lingkungan, Sebuah Tinjauan Tentang Inisiatif dari Negara-negara Maju. <http://www.worldagroforestrycentre.org/sea/Networks/Rupes>.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- J. Paul Peter and Jerry C. Olson, 2014. Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran. Edisi 9 Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Landell-Mills, N., and I. T. Porras. 2002. *Silver bullet or fool's gold? A global review of markets for forest environmental services and their impact on the poor*. International Institute for Environment and Development, London. Dalam Rahman Pasha 2010 ICRAF Working paper nr 104. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre - ICRAF, SEARegional Office. 32p
- Miller K.R. 1999. Internasional Wilderness Provides Ecological Services for Sustainable Living. International Journal of Wilderness.

- Mawardi, 2010, Analisis Imbalan Jasa Lingkungan Dalam Pengelolaan Air Minum di DAS Cisadane Hulu, Penerbit IPB Press, Bogor.
- Marwa 2010. Analisis Jasa Lingkungan Suaka Marga Satwa Muara Angke dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk Jakarta Utara.
- Marzuki, 2002, *Metodologi Riset*, BPFE UII Yogyakarta.
- Nazir, Muhammad. 1999. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia. Jakarta. <http://www.onlinesyariah.com/2012/12/24/contoh-skala-likert-penelitian/>
- Nazir Muhammad, 2005. Metode Penelitian, Ghalia Bogor, Indonesia.
- Nommy H.T. Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Ciracas, Jakarta.
- Panayotou T, 1994, Economic Instruments for Environmental Management and Sustainable Development, International Environment Program Institute for International Development University, ENEP-EEU.dalam Fauzi 2011 Pengembangan Kebijakan Pembayaran Jasa Lingkungan Dalam Pengelolaan Air Minum, IPB Bogor.
- Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1986, tentang AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).
- Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.
- Pagiola S, Platais G. 2002. Payments for Environmental Services. Environment Strategy, Bogor Indonesia.
- Pascual U, Muradian R, Rodríguez LC, Duraiappah A, 2010. Exploring the Links Between Equity and Efficiency in Payments for Environmental Services: A Conceptual Approach, ICRAF-SEA. Bogor: Indonesia.
- Rachman Pasha, 2010, Konsep Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan di Indonesia, ICRAF Southeast Asia Regional Office Bogor.
- Rosa, H, S. Kandel, dan L. Dimas. 2005. Compensation for Ecosystem Services and Rural Communities: Lessons from The Americas. El Salvador. dalam Fauzi 2011 Pengembangan Kebijakan Pembayaran Jasa Lingkungan Dalam Pengelolaan Air Minum, IPB Bogor.



- Stanley (2005) Studi Kasus: Kampung Sampela, Taman Nasional Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Universitas Muhammadiyah Malang Desember 2005.
- Saifudin Azwar, 2003. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, edisi 2, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Singarimbun, M., dan S. Efendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, PL3ES, Jakarta.
- Sugiyono, 1999. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, 2000. *Statistik Untuk Penelitian* Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, 2004, *Statistika Untuk Penelitian* Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* Alfabeta Bandung.
- Singgih, Santoso, 2002, *Buku Latihan SPSS Untuk Statistik Parametrik*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Santoso Budi, 1999, *Ilmu Lingkungan*. Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Taylor, Geoffrey, Easter Kellie Hegney, 2004, *Lingkungan dan Kesehatan* Elsevier Newyork.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-undang No. 23 Tahun 1997, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang undang RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No. 13 tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 tentang Tenaga Kerja.
- Van Noordwijk M. 2005. Typology of Environmental Service Worthy of Reward. RUPES Working Paper ICRAF-SEA. Bogor: Indonesia.
- Warnardi, 1982. Identifikasi Kondisi Biofisik Lahan dan Upaya Pemeliharaan Fungsi DAS Oleh Masyarakat di DAS Way Lirikan. World Agroforestry Centre ICRAF SEA. Bogor.

## LAMPIRAN

### KUISIONER

#### **ANALISIS PENGARUH IMBAL JASA LINGKUNGAN TERHADAP PRILAKU SADAR LINGKUNGAN MASYARAKAT DAERAH ALIRAN SUNGAI MENDALAM DESA NANGA SAMBUS KABUPATEN KAPUAS HULU**

##### 1. Identitas

Nama : .....  
Jenis Kelamin : ..... umur : .....  
Pekerjaan : ..... pendidikan : .....  
Alamat : .....  
Tanggal : .....

##### 2. Daftar Pertanyaan :

###### Variabel perilaku sadar lingkungan masyarakat (Y)

Pertanyaan
1. Memelihara dan menjaga alam dari kerusakan adalah salah satu perbuatan dalam menciptakan kehidupan yang terus berlanjut sampai ke anak cucu. a. Sangat Tidak Setuju b. Tidak Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
2. Kebiasaan orang tua terdahulu untuk memperluas tanah garapan untuk berladang dengan menebang hutan, sementara tanah bekas ladang dibiarkan karena dianggap kurang subur, tapi menurut kami pendapat itu kurang tepat, maka kami tidak melakukan itu lagi. a. Sangat Tidak Setuju b. Tidak Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
3. Memelihara saluran pembuangan air sangatlah penting agar air bisa lancar waktu hujan turun deras. a. Sangat Tidak Setuju b. Tidak Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju

###### Variabel Pembinaan (X1)

Pertanyaan
4. Ikan di sungai makin hari makin berkurang, maka perlu ada pengaturan panen lestari, pelatihan pembudidayaan ikan dalam keramba sangat berguna bagi kami dalam pemenuhan kebutuhan akan ikan. a. Sangat Tidak Setuju b. Tidak Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju

<p>5. Menggunakan lahan untuk berkebun dan menanam padi sangatlah mudah kalau tinggal tanam tidak perlu menebang hutan lagi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat Tidak Setuju</li><li>Tidak Setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>
<p>6. Pendidikan tentang lingkungan hidup yang diadakan di sekolah di desa kami mengajar anak-anak kami tentang pentingnya memelihara lingkungan hidup.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak Setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>
<p>7. Penyuluhan tentang pertanian dan perkebunan membantu kami dalam mengambil sikap untuk bekerja yang lebih terarah.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak Setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>
<p>8. Penyuluhan dan pelatihan tentang pertanian menetap sangat kami perlukan supaya kami bisa melaksanakan di kehidupan lingkungan kami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak Setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>
<p>9. Pelatihan pembuatan stek tanaman karet unggul sangat membantu kami untuk pemenuhan kebutuhan karet jenis unggul yang kami perlukan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak Setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>

### Variabel Pembangunan Infrastruktur (X2)

Pertanyaan
<p>10. Dengan dibuatnya Bedengan Bibit karet, kami tidak sulit lagi mencari bibit-bibit karet yang kami perlukan untuk ditanam di lahan kami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak Setuju.</li><li>setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>
<p>11. Menerapkan model pemeliharaan tanah dari pengikisan oleh air yaitu dengan cara membuat sengkedan akan membuat tanah tidak mudah terbawa hanyut air hujan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak Setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>



<p>12. Pembuatan saluran irigasi sangat membantu kami dalam pengairan lahan pertanian dan kebutuhan air lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak Setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>
<p>13. Adanya pembangunan infrastruktur pertanian menetap berupa pencetakan sawah memudahkan kami dalam bertani, dimana kami tak perlu lagi membuka lahan baru tiap tahunnya.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak Setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>
<p>14. Berkebun dengan menanam bibit unggul akan menghasilkan pendapatan yang memuaskan keluarga.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak Setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>
<p>15. Jalan desa yang dibangun adalah prasarana transportasi darat yang sangat menguntungkan kami dari transportasi terdahulu yang berupa transportasi air yang cukup memakan waktu tempuh.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak Setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>

### Variabel legalitas tanah garapan (X3)

Pertanyaan
<p>16. Supaya kami leluasa mengelola lahan kami tanpa rasa takut diambil alih pemerintah maka kami mengharapkan pengurus desa untuk bisa mengabdikan pensertifikatan tanah garapan kami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak Setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>
<p>17. Apabila dalam tata batas hutan yang dilakukan pemerintah ada tanah kami yang masuk ke tanah hutan pemerintah maka kami minta untuk di <i>Enclavekan</i> saja.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak Setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>
<p>18. Tanah garapan kami berdekatan dengan tanah hutan negara, untuk keamanan hak tanah kami maka perlu adanya tanda-tanda batas yang jelas.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak Setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>

- |   |
|---|
| <p>19. Pengelolaan bersama Tanah negara antar pemerintah dan masyarakat desa yang mempunyai hak pakai sangat menguntungkan bagi pelestarian dan ekonomi masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak Setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol> |
| <p>20. Selain tanah garapan kami, tanah adat desa kamipun perlu penserifikatan oleh Badan Pertanahan Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak Setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>  |
| <p>21. Kami perlu adanya pengakuan tentang tanah peninggalan leluhur kami agar kami bisa menggarap tanah tersebut tanpa rasa takut diusir oleh pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sangat tidak setuju</li><li>Tidak Setuju</li><li>Setuju</li><li>Sangat setuju</li></ol>          |

Untuk mempermudah dalam kegiatan rekapitulasi Kuesioner dari responden maka penulis mengkonversi dari abjad ke angka.

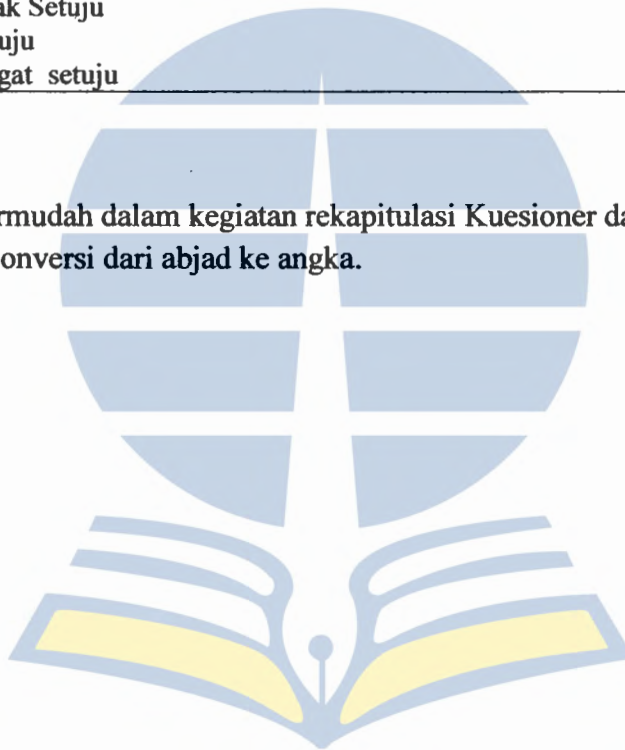
Keterangan :

a = 1.00

b = 2.00

c = 3.00

d = 4.00



## Rekapitulasi Kuesioner untuk Validitas dan Reabilitas

Variabel Sadar Lingkungan (Y)

Item Jawaban Kuesioner			
Res	1	2	3
R1	3.00	3.00	3.00
R2	4.00	4.00	4.00
R3	4.00	4.00	4.00
R4	4.00	4.00	4.00
R5	4.00	4.00	4.00
R6	4.00	4.00	4.00
R7	4.00	4.00	4.00
R8	4.00	4.00	4.00
R9	4.00	4.00	4.00
R10	3.00	4.00	4.00
R11	3.00	3.00	3.00
R12	3.00	4.00	4.00
R13	3.00	3.00	3.00
R14	3.00	3.00	3.00
R15	3.00	3.00	3.00
R16	4.00	3.00	3.00
R17	4.00	3.00	3.00
R18	3.00	3.00	4.00
R19	3.00	3.00	4.00
R20	3.00	4.00	4.00



## Variabel Pembinaan (X1)

Res	Item Jawaban Kuesioner					
	4	5	6	7	8	9
R1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
R5	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R6	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
R7	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
R8	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
R9	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R10	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R11	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R12	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
R13	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R14	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R15	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R16	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R17	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R18	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R19	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R20	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

## Variabel Pembangunan Infrastruktur (X2)

Res	Item Jawaban Kuesioner					
	10	11	12	13	14	15
R1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R5	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R6	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R7	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00
R8	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R9	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R10	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R11	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00
R12	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R13	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00
R14	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R15	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R16	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
R17	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R18	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R19	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R20	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

## Variabel Legalitas Tanah Garapan (X3)

Res	Item Jawaban Kuesioner					
	16	17	18	19	20	21
R1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R4	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00
R5	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
R6	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R7	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R8	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R9	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R10	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R11	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R12	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00
R13	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R14	3.00	4.00	2.00	4.00	3.00	4.00
R15	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00
R16	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00
R17	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00
R18	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00
R19	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
R20	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00



## Rekapitulasi Kuesioner untuk Analisis Regresi

Variabel Sadar Lingkungan (Y)

Item Jawaban Kuesioner				Item Jawaban Kuesioner			
Res	1	2	3	Res	1	2	3
R1	3.00	3.00	4.00	R21	3.00	3.00	4.00
R2	3.00	3.00	4.00	R22	4.00	4.00	3.00
R3	3.00	4.00	4.00	R23	3.00	3.00	4.00
R4	3.00	3.00	4.00	R24	3.00	3.00	4.00
R5	3.00	3.00	4.00	R25	3.00	3.00	4.00
R6	3.00	3.00	4.00	R26	3.00	3.00	4.00
R7	4.00	2.00	4.00	R27	4.00	4.00	3.00
R8	3.00	3.00	4.00	R28	3.00	3.00	3.00
R9	4.00	4.00	3.00	R29	3.00	3.00	3.00
R10	4.00	2.00	4.00	R30	3.00	3.00	4.00
R11	4.00	3.00	3.00	R31	3.00	3.00	4.00
R12	3.00	4.00	4.00	R32	4.00	4.00	4.00
R13	3.00	3.00	4.00	R33	3.00	3.00	4.00
R14	3.00	3.00	4.00	R34	3.00	4.00	4.00
R15	3.00	3.00	4.00	R35	4.00	4.00	4.00
R16	3.00	4.00	3.00	R36	4.00	4.00	3.00
R17	3.00	3.00	4.00	R37	3.00	3.00	4.00
R18	3.00	3.00	4.00	R38	3.00	4.00	4.00
R19	3.00	3.00	4.00	R39	4.00	4.00	4.00
R20	3.00	3.00	3.00	R40	3.00	3.00	4.00

## Variabel Pembinaan (X1)

Res	Item Jawaban Kuesioner					
	4	5	6	7	8	9
R1	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
R3	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R5	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
R6	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R7	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R8	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R9	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
R10	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R11	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
R12	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
R13	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R14	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R15	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
R16	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R17	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R18	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R19	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R20	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R21	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
R22	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00

R23	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R24	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R25	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R26	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R27	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00
R28	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R29	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00
R30	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R31	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00
R32	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R33	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R34	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
R35	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R36	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R37	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R38	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R39	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R40	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00



## Variabel Pembangunan Infrastruktur (X2)

Res	Item Jawaban Kuesioner					
	10	11	12	13	14	15
R1	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R2	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
R3	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R4	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
R5	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R6	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R7	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R8	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R9	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R10	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R11	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R12	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R13	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R14	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R15	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
R16	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R17	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R18	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R19	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
R20	3.00	4.00	3.00	4.00	2.00	4.00
R21	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R22	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00

R23	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R24	4.00	3.00	4.00	2.00	4.00	3.00
R25	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
R26	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
R27	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R28	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
R29	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
R30	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
R31	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R32	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R33	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00
R34	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00
R35	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R36	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R37	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R38	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R39	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R40	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

## Variabel Legalitas Tanah Garapan (X3)

Res	Item Jawaban Kuesioner					
	16	17	18	19	20	21
R1	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R2	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R3	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R5	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R6	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R7	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	3.00
R8	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R9	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R10	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R11	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R12	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00
R13	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R14	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R15	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R16	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R17	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00
R18	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R19	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R20	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R21	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R22	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00



R23	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R24	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R25	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00
R26	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00
R27	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R28	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R29	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R30	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
R31	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R32	4.00	1.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R33	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00
R34	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R35	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R36	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00
R37	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
R38	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R39	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
R40	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00

## HASIL UJI VALIDITAS

### Hasil Uji Validitas Y

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan 1	7,2000	,905	,461	,895
Pertanyaan 2	7,1500	,661	,806	,478
Pertanyaan 3	7,0500	,787	,649	,669



### Uji validitas X1

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan 4	17,8500	4,555	,750	,903
Pertanyaan 5	17,7500	5,145	,611	,919
Pertanyaan 6	17,7000	4,642	,876	,883
Pertanyaan 7	17,6000	4,674	,905	,880
Pertanyaan 8	17,6000	4,674	,905	,880
Pertanyaan 9	17,7500	5,250	,560	,926

### Uji validitas X2

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan 10	18,0000	5,158	,900	,949
Pertanyaan 11	18,1000	5,042	,914	,947
Pertanyaan 12	17,9500	5,313	,860	,953
Pertanyaan 13	18,1000	5,042	,914	,947
Pertanyaan 14	18,1000	5,042	,914	,947
Pertanyaan 15	18,0000	5,474	,736	,966

### Hasil Uji validitas X3

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan 16	18,1500	4,239	,473	,864
Pertanyaan 17	18,0000	3,789	,773	,811
Pertanyaan 18	18,1000	3,568	,686	,828
Pertanyaan 19	17,9500	3,734	,852	,798
Pertanyaan 20	18,1000	4,516	,335	,887
Pertanyaan 21	17,9500	3,734	,852	,798



## HASIL UJI RELIABILITAS

### Hasil Realibilitas Y

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,915	6

### Hasil Realibilitas X1

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,960	6

### Hasil reabilitas X2

Cronbach's Alpha	N of Items
,780	3

### Hasil reabilitas X3

Cronbach's Alpha	N of Items
,857	6

## HASIL REGRESI

### Hasil Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	3.679	2.449	
	X1	.232	.129	.164
	X2	.421	.060	.784
	X3	.532	.088	.632

a. Dependent Variable: Y

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	JumlahX1		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter $\leq$ ,050, Probability-of-F-to-remove $\geq$ ,100).

a. Dependent Variable: JumlahY

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,708 <sup>a</sup>	,501	,488	,78663

a. Predictors: (Constant), JumlahX1

b. Dependent Variable: JumlahY

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	23,586	1	23,586	38,117	,000 <sup>b</sup>
1 Residual	23,514	38	,619		
Total	47,100	39			

a. Dependent Variable: Jumlah Y

b. Predictors: (Constant), JumlahX1

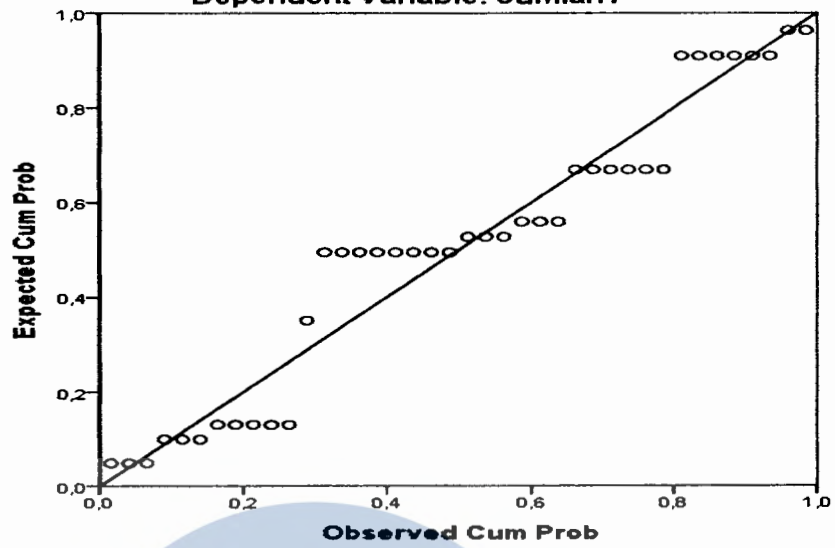
 Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,504	1,245		2,815	,008
1 JumlahX1	,354	,057	,708	6,174	,000
Jumlah X2	,444	,112	,118	,683	,005
Jumlah X3	,618	,031	,028	,187	,003

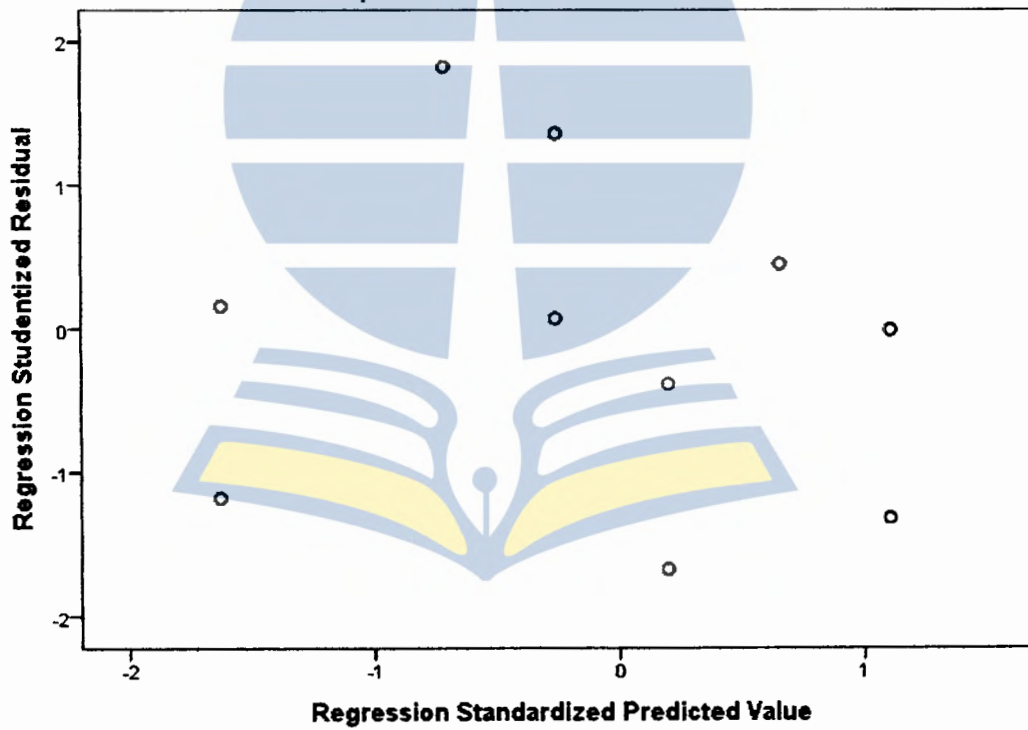
a. Dependent Variable: JumlahY



**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**  
**Dependent Variable: JumlahY**



**Scatterplot**  
**Dependent Variable: JumlahY**



**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,719	,819		2,100	,043
JumlahX1	,101	,058	,452	1,754	,088
JumlahX2	,013	,047	,062	,269	,789
JumlahX3	,062	,040	,302	1,549	,130

- Dependent Variable: Perilaku sadar lingkungan masyarakat (Y)

Sumber : Data Olahan 2013



## LAMPIRAN

**PERJANJIAN KERJASAMA  
KEGIATAN KONSERVASI SUNGAI SUB-DAS MENDALAM  
DI WILAYAH ADMINISTRATIF DESA NANGA SAMBUS  
ANTARA  
YAYASAN WWF-INDONESIA DAN PEMERINTAH DESA NANGA SAMBUS**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. **YAYASAN WWF INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Komyos Sudarso No 97 Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, diwakili oleh M. Hermayani Putera, Jabatan Manajer Program Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan WWF Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- b. **PEMERINTAH DESA NANGA SAMBUS**, berkedudukan di Desa Nanga Sambus Kecamatan Putussibau Utara kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, di wakili oleh Zainal A.M Jabatan Kepala Desa Nanga Sambus dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Nanga Sambus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan kepentingan Kedua belah pihak menerangkan bahwa :

1. Bahwa hasil studi hidrologi yang dilakukan oleh Tim Ahli dari ICRAF, WWF dan CARE diketahui tutupan lahan di Sub DAS Mendalam hanya 40% .
2. Bahwa Desa Nanga Sambus dengan letak geografis NO 52.095 E112 57.103 berada di aliran Sub DAS Mendalam.
3. Bahwa berdasarkan hasil studi di beberapa lokasi di Sub DAS Mendalam longsor tebing sungai bisa mencapai 3 m, dengan kedalaman vertikal sekitar 1 – 2,5 m yang disebabkan berkurangnya tutupan hutan sehingga sedimentasi, erosi, dan berkurangnya debit sungai menjadi semakin meningkat.
4. Bahwa hasil dari pengukuran tingkat kekeruhan di Sub DAS Mendalam rata-rata nilai pada musim panas adalah 6,1 FTU dan musim hujan adalah 16,58 FTU. Berdasarkan standar baku air minum yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, mutu air tersebut melebihi batas standar ( diatas 5 FTU ), berarti air tersebut harus melewati pengolahan agar dapat digunakan sebagai air minum.

Maka kedua belah pihak telah bermufakat untuk membuat kesepakatan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dilakukan untuk :

1. Mengurangi erosi yang terjadi di Sub DAS Mendalam terutama di sempadan sungai di wilayah administratif Pemerintah Desa Nanga Sambus;
2. Mengurangi sedimentasi Sungai Mendalam khususnya di wilayah administratif Pemerintah Desa Nanga Sambus;
3. Monitoring kualitas dan kuantitas air sungai khususnya di wilayah administratif Pemerintah Desa Nanga Sambus;



## PASAL 2

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah kerjasama konservasi sungai Sub-DAS Mendalam dilakukan di wilayah administratif Desa Nanga Sambus;
2. Kerjasama kegiatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dilakukan secara bertahap perkegiatan atau secara bersamaan dilakukan baik sebagian atau seluruhnya dengan alokasi waktu yang disepakati selanjutnya diluar kesepakatan kerjasama ini;
3. Kedua belah pihak saling menghargai peranan dan tanggung jawab masing-masing dengan atau dibantu oleh Pihak Ketiga;
4. Perubahan kesepakatan akan dilakukan apabila diperlukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

## PASAL 3

### KEGIATAN KONSERVASI SUNGAI SUB-DAS MENDALAM

Kegiatan konservasi sungai di Sub-DAS Mendalam dimaksud, meliputi :

1. Penanaman atau restorasi sempadan sungai;
2. Pengayaan tanaman di tembawang;
3. Monitoring atau pengamatan kualitas dan kuantitas air sungai;

## PASAL 4

### PENANAMAN SEMPADAN SUNGAI DAN TEMBANG

1. Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penanaman adalah :
  - a. Persemaian dan pembibitan;
  - b. Persiapan Lahan;
  - c. Penanaman;
  - d. Perawatan;
2. Lahan dan bibit yang disepakati untuk di tanam di sempadan sungai, adalah :
  - a. Ada 46 pemilik lahan yang teridentifikasi dan bersedia untuk mengikuti kegiatan penanaman sempadan sungai;
  - b. Bibit karet unggul 26.400 polybag, bibit coklat 1.200 polybag dan bibit tengkawang 4.600 polybag;
  - c. Harga bibit karet unggul per polybag Rp. 4.500,-, coklat Rp.2500,- per polybag dan tengkawang Rp.3000,- per polybag;

## PASAL 5

### MONITORING ATAU PENGAMATAN KUALITAS DAN KUANTITAS AIR SUNGAI

Monitoring atau pengamatan kualitas dan kuantitas air sungai akan dilakukan dengan metode tertentu yang dipilih oleh **PIHAK PERTAMA** dan akan diolokasikan kepada masyarakat yang secara teknis kerjasama kegiatannya akan diatur selanjutnya diluar kesepakatan ini.

## PASAL 6 PEMBIAYAAN

1. Sesuai dengan rancangan anggaran yang disepakati kedua belah pihak, keterlibatan masyarakat dan tata waktu kegiatan, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengalokasikan dana sebesar Rp.273.600.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk kegiatan restorasi sempadan sungai di kawasan penyangga Sub DAS Mendalam.
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan tahapan dan teknis distribusi biaya yang telah disepakati kedua belah pihak antara lain biaya bibit, biaya persiapan lahan, penanaman dan biaya perawatan.
3. Pembiayaan atau Pembayaran kegiatan dilakukan dengan dua tahap, yaitu :
  - a. Tahap pertama, sebesar 50% dari total Bibit dan persiapan lahan, dibayarkan pada saat setelah kesepakatan ini ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dan 50% biaya bibit sisanya akan dibayarkan pada saat bibit sudah berada di lahan masing-masing pemilik lahan;
  - b. Tahap kedua, biaya penanaman dan perawatan selama tiga bulan setelah penanaman dilakukan setelah persiapan lahan dianggap selesai;
4. Adapun rincian pembiayaan kegiatan, yaitu :
  - a. Biaya bibit sebesar Rp 135.600.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah )
  - b. Biaya persiapan lahan untuk 46 pemilik lahan di Desa Nanga Sambus Rp 46.000.000,- (Empat Puluh Enam juta Rupiah) yang mana masing-masing pemilik lahan memperoleh biaya persiapan lahan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
  - c. Biaya penanaman sebesar Rp 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) yang mana masing-masing pemilik lahan memperoleh biaya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
  - d. Biaya perawatan 3 bulan setelah penanaman sebesar Rp 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) yang mana masing-masing pemilik lahan memperoleh biaya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

## PASAL 7

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

Untuk kegiatan konservasi sungai di Sub DAS Mendalam di wilayah administratif Desa Nanga Sambus, maka :

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membeli bibit dari atau melalui **PIHAK KEDUA** dengan harga yang telah disepakati yang tercantum dalam kesepakatan ini;
2. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran kegiatan yang telah disepakati bersama tahap pertama dan tahap kedua;
3. **PIHAK PERTAMA** berhak memonitoring dan evaluasi atas tahapan kegiatan dimaksud;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan tahapan kegiatan yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK PERTAMA** seperti yang disebutkan dalam kesepakatan ini;
5. **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran pelaksanaan kegiatan dalam kesepakatan ini dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah dan waktu pembayaran yang telah disepakati bersama;

## PASAL 8 KONDISI KHUSUS

Apabila dalam proses pelaksanaan kesepakatan ini terjadi suatu kondisi khusus misalnya bencana alam sehingga berpengaruh atau menyebabkan terhentinya pelaksanaan kesepakatan ini, maka kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan dibicarakan ulang untuk dilanjutkan atau dihentikan.

## PASAL 9 MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK

Apabila dalam proses pelaksanaan kesepakatan ini terjadi kesalah pahaman atau sengketa atau konflik antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak mematuhi kesepakatan ini, maka :

1. Konflik diselesaikan berdasarkan musyawarah antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan mediator yang disepakati bersama;
2. Apabila mekanisme musyawarah tidak bisa memberikan solusi penyelesaian konflik antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka konflik akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dimana kesepakatan ini dibuat;

## PASAL 10 WAKTU BERLAKUNYA KESEPAKATAN

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku dan dianggap sah setelah ditanda tangani **KEDUA BELAH PIHAK**;
2. Kesepakatan ini secara otomatis berakhir apabila tahapan yang disepakati bersama dalam kesepakatan ini telah dianggap selesai oleh **KEDUA BELAH PIHAK**;

Pontianak, Juli 2010

Nanga Sambus, Juli 2010

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

**M.Hermayani Putera**

**Zainal A.M**

Manajer Program Kalimantan Barat,  
WWF-Indonesia

Kepala Desa Nanga Sambus

Saksi :

1. ....

2. ....

3. ....



## LAMPIRAN

komitmen dari Pemda, dalam hal Dinas Kehutanan telah memberikan bantuan ke DAS Mendalam untuk 4 desa di periode 2 tahun terakhir (2010-2011) dengan jumlah total bantuan **Rp. 1.672.396.250,-**

Dengan rincian:

Tahun 2010

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Desa Datah Diaan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan          | Rp. 591.662.500,- |
| 2. Desa Padua Mendalam untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan       | Rp. 415.663.750,- |
| 3. Desa Nanga Sambus* untuk kegiatan pengembangan karet rakyat           | Rp. 75.000.000,-  |
| 4. Desa Datah Diaan*, Padua, dan Tanjung Karang untuk pengembangan kakao | Rp. -             |

**Total alokasi tahun anggaran 2010**

**Rp. 1.082.326.250,-**

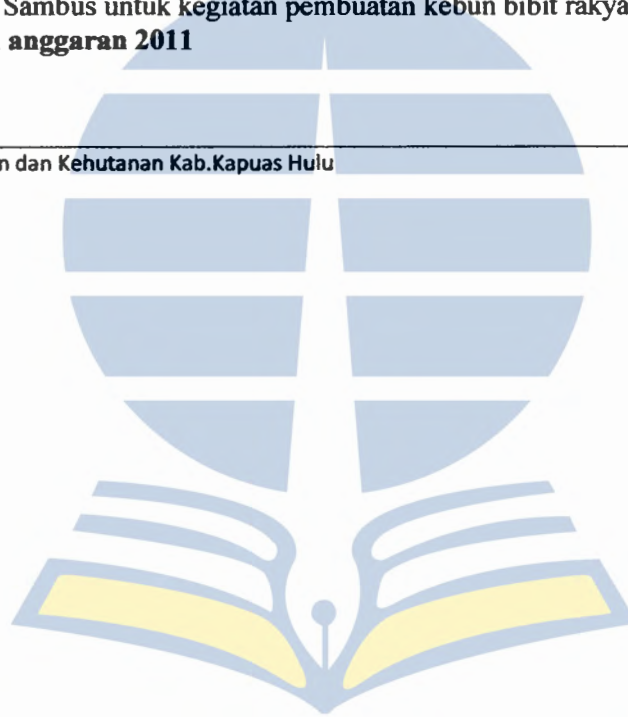
Tahun 2011

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Desa Ariung Mendalam untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan   | Rp. 490.070.000,- |
| 2. Desa Datah Diaan untuk kegiatan pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) | Rp. 50.000.000,-  |
| 3. Desa Nanga Sambus untuk kegiatan pembuatan kebun bibit rakyat      | Rp. 50.000.000,-  |

**Total alokasi tahun anggaran 2011**

**Rp. 590.070.000,-**

Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.Kapuas Hulu



LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 12 TAHUN 2007  
TANGGAL : 12 MARET 2007

**DAFTAR ISIAN  
POTENSI DESA DAN KELURAHAN**

Desa/Kelurahan : Nanga Sambus  
Kecamatan : Putussibau Utara  
Kabupaten/Kota : Kapuas Hulu  
Provinsi : Kalimantan Barat  
Bulan : Desember  
Tahun : 2012

Nama pengisi : TONI  
Pekerjaan : SWASTA  
Jabatan : SEKRETARIS DESA

**SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL  
DESA/KELURAHAN**

1. Data Potensi Desa tahun 2010
2. Data Dasar Rumah Tangga (DDRT)
3. Data pemerintahan Desa Tahun 2012
4. ....

Kepala Desa Nanga Sambus

**ZAINAL**

## POTENSI SUMBER DAYA ALAM

### A. POTENSI UMUM

#### 1. a. Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan
Sebelah utara	Desa Pala Pulau, Desa Sibau Hilir, Desa Sibau Hulu
Sebelah selatan	Sungai Kapuas
Sebelah timur	Ariung Mendalam, Desa Tanjung Karang
Sebelah barat	Desa Pala Pulau

#### 1. b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah

Penetapan Batas	Dasar Hukum	Peta Wilayah

#### 2. Luas wilayah menurut penggunaan

Luas pemukiman	24.00 ha/m <sup>2</sup>
	5.00
	<b>373.50</b>

<b>TANAH SAWAH</b>	
	0.00
	0.00
	81.00
	0.00
	<b>81.00</b>
<b>TANAH KERING</b>	
Tegal/ladang	20.00ha/m <sup>2</sup>
Pemukiman	24.00ha/m <sup>2</sup>
Pekarangan	4.00ha/m <sup>2</sup>
.....	ha/m <sup>2</sup>
<b>Total luas</b>	<b>48.00ha/m<sup>2</sup></b>
<b>TANAH BASAH</b>	
Tanah rawa	100,00ha/m <sup>2</sup>
Pasang surut	10,00ha/m <sup>2</sup>
Lahan gambut	50,00 ha/m <sup>2</sup>
Situ/waduk/danau	0,00 ha/m <sup>2</sup>
.....	ha/m <sup>2</sup>
<b>Total luas</b>	<b>160,00 ha/m<sup>2</sup></b>
<b>TANAH PERKEBUNAN</b>	
Tanah perkebunan rakyat	338.00 ha/m <sup>2</sup>
Tanah perkebunan negara	0.00 ha/m <sup>2</sup>



Tanah perkebunan swasta	0.00ha/m2
Tanah perkebunan perorangan	
.....	
<b>Total luas</b>	
<b>TANAH FASILITAS UMUM</b>	
Kas Desa/Kelurahan:	
a. Tanah bengkok	
b. Tanah titi sara	
c. Kebun desa	
d. Sawah desa	
Lapangan olahraga	
Perkantoran pemerintah	
Ruang publik/taman kota	
Tempat pemakaman desa/umum	
Tempat pembuangan sampah	
Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	
Pertokoan	
Fasilitas pasar	
Terminal	
Jalan	
Daerah tangkapan air	
Usaha perikanan	
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	
<b>Total luas</b>	
<b>TANAH HUTAN</b>	
<b>Total luas</b>	<b>1.020.00ha/m2</b>

<b>3. Iklim</b>	
	0
	0



Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	0.30Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	1.50 Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota	0,00 unit	tidak
Jarak ke ibu kota provinsi	609.00 Km	
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	18.00 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	..... Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi	0.00 unit	tidak

## B. PERTANIAN

### B.1. TANAMAN PANGAN

#### 1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	96 keluarga
Tidak memiliki	79 keluarga
Memiliki kurang 10 ha	96 keluarga
Memiliki 10 – 50 ha	0,00 keluarga
Memiliki 50 – 100 ha	0,00.keluarga
Memiliki lebih dari 100 ha	0,00.keluarga
Jumlah total keluarga petani Tanaman Pangan	175 keluarga

#### 2. Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini

Jagung	0.00 Ha	0.00 Ton/ha
Kacang kedelai	0.00 Ha	0.00 Ton/ha
Kacang tanah	0.25 Ha	0.00 Ton/ha
Kacang panjang	.00 Ha	0.00 Ton/ha
Kacang mede	0.00 Ha	0.00 Ton/ha
Kacang merah	0.00 Ha	0.00 Ton/ha
Padi sawah	81.00 Ha	0.55 Ton/ha
Padi ladang	20.00 Ha	0.35 Ton/ha
Cabe	0.00 Ha	0.00 Ton/ha
	2.5 Ha	
	1.00 Ha	
	0.00 Ha	
	0.00 Ha	
	0.00 Ha	
	0.00 Ha	




### 3. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan

#### A. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan

Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan	52 keluarga
Tidak memiliki	143 keluarga
Memiliki kurang dari 10 ha	42 keluarga
Memiliki 10 – 50 ha	0.00 keluarga
Memiliki 50 – 100 ha	0.00 keluarga
Memiliki 100 – 500 ha	0.00 keluarga
Memiliki 500 – 1000 ha	0.00 keluarga
Memiliki lebih dari 1000 ha	0.00 keluarga
Jumlah total keluarga perkebunan	94 keluarga

#### B. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan

Jeruk	0.50 Ha	1.270 Ton/ha
Alpokot	0.00 Ha	0.00 Ton/ha
Mangga	1.70 Ha	1.290 Ton/ha
Rambutan	4.50 Ha	3.030 Ton/ha
Manggis	2.50 Ha	0.790 Ton/ha
Salak	0.00 Ha	0.00 Ton/ha
Anel	0.00 Ha	0.00 Ton/ha
Peava	0.25 Ha	0.320 Ton/ha
Belimbing	Ha	Ton/ha
Durian	2.40 Ha	1.705 Ton/ha
Sawo	Ha	Ton/ha
Duku	2.70 Ha	2.725 Ton/ha
Kokosan	Ha	Ton/ha
Pisang	4.30 Ha	1.500 Ton/ha
Markisa	Ha	Ton/ha
Lengkeng	3.40 Ha	5.760 Ton/ha
Semangka	Ha	Ton/ha
Limau	Ha	Ton/ha
Jeruk nipis	Ha	Ton/ha
Melon	Ha	Ton/ha
Jambu air	Ha	Ton/ha
Nangka	1.20 Ha	0.775 Ton/ha
Sirsak	Ha	Ton/ha
Kedondong	Ha	Ton/ha
Anggur	Ha	Ton/ha
Melinjo	Ha	Ton/ha
Nenas	Ha	Ton/ha
Jambu klutuk	Ha	Ton/ha
Murbei	Ha	Ton/ha
Kelapa	1.20 Ha	0.977 Ton/ha
	Ha	Ton/ha
		Ton/ha



Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara	0.00 ha
Total Luas Perkebunan	220 ha

## 2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas

Jenis	Swasta/negara		Rakyat	
	Luas (ha)	Hasil (kw/ha)	Luas (ha)	Hasil (kw/ha)
Kelapa				
Kelapa sawit				
Kopi				
Cengkeh				
Coklat			16.5	2,475
Pinang				
Lada				
Karet			227,5	4.550
Jambu Mete				
Tembakau				
Pala				
Vanili				
Jarak pagar				
Jarak kepyar				
Tebu				
Kemiri				
Kapuk				
Teh				
.....				

## 3. Pemasaran Hasil Perkebunan

Dijual langsung ke konsumen	Ya

## D. KEHUTANAN

### 1. Luas Lahan Menurut Pemilikan

Milik Negara	..... ha
	ha
	ha
	ha

### 2. Hasil Hutan

Kayu	1.000 M /th
	3/
	3



Sagu	.....	Ton/th
Enau	.....	Ton/th
Mahoni	.....	M3/th
Cemara	.....	M3/th
Kayu cendana	.....	Ton/th
Kayu gaharu	.....	Ton/th
Sarang burung	.....	Ton/th
Meranti	.....	M3/th
Kayu besi	.....	M3/th
Kayu ulin	.....	M3/th
Kemenyan	.....	Ton/th
Gambir	.....	Ton/th
Minyak kayu putih	.....	Ton/th
Gula enau	.....	Ton/th
Gula lontar	.....	Ton/th
Arang	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

**3. Kondisi Hutan**

Kondisi Hutan	Baik	Rusak	Total
Hutan Bakau/mangrove	..... ha	..... ha	..... ha
Hutan Produksi	..... ha	..... ha	..... ha
Hutan Lindung	..... ha	..... ha	..... ha
Hutan Suaka Margasatwa	..... ha	..... ha	..... ha
Hutan Suaka Alam	..... ha	..... ha	..... ha
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

**4. Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan**

Pencemaran Udara	Tidak
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

**5. Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan**

Dijual langsung ke konsumen	Ya
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....



-11-

**4. Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak**


**5. Pemasaran Hasil Ternak**

Tidak dijual	Ya

**6. Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak / padang penggembalaan**

Milik masvarakat umum	0.00 ha
Milik perusahaan peternakan (ranch)	0.00 ha
Milik perorangan	54 ha
Sewa pakai	0.00 ha
Milik pemerintah	0.00 ha
Milik masvarakat adapt	ha

**F. PERIKANAN**
**1. Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau**

Karamba	unit	ton/th
Tambak	ha	ton/th
Jermal	unit	ton/th
Pancing	unit	ton/th
Pukat	unit	ton/th
Jala	unit	ton/th
	ha	ton/th

**2. Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar**

Jala		
Pancingan	82 unit	ton/th





**G. BAHAN GALIAN**

<b>1. Jenis dan deposit bahan galian</b>	
Batu kali	Ada
Batu gunung	Tidak
Batu kapur	Tidak
Pasir	Ada
Emas	Tidak
Nikel	Tidak
Belerang	Tidak
Batu marmer	Tidak
Batu cadas	Tidak
Batu apung	Tidak
Pasir kwarsa	Tidak
Batubara	Tidak
Batu Granit	Tidak
Batu Gamping	Tidak
Mangan	Tidak
Batu Trass	Tidak
Batu Putih	Tidak
Pasir Batu	Ada
Pasir Besi	Tidak
Batu Gips	Tidak
Minyak Bumi	Tidak
Gas Alam	Tidak
Kulit kerang	Tidak
Timah	Tidak
Tanah Garam	Tidak
Biji Besi	Tidak
Uranium	Tidak
Bouxit	Tidak
Tanah liat	Tidak
	Tidak

<b>2. Produksi bahan galian</b>	
Batu kapur	Besar/Sedang/Kecil
Pasir	Sedang
Emas	Kecil
Kuningan	Besar/sedang/Kecil
Aluminium	Besar/Sedang/Kecil
Perunggu	Besar/Sedang/Kecil
Belerang	Besar/Sedang/Kecil
Batu marmer	Besar/Sedang/Kecil
Batu cadas	Besar/Sedang/Kecil
Batu apung	Besar/Sedang/Kecil
Pasir kwarsa	Besar/Sedang/Kecil
Batubara	Besar/Sedang/Kecil
Batu Granit	Besar/Sedang/Kecil
Batu Gamping	Besar/Sedang/Kecil
Mangan	Besar/Sedang/Kecil
Batu Trass	Besar/Sedang/Kecil
Batu Putih	Besar/Sedang/Kecil
Pasir Batu	Besar/Sedang/Kecil
Pasir Besi	Besar/Sedang/Kecil
Gips	Besar/Sedang/Kecil
Minyak Bumi	Besar/Sedang/Kecil







Air baku untuk pengolahan air minum	tidak
Cuci dan mandi	Ya
Irigasi	Ya
Buang air besar	Ya
Perikanan	Ya
Sayuran	tidak
Pembudidayaan hutan mangrove	tidak
.....	.....
.....	.....

**6. Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ**

<b>Luas</b>	0.00 ha
<b>Pemanfaatan</b>	
Perikanan	tidak
Air Minum/Air Baku	tidak
Cuci dan mandi	tidak
Irigasi	tidak
Buang air besar	tidak
Pembangkit listrik	tidak
Prasarana transportasi	tidak
Lainnya.....	tidak
<b>Kondisi</b>	
Tercemar	tidak
Pendangkalan	tidak
Keruh	tidak
Berlumpur	tidak

**7. Air Panas**

Sumber	Jumlah Lokasi	Pemanfaatan (wisata, Pengobatan Energi, dll)	Kepemilikan/Pengelolaan		
			Pemda	Swasta	Adat/Perorangan
Gunung Berapi					
Geiser					
.....					
.....					

**I. KUALITAS UDARA**

Sumber	Jumlah Lokasi Sumber Pencemar	Polutan Pencemar	Efek terhadap Kesehatan (gangguan penglihatan/kabut, ISPA, dll)	Kepemilikan		
				Pemda	Swasta	Per-orangan
Pabrik (kapur, marmer, dll)						
Kendaraan bermotor						
Pembakaran Hutan/Lahan Gambut						
.....						

**J. KEBISINGAN**

Tingkat Kebisingan	Ekses dampak kebisingan	Sumber Kebisingan (kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll)	Efek Terhadap Penduduk
Kebisingan Tinggi	Tidak		
Kebisingan sedang	Tidak		
Kebisingan Ringan	Ya		
Tidak Bising	Tidak		

**K. RUANG PUBLIK/TAMAN**

Ruang Publik/ Taman	Keberadaan	Luas	Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif)
	Tidak ada	.....M <sup>2</sup>	Aktif/Pasif
Taman Bermain	Tidak ada	.....M <sup>2</sup>	Aktif/Pasif
Hutan Kota	Tidak ada	.....M <sup>2</sup>	Aktif/Pasif
Taman Desa/Kel.	Tidak ada	.....M <sup>2</sup>	Aktif/Pasif
Tanah Kas Desa	ada	25.000M <sup>2</sup>	Aktif/Pasif
Tanah Adat	ada	.....M <sup>2</sup>	Aktif/Pasif
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
<b>Jumlah Total</b>		<b>25.000 M<sup>2</sup></b>	.....

**L. POTENSI WISATA**

Lokasi/ Tempat/ Area Wisata	Keberadaan	Luas	Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif)
Laut (Wisata Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, Pantai dll)	Tidak ada	0.00ha	Aktif/Pasif
Danau (Wisata Air, Hutan Wisata, Situs Purbakala, dll)	Tidak ada	0.00 ha	Aktif/Pasif
Gunung (wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan, dll)	Tidak ada	0.00 ha	Aktif/Pasif
Agrowisata	Tidak ada	0.00 ha	Aktif/Pasif
Hutan Khusus	Tidak ada	0.00 ha	Aktif/Pasif
Goa	Tidak ada	0.00 ha	Aktif/Pasif
Cagar Budaya	Tidak ada	0.00 ha	Aktif/Pasif
Arung Jeram	Tidak ada	0.00 ha	Aktif/Pasif
Situs Sejarah, dan museum	Tidak ada	0.00 ha	Aktif/Pasif
Air Terjun	Tidak ada	0.00 ha	Aktif/Pasif
Padang Savana (wisata Padang Savana)	Tidak Ada	0.00 ha	Aktif/Pasif
.....	.....	.....	.....







Karyawan perusahaan pemerintah	..... orang	orang
.....	..... orang	orang
.....	..... orang	orang
.....	..... orang	orang
.....	..... orang	orang
.....	..... orang	orang
.....	..... orang	orang
.....	..... orang	orang
.....	..... orang	orang
<b>Jumlah Total Penduduk</b>	..... orang	<b>orang</b>

**E. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN**

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	354 orang	329 orang
Kristen	0 orang	0 orang
Katholik	40 orang	45 orang
Hindu	0 orang	0 orang
Budha	0 orang	0 orang
Khonghucu	0 orang	0 orang
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	0 orang	0 orang
Aliran Kepercayaan lainnya	0 orang	0 orang
<b>Jumlah</b>	<b>394 orang</b>	<b>374 orang</b>

**F. KEWARGANEGARAAN**

Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan
Warga Negara Indonesia	394 orang	374 orang
Warga Negara Asing	..... orang	..... orang
Dwi Kewarganegaraan	..... orang	..... orang
<b>Jumlah</b>	<b>394 orang</b>	<b>374 orang</b>

**G. ETNIS**

Etnis	Laki-laki	Perempuan



Flores	..... orang	..... orang
Papua		
Timor		
Sabu		
Sumba		
Ternate		
Tolaki		
Buton		
Muna		
Mikongga		
Wanci		
Alor		
Benoa		
Tunjung		
Mbojo		
Samawa		
Asia		
Afrika		
Australia		
China		
Amerika		
Eropa		
.....		
.....		
.....		
.....		
<b>Jumlah</b>		

**H. CACAT MENTAL DAN FISIK**

<b>Cacat Fisik</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Tuna rungu	3 orang	2 orang
Tuna wicara	1 orang	0 orang
Tuna netra	0 orang	0 orang
Lumpuh	0 orang	0 orang
Sumbing	1 orang	2 orang
Cacat kulit	0 orang	0 orang
Cacat fisik/tuna daksa lainnya	12 orang	7 orang
.....	..... orang	..... orang
.....	..... orang	..... orang
<b>Jumlah</b>	<b>17 orang</b>	<b>11 orang</b>
<b>Cacat Mental</b>		
Idiot	3 orang	3 orang
Gila	0 orang	0 orang
Stress	1 orang	0 orang
	2 orang	0 orang
	0 orang	0 orang
	<b>6 orang</b>	<b>3 orang</b>

**I. TENAGA KERJA**

Tenaga Kerja	Laki-laki	Perempuan
Penduduk usia 18-56 tahun	213 orang	210 orang
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang bekerja	213 orang	210 orang
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang belum atau tidak bekerja	0 orang	0 orang
Penduduk usia 0 - 6 tahun	53 orang	52 orang
Penduduk masih sekolah 7-18 th	92 orang	87 orang
Penduduk usia 56 tahun ke atas	36 orang	25 orang
Angkatan kerja	213 orang	210 orang
<b>Jumlah</b>	<b>394 orang</b>	<b>374 orang</b>
<b>Jumlah total</b>		<b>768 orang</b>

**J. KUALITAS ANGKATAN KERJA**

Angkatan Kerja	Laki-laki	Perempuan
Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/ angka latin	6 orang	15 orang
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tidak tamat SD	35 orang	29 orang
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SD	76 orang	77 orang
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTP	18 orang	16 orang
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTA		
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi		
.....		
.....		
.....		
<b>Jumlah</b>		

**III. POTENSI KELEMBAGAAN**
**A. LEMBAGA PEMERINTAHAN**

<b>PEMERINTAH DESA/KELURAHAN</b>		
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan	Ada	Keputusan Bupati Ada Dasar Hukum
Dasar hukum pembentukan BPD	Ada	Keputusan Bupati Ada Dasar Hukum
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan		18 orang
Jumlah perangkat desa/kelurahan		13 unit kerja
Kepala Desa/Lurah	Ada	
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada	
Kepala Urusan Pemerintahan	Ada/Aktif	
Kepala Urusan Pembangunan	Ada/Aktif	
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Tidak	
Kepala Urusan Kesejahteraan	Ada/Aktif	

Rakyat	tidak
Kepala Urusan Umum	tidak
Kepala Urusan Keuangan	tidak
Kepala Urusan.....	tidak
Kepala Urusan.....	..... orang
Jumlah Staf	2 dusun/lingkungan
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain	tidak
Kepala Dusun/Lingkungan Sambus hulu	Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan Sambus Hilir	Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan .....	
Kepala Dusun/Lingkungan .....	
Kepala Dusun/Lingkungan .....	
<b>Tingkat Pendidikan Aparat</b>	<b>SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana</b>
<b>Desa/Kelurahan</b>	SLTA
Kepala Desa/Lurah	SLTA
Sekretaris Desa/Kelurahan	SLTA
Kepala Urusan Pemerintahan	SD
Kepala Urusan Pembangunan	
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	SD
Kepala Urusan Umum	
Kepala Urusan Keuangan	
Kepala Urusan.....	
Kepala Urusan.....	
<b>BADAN PERMUSYAWARATAN DESA</b>	
Keberadaan BPD	Ada/aktif
Jumlah Anggota BPD	5 orang
<b>Pendidikan Anggota BPD</b>	<b>SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana</b>
Ketua : RUDI HARTONO	SLTP
Wakil Ketua :	
Sekretaris : ISKANDAR	SLTA
:	.....
Anggota, Nama :	
Anggota, Nama : ABDUL SAMAD	SD
Anggota, Nama : SEDEK	SD
Anggota, Nama : AJUNG	SLTA
Anggota, Nama : .....	.....
Anggota, Nama : .....	.....
Anggota, Nama : .....	.....
<b>B. LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>	
<b>Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>(LKD/LKK)</b>
<b>Keberadaan LKD/LKK</b>	Ada/tidak - Aktif/tidak



Dasar hukum pembentukan	
	Bila Belum ada organisasi LKD/LKK
	Bila pembentukan LKD/LKK berdasarkan Perdes dan Perda Kab/Kota
	Berdasarkan Keputusan Bupati/Wali kota
	Berdasarkan Keputusan Camat
	Tidak/belum ada dasar hukum
Jumlah pengurus	.....orang
Alamat kantor	.....
	.....
	.....Jenis , Yakni .....
	.....
	.....orang
	.....
	.....
	.....Jenis , Yakni .....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

<b>KARANG TARUNA</b>	
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus	
Alamat kantor	..... .....
Ruang lingkup kegiatan	
<b>KELOMPOK TANI/NELAYAN</b>	
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus	
Alamat kantor	..... .....
Ruang lingkup kegiatan	
<b>LEMBAGA ADAT</b>	
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus	
Alamat kantor	..... .....
Ruang lingkup kegiatan	
<b>BADAN USAHA MILIK DESA</b>	
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus	
Alamat kantor	..... .....
Ruang lingkup kegiatan	
<b>ORGANISASI KEAGAMAAN</b>	
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus	
Alamat kantor	..... .....
Ruang lingkup kegiatan	
<b>ORGANISASI PEREMPUAN LAIN</b>	
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus	
Alamat kantor	..... .....
Ruang lingkup kegiatan	
<b>ORGANISASI PEMUDA LAINNYA</b>	
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus	
Alamat kantor	..... .....
	..... .....

Ruang lingkup kegiatan	.....Jenis , Yakni .....
<b>ORGANISASI BAPAK</b>	1 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	.....
Jumlah pengurus	5 orang
Alamat kantor	..... .....
Ruang lingkup kegiatan	.....Jenis , Yakni .....
<b>KELOMPOK GOTONG ROYONG</b>	2 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	.....
Jumlah pengurus	12 orang
Alamat kantor	..... .....
Ruang lingkup kegiatan	.....Jenis , Yakni .....
<b>PWI</b>	
Dasar hukum pembentukan	.....
Jumlah pengurus	.....orang
Alamat kantor	..... .....
Ruang lingkup kegiatan	.....Jenis , Yakni .....
<b>IDI</b>	
Dasar hukum pembentukan	.....
Jumlah pengurus	.....orang
Alamat kantor	..... .....
Ruang lingkup kegiatan	.....Jenis , Yakni .....
<b>PARFI</b>	
Dasar hukum pembentukan	.....
Jumlah pengurus	.....orang
Alamat kantor	..... .....
Ruang lingkup kegiatan	.....Jenis , Yakni .....
<b>PECINTA ALAM</b>	..... unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	.....
Jumlah pengurus	.....orang
Alamat kantor	..... .....
Ruang lingkup kegiatan	.....Jenis , Yakni .....
<b>WREDATAMA</b>	
Dasar hukum pembentukan	.....
Jumlah pengurus	.....orang
Alamat kantor	..... .....
	.....Jenis , Yakni .....
	..... unit organisasi
	.....
	.....orang
	.....
	.....



Ruang lingkup kegiatan	.....
<b>PANTI</b> .....	.....Jenis , Yakni .....
Dasar hukum pembentukan	..... unit organisasi
Jumlah pengurus	.....
Alamat kantor	.....orang
Ruang lingkup kegiatan	.....
<b>YAYASAN</b> .....	.....Jenis , Yakni .....
Dasar hukum pembentukan	..... unit organisasi
Pemilik	.....
Jumlah pengurus	.....
Alamat kantor	.....orang
Ruang lingkup kegiatan	.....
<b>LEMBAGA</b> .....	.....Jenis , Yakni .....
Dasar hukum pembentukan	.....
Jumlah pengurus	.....
Alamat kantor	.....orang
Ruang lingkup kegiatan	.....
.....	.....Jenis , Yakni .....
.....	.....
Dasar hukum pembentukan	.....
.....	.....
Ruang lingkup kegiatan	.....
.....	.....

### C. LEMBAGA POLITIK

#### PARTAI GOLKAR

Jumlah Pengurus	.....
Jumlah Partai Politik Lokal	10 orang
Jumlah Partai Politik Nasional	.....
Jumlah Anggota	.....
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	24 orang
Alamat Sekretariat/Kantor	11 orang
Dasar Hukum Pembentukan	.....
Ruang Lingkup Kegiatan	.....
Organisasi Underbow	..... Jenis, Yakni .....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

<b>PDIP</b>	
Jumlah Pengurus	11 orang
Jumlah Anggota	25 orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	25 orang
Alamat Sekretariat/Kantor	.....
Dasar Hukum Pembentukan	.....
Ruang Lingkup Kegiatan	..... Jenis, Yakni .....
Organisasi Underbow	.....
	.....
	.....
<b>PPP</b>	
Jumlah Pengurus	15 orang
Jumlah Anggota	35 orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	102 orang
Alamat Sekretariat/Kantor	.....
Dasar Hukum Pembentukan	.....
Ruang Lingkup Kegiatan	..... Jenis, Yakni .....
Organisasi Underbow	.....
	.....
	.....
<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	
Jumlah Pengurus	10 orang
Jumlah Anggota	29 orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	40 orang
Alamat Sekretariat/Kantor	.....
Dasar Hukum Pembentukan	.....
Ruang Lingkup Kegiatan	..... Jenis, Yakni .....
Organisasi Underbow	.....
	.....
	.....
<b>PAN</b>	
Jumlah Pengurus	0 orang
Jumlah Anggota	0 orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	0 orang
Alamat Sekretariat/Kantor	.....
Dasar Hukum Pembentukan	.....
Ruang Lingkup Kegiatan	..... Jenis, Yakni .....
Organisasi Underbow	.....
	.....
	.....
<b>PKS</b>	
Jumlah Pengurus	20 orang
Jumlah Anggota	47 orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	47 orang
Alamat Sekretariat/Kantor	.....

Dasar Hukum Pembentukan	.....
Ruang Lingkup Kegiatan	.....
Organisasi Underbow	..... Jenis, Yakni .....
	.....
	.....
	.....
<b>PBB</b>	
Jumlah Pengurus	0 orang
Jumlah Anggota	0 orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	6 orang
Alamat Sekretariat/Kantor	.....
	.....
Dasar Hukum Pembentukan	.....
	.....
Ruang Lingkup Kegiatan	..... Jenis, Yakni .....
Organisasi Underbow	.....
	.....
	.....
	.....
<b>PKB</b>	
Jumlah Pengurus	0 orang
Jumlah Anggota	0 orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	9 orang
Alamat Sekretariat/Kantor	.....
	.....
Dasar Hukum Pembentukan	.....
Ruang Lingkup Kegiatan	..... Jenis, Yakni .....
Organisasi Underbow	.....
	.....
	.....
	.....
<b>PBR</b>	
Jumlah Pengurus	11 orang
Jumlah Anggota	12 orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	24 orang
Alamat Sekretariat/Kantor	.....
	.....
Dasar Hukum Pembentukan	.....
Ruang Lingkup Kegiatan	..... Jenis, Yakni .....
Organisasi Underbow	.....
	.....
	.....
	.....
<b>PDS</b>	
Jumlah Pengurus	0 orang
Jumlah Anggota	0 orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	0 orang
Alamat Sekretariat/Kantor	.....
	.....
	.....



Ruang Lingkup Kegiatan	..... Jenis, Yakni .....
Organisasi Underbow	..... ..... .....
<b>PUI</b>	
Jumlah Pengurus	0 orang
Jumlah Anggota	0 orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	0 orang
Alamat Sekretariat/Kantor	..... ..... .....
Dasar Hukum Pembentukan	..... .....
Ruang Lingkup Kegiatan	..... Jenis, Yakni .....
	..... ..... ..... .....
<b>PARTAI</b> .....	
Jumlah Pengurus	.....orang
Jumlah Anggota	.....orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	.....orang
Alamat Sekretariat/Kantor	..... .....
Dasar Hukum Pembentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	..... Jenis, Yakni .....
Organisasi Underbow	..... ..... ..... .....
<b>PARTAI</b> .....	
Jumlah Pengurus	.....orang
Jumlah Anggota	.....orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	.....orang
Alamat Sekretariat/Kantor	..... .....
Dasar Hukum Pembentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	..... Jenis, Yakni .....
Organisasi Underbow	..... ..... ..... .....
<b>PARTAI</b> .....	
Jumlah Pengurus	.....orang
Jumlah Anggota	.....orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	.....orang
Alamat Sekretariat/Kantor	..... .....

Dasar Hukum Pembentukan	.....
Ruang Lingkup Kegiatan	..... Jenis, Yakni .....
Organisasi Underbow	..... ..... ..... .....
<b>PARTAI</b> .....	
Jumlah Pengurus	.....orang
Jumlah Anggota	.....orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	.....orang
Alamat Sekretariat/Kantor	..... .....
Dasar Hukum Pembentukan	..... .....
Ruang Lingkup Kegiatan	..... Jenis, Yakni .....
Organisasi Underbow	..... ..... ..... .....
	..... unit organisasi
	.....orang
	.....orang
	.....
	.....Jenis , Yakni .....
	..... unit organisasi
	.....orang
	.....orang
	.....
	.....
	.....Jenis , Yakni .....
	..... unit organisasi
	.....orang
	.....orang
	.....
	.....
	.....Jenis , Yakni .....
	..... unit organisasi
	.....orang
	.....orang
	.....
	.....
	.....Jenis , Yakni .....

<b>ORGANISASI UNDERBOW PARTAI ...</b>	..... unit organisasi
Jumlah Pengurus	.....orang
Jumlah Anggota	.....orang
Alamat Sekretariat/Kantor	.....
Dasar Hukum Pembentukan	.....
Ruang Lingkup Kegiatan	.....Jenis , Yakni .....
<b>ORGANISASI UNDERBOW PARTAI ...</b>	..... unit organisasi
Jumlah Pengurus	.....orang
Jumlah Anggota	.....orang
Alamat Sekretariat/Kantor	.....
Dasar Hukum Pembentukan	.....
Ruang Lingkup Kegiatan	.....Jenis , Yakni .....

#### D. LEMBAGA EKONOMI

<b>1. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/ Kelurahan</b>	<b>Jumlah/unit</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Jumlah pengurus dan Anggota</b>
Koperasi Unit Desa	0	0	0
Koperasi Simpan Pinjam	0	0	0
Kelompok Simpan Pinjam	1	1	100
Bumdes	0	0	0
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
<b>2. Jasa Lembaga Keuangan</b>	<b>Jumlah/unit</b>	<b>Jumlah kegiatan</b>	<b>Jumlah Pengurus</b>
Jasa Asuransi	0	0	0
Lembaga Keuangan Non Bank	1	2	9
Bank Perkreditan Rakyat	0	0	0
Pegadaian	0	0	0
Bank Pemerintah	0	0	0
.....	.....	.....	.....
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Industri Kecil dan Menengah</b>			
Industri makanan	.....	.....	.....
Industri Alat rumah tangga	.....	.....	.....
Industri Material Bahan Bangunan	.....	.....	.....
Industri Alat Pertanian	.....	.....	.....
Industri Kerajinan	.....	.....	.....
Rumah makan dan restoran	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
<b>Jumlah</b>	.....	.....	.....
<b>4. Usaha Jasa Pengangkutan</b>	<b>Jumlah Pemilik</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Tenaga Kerja</b>
Jumlah pemilik Angkutan Desa/Perkotaan	1 orang	12 orang	2 orang



Angkutan Antar Kota/Provinsi	.....unit		
<b>Angkutan Sungai</b>			
Jumlah Pemilik Perahu Motor/ Klotok atau sejenisnya	1 orang	1 orang	2 orang
Jumlah pemilik Jet boat	.....orang	.... orang	..... orang
Jumlah angkutan jetboat	.....orang	.... orang	..... orang
Jumlah Pemilik Angkutan Penumpang Sungai dgn kapasitas lebih dari 10 orang	.....orang	.... orang	..... orang
Jumlah angkutan sungai yang kapasitas kurang dari 10 kursi	.....unit		
Jumlah angkutan sungai yang kapasitas antara 10 – 100			
Jumlah angkutan sungai yang kapasitas antara 100 – 500			
.....			
.....			
<b>Angkutan Laut</b>			
Jumlah Pemilik Perahu Jenis Ferry/Kapal penumpang	.....orang	.... orang	..... orang
Jet Foil	.....orang	.... orang	..... orang
.....			
<b>Angkutan Udara</b>			
ringan /helikopter			
<b>Ekspedisi/Pengiriman Barang</b>			

5. Usaha Jasa dan Perdagangan	Jumlah	Jenis produk yg diperdagangkan (umum, sayuran, barang & jasa, tambang, dll)	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap
Pasar Hasil Bumi/ Tradisonal/ Harian	..... unit	.....jenis	..... orang
Pasar Mingguan	..... unit	.....jenis	..... orang
Pasar Bulanan	..... unit	.....jenis	..... orang
Pasar Kaget/Pasar Khusus (mis. Psr Ternak, dll)	..... unit	.....jenis	..... orang
Jumlah Usaha Toko/Kios	10 unit	Umum jenis	20 orang
Warung Serba Ada	..... unit	.....jenis	..... orang
Toko Kelontong	..... unit	.....jenis	..... orang
Usaha Peternakan	..... unit	.....jenis	..... orang
Usaha Perikanan	..... unit	.....jenis	..... orang
Usaha Perkebunan	..... unit	.....jenis	..... orang
Usaha Minuman (kemasan, dll)	..... unit	.....jenis	..... orang

Industri Farmasi			
Industri Caroseri/cat mobil	..... unit	.....jenis	..... orang
Penitipan Kendaraan	..... unit	.....jenis	..... orang
Industri Perakitan	.....orang	..... orang	..... orang
Sirkus Keliling/Topeng	..... unit	.....jenis	..... orang
Wayang Orang/Wayang	..... unit	.....jenis	..... orang
Group Vokal/Paduan	..... unit	.....jenis	..... orang
<b>7. Usaha Jasa Gas,</b>			
Usaha Penyewaan Tenaga	..... unit	.....jenis	..... orang
Pengecer Gas dan Bahan	..... unit	.....jenis	..... orang
Usaha air minum kemasan/isi ulang	..... unit	.....jenis	..... orang
<b>8. Usaha Jasa Keterampilan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah Jenis produk yang</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang</b>
Tukang Pijat/	..... orang	.....jenis	..... orang
Pengacara/Advokat	..... unit	..... jenis	..... orang

Konsultan Manajemen	..... unit	..... jenis	..... orang
Konsultan Teknis			
Pejabat Pembuat Akta Tanah			
.....	..... unit	..... jenis	..... orang
<b>10. Usaha Jasa Penginapan</b>			
Losmen	..... unit	..... jenis	..... orang
Wisma	..... unit	..... jenis	..... orang
Asrama	..... unit	..... jenis	..... orang
Persewaan Kamar	..... unit	..... jenis	..... orang
Kontrakan Rumah	..... unit	..... jenis	..... orang
Mess	..... unit	..... jenis	..... orang
Hotel	..... unit	..... jenis	..... orang
Home Stay	..... unit	..... jenis	..... orang
Villa	..... unit	..... jenis	..... orang
Town House	..... unit	..... jenis	..... orang
.....	..... unit	..... jenis	..... orang
.....			

**E. LEMBAGA PENDIDIKAN**

**1. Pendidikan Formal**

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	Desa / Kelurahan		
Play Group							
TK							
SD/ sederajat	1	Terdaftar	Pemerintah			11	125
SMP/ sederajat							
SMA/ sederajat							
PTN							
PTS							
SLB							
.....							
.....							
.....							

**2. Pendidikan Formal Keagamaan**

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	Dil		
<b>Sekolah Islam</b>							
Raudhatul Athfal							
Ibtidayah							
Tsanawiyah							
Aliyah							
Ponpes							
Perguruan Tinggi							
.....							
.....							



<b>Sekolah Katholik</b>							
Seminari Menengah							
Seminari tinggi							
Biara							
TK/SD							
SMP							
SMA							
Perguruan Tinggi							
Kursus							
<b>Sekolah Budha</b>							
.....							
.....							
.....							
<b>Sekolah Protestan</b>							
TK/SD							
SMP							
SMA							
Perguruan Tinggi							
Kursus							
.....							
<b>Sekolah Hindu</b>							
.....							
.....							
<b>Sekolah Konghucu</b>							
.....							
.....							

**3. Pendidikan Non Formal/Kursus**

<b>Nama</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Status (Terdaftar, terakreditasi)</b>	<b>Kepemilikan (pemerintah, yayasan, dll)</b>	<b>Jumlah Tenaga Pengajar</b>	<b>Jumlah siswa/ Mahasiswa</b>

<b>F. LEMBAGA ADAT</b>	
<b>1. Keberadaan Lembaga Adat</b>	
Pemangku Adat	
Kepengurusan Adat	
<b>2. Simbol Adat</b>	
Rumah Adat	
Barang Pusaka	
Naskah-naskah	
.....	
<b>3. Jenis Kegiatan Adat</b>	
Musyawarah adat	
Sanksi Adat	
Upacara Adat Perkawinan	
Upacara Adat Kematian	
Upacara Adat Kelahiran	
Upacara Adat dalam bercocok tanam	
Upacara Adat bidang perikanan/laut	
Upacara Adat bidang kehutanan	
Upacara Adat dalam Pengelolaan sumber daya alam	
Upacara adat dalam Pembangunan rumah	
Upacara adat dalam penyelesaian masalah/konflik	

<b>G. LEMBAGA KEAMANAN</b>	
Pemilik organisasi	Pemerintah/Swasta/
<b>3. Kerjasama Desa/Kelurahan dengan TNI - POLRI dalam Bidang</b>	





Delman/bendi/cidomo	Ada/tidak - .....unit
Becak	Ada/tidak - .....unit
Kereta api	Ada/tidak - .....unit
.....	Ada/tidak - .....unit

### 3. Prasarana Transportasi Laut/Sungai

Jumlah tambatan perahu	1 unit
Jumlah pelabuhan kapal penumpang	0 unit
Jumlah pelabuhan kapal barang	0 unit
.....	unit

### 4. Sarana Transportasi Sungai/Laut

Perahu motor	Ada - unit
Kapal antar pulau	Ada/tidak - .....unit
Perahu tanpa motor	Ada/tidak - .....unit
Jet Boat	Ada/tidak - .....unit
Kapal Pesiar	Ada/tidak - .....unit
.....	Ada/tidak - .....unit

### 5. Prasarana Transportasi Udara

.....	.....
.....	.....
.....	.....
Lapangan terbang komersial	Ada/tidak ..... unit

## B. PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI

### 1. Telepon

Telepon umum	Ada/tidak ada-.....unit
Wartel	Ada/tidak ada-.....unit
Warnet	Ada/tidak ada-.....unit
Jumlah Pelanggan Telkom	.....orang
Jumlah Pelanggan GSM	235 orang
Jumlah Pelanggan CDMA	.....orang
Sinyal Telepon Seluler/Handphone	Ada

### 2. Kantor Pos

Kantor pos	tidak ada-.....unit
Kantor pos pembantu	tidak ada-.....unit
Tukang pos	.....orang

### 3. Radio/TV

.....	.....
.....	.....
Jumlah parabola	121 unit

### 4. Koran/majalah/buletin

Koran/surat kabar	.....
Majalah	tidak
Papan iklan/reklame	tidak
Papan pengumuman	Ada

<b>C. PRASARANA AIR BERSIH DAN SANITASI</b>		unit
<b>1. Prasarana air bersih</b>		unit
Jumlah sumur pompa		unit
Jumlah sumur gali		
Jumlah hidran umum		unit
Jumlah PAH	.....	unit
Jumlah tangki air bersih		
Jumlah embung	2	unit
Jumlah mata air		
Jumlah bangunan pengolahan air bersih/air minum	.....	unit
<b>2. Sanitasi</b>		
Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah		
Sumur resapan air rumah tangga		
Jumlah MCK Umum		
Pemilik jumlah jamban keluarga	145	KK
Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	Baik .... Unit /rusak .... unit Unit/mampet.....Unit/ kurang memadai.....	
		Unit

**D. PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI**

<b>1. Prasarana Irigasi</b>	
Jumlah pintu pembagi air	..... unit
<b>2. Kondisi</b>	
Jumlah pintu pembagi air rusak	..... unit

**E. PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN**

<b>1. Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa /Kelurahan</b>	
Jumlah meja	5 buah

Jumlah kursi	55 buah
Jumlah almari arsip	1 buah
Komputer	2 unit
Mesin fax	0 unit
Kendaraan dinas	1 unit
<b>Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	
Buku Data Peraturan Desa	Ada
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	Ada
Buku administrasi kependudukan	Ada
Buku data inventaris	Ada
Buku data aparat	Ada
Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/milik kelurahan	Ada
Buku administrasi pajak dan retribusi	Ada
Buku data tanah	Ada
Buku laporan pengaduan masyarakat	tidak
Buku agenda ekspedisi	Ada
Buku profil desa/kelurahan	Ada
Buku data induk penduduk	Ada
Buku buku data mutasi penduduk	Ada
Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan	Ada
Buku registrasi pelayanan penduduk	Ada
Buku data penduduk sementara	tidak
Buku anggaran penerimaan	Ada
Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan	tidak
Buku kas umum	Ada
Buku kas pembantu penerimaan	Ada
Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan	Ada
Buku data lembaga kemasyarakatan	Ada
.....	

## 2. Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa/BPD

Gedung Kantor	tidak
Ruangan Kerja	0 ruang
Balai BPD	Ada
<b>Kondisi</b>	Baik,/rusak
Listrik	tidak
Air bersih	Ada/tidak-baik/rusak
Telepon	tidak
<b>Inventaris dan Alat Tulis Kantor</b>	
Jumlah mesin tik	0 buah
Jumlah meja	0 buah
Jumlah kursi	0 buah
Jumlah almari arsip	0 buah
Komputer	0 unit
Mesin fax	0 unit
.....	
.....	
<b>Administrasi BPD</b>	
Buku-buku administrasi keanggotaan BPD	Ada



Buku administrasi kegiatan BPD	1 Jenis
Buku kegiatan BPD	Ada
Buku Himpunan Peraturan Desa yang 3. ditetapkan BPD dan Kepala Desa	Ada
4.	
.....	
.....	

**3. Prasarana dan Sarana Dusun/Lingkungan atau Sebutan Lain**

Gedung kantor atau Balai	Tida
.....	

**F. PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA/KELURAHAN**

<b>Gedung/kantor Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>Tidak</b>
Kepengurusan	
Buku administrasi PKK	
<b>Jumlah kegiatan</b>	

<b>Karang Taruna</b>	Ada
Kepengurusan	Aktif
Buku administrasi	Ada
Jumlah kegiatan	3 Jenis
.....	
<b>RT</b>	Ada
Kepengurusan	Aktif
Buku administrasi	3 Jenis
Jumlah kegiatan	3 Jenis
<b>RW</b>	Ada
Kepengurusan	Aktif
Buku administrasi	2 Jenis
Jumlah Kegiatan	2 Jenis
.....	
<b>Lembaga adat</b>	
Memiliki kantor/gedung/menumpang	Ada
Kepengurusan	Aktif
Buku Administrasi	5 Jenis
Jumlah Kegiatan	5 Jenis
<b>BUMDES</b>	tidak
Memiliki kantor/gedung/menumpang	
Kepengurusan	tidak
Buku Administrasi	
Jumlah Kegiatan	
<b>Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat</b>	
Kantor/gedung/menumpang	tidak
Kepengurusan	tidak
Buku administrasi	
Jumlah kegiatan	0 Jenis
.....	0 Jenis
.....	
<b>Kantor/gedung Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya</b>	tidak
.....	tidak
.....	tidak
<b>Kantor/gedung Organisasi Profesi yang ada</b>	
.....	tidak
.....	tidak
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

**G. PRASARANA PERIBADATAN**

Jumlah Masjid	1	buah

**H. PRASARANA OLAH RAGA**

Lapangan sepak bola	1	buah

**I. PRASARANA DAN SARANA KESEHATAN**

**1. Prasarana Kesehatan**

Rumah sakit umum	0	unit
Puskesmas	0	unit
Puskesmas pembantu	1	unit
Poliklinik/balai pengobatan	0	unit
Apotik	0	unit
Posyandu	1	unit
Toko obat		unit
Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta		unit
Gudang menyimpan obat	0	unit
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	0	unit
Rumah Bersalin	0	unit
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	1	unit
Rumah Sakit Mata	0	unit
.....	.....	.....
.....		
.....		

**2. Sarana Kesehatan**

Jumlah dokter umum	0	orang
Jumlah dokter gigi	0	orang
Jumlah dokter spesialis lainnya	0	orang
Jumlah paramedis	0	orang
Jumlah dukun bersalin terlatih	0	orang
Bidan	1	orang
Perawat		orang
Dukun pengobatan alternatif		orang



Jumlah dokter praktek	..... orang
Laboratorium kesehatan	.....
.....	.....
.....	.....

#### J. PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN

Gedung kampus PTN	Sewa..... buah	milik sendiri... buah
Gedung Kampus PTS	Sewa..... buah	milik sendiri... buah
Gedung SMA/ sederajat	Sewa..... buah	milik sendiri... buah
Gedung SMP/ sederajat	Sewa..... buah	milik sendiri... buah
Gedung SD/ sederajat	Sewa..... buah	milik sendiri 1 buah
Gedung TK	Sewa..... buah	milik sendiri ... buah
Gedung Tempat Bermain Anak	Sewa..... buah	milik sendiri... buah
Jumlah Lembaga Pendidikan Agama	Sewa..... buah	milik sendiri 1 buah
Jumlah perpustakaan keliling	Sewa..... buah	milik sendiri... buah
Perpustakaan desa/ kelurahan	Sewa..... buah	milik sendiri... buah
Taman bacaan		
Gedung PAUD		
.....		

#### K. PRASARANA ENERGI DAN PENERANGAN

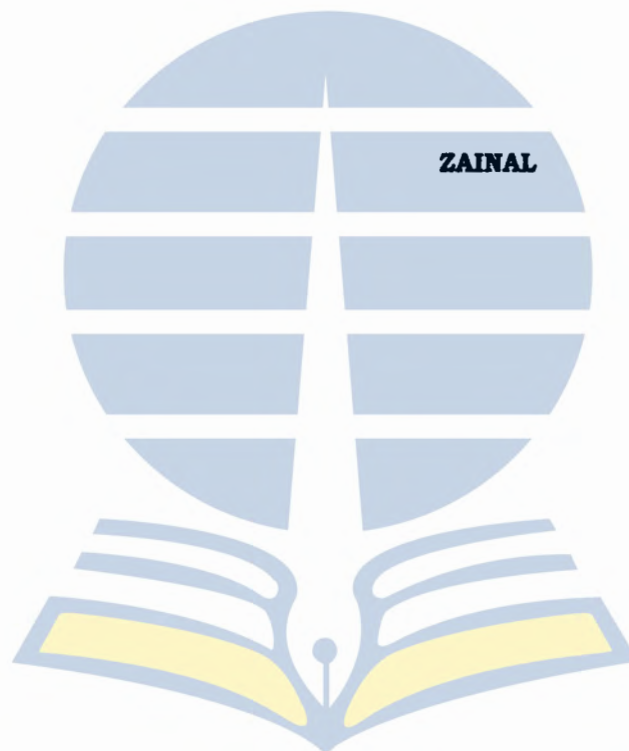
Listrik PLN	..... unit
Diesel umum	..... unit
Genset pribadi	5 unit
Lampu minyak tanah/ jarak/ kelapa	..... Keluarga
Kayu bakar	211 Keluarga
Batu bara	..... Keluarga
Tanpa penerangan	..... Keluarga

#### L. PRASARANA HIBURAN DAN WISATA

Jumlah Tempat Wisata	..... buah
Hotel bintang 5	..... buah
Hotel bintang 4	..... buah
Hotel bintang 3	..... buah
Hotel bintang 2	..... buah
Hotel bintang 1	..... buah
Hotel melati	..... buah
Diskotik	..... buah
Bilyar	..... buah
Karaoke	..... buah
Museum	..... buah
Restoran	..... buah
Bioskop	..... buah
.....	..... buah

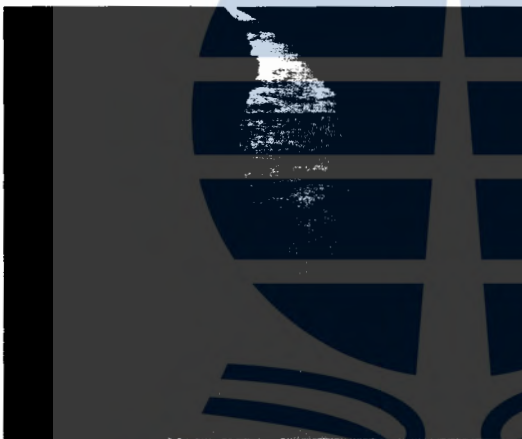
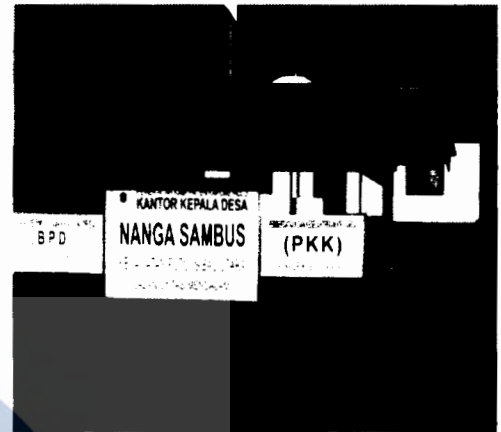
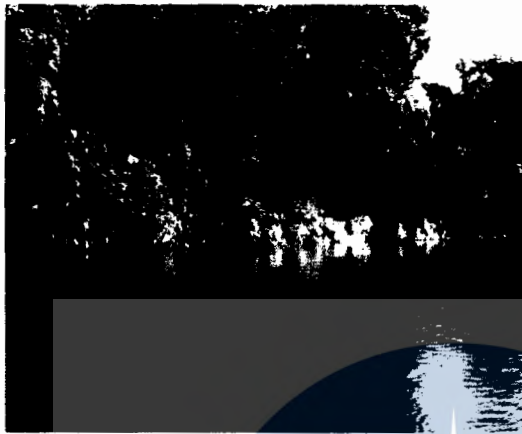
**M. PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN**

Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	..... Lokasi
Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	
Alat penghancur sampah // incinerator	
Jumlah gerobak sampah	
Jumlah tong sampah	
Jumlah truck pengangkut sampah	
Jumlah Satgas Kebersihan	
Jumlah anggota Satgas Kebersihan	
Jumlah pemulung	
Tempat pengelolaan sampah	
Pengelolaan sampah lingkungan/RT	
Pengelola sampah lainnya	

**KEPALA DESA NANGA SAMBUS**

LAMPIRAN

POTO LAPANGAN





POTO LAPANGAN

